

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Ekofeminisme dan Politik Kehidupan

Membela Perempuan, Membela Lingkungan

Isna Asaroh, S.Pd..

Isna Asaroh, S.Pd..

EKOFEMINISME DAN POLITIK KEHIDUPAN

Membela Perempuan, Membela Lingkungan



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Diterbitkan oleh:



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Ekofeminisme dan Politik Kehidupan: Membela Perempuan, Membela Lingkungan

Ditulis Oleh: **Isna Asaroh, S.Pd.**

ISBN : Proses Pengajuan

Halaman : xiv, 154, Uk: 15.5 x23 cm

Cetakan Pertama: Juni 2026

Editor: Nanang Tri Budiman, S.H.,M.Hum

Layouter: Cindy Charisma Satriyo

Desain Cover: Moch Mahsun

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :

Branded Tech Publisher

(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran

Probolinggo Jawa Timur 67261| Hp: 0811101665

Website: www.brandedtechpublisher.biz.id

E-mail: brandedtechindoensia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025

Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesempatan-Nya buku *“Ekofeminisme dan Politik Kehidupan: Membela Perempuan, Membela Lingkungan”* dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap krisis lingkungan yang semakin nyata terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, serta kesadaran bahwa dampak dari krisis tersebut tidak pernah berlangsung secara netral. Di balik kerusakan ekologis, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan, terdapat kelompok-kelompok yang mengalami kerentanan lebih besar, dan perempuan sering kali berada di garis paling depan dari situasi tersebut.

Krisis lingkungan hari ini bukan lagi sekadar persoalan alam yang rusak, melainkan telah berkembang menjadi krisis kehidupan. Ketika hutan kehilangan fungsinya, sumber air mengering, tanah kehilangan produktivitas, dan cuaca menjadi semakin tidak menentu, yang terdampak bukan hanya ekosistem, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dalam banyak situasi, perempuan harus menghadapi beban yang berlapis: menjaga keberlangsungan keluarga di tengah keterbatasan sumber daya, menghadapi ketidakadilan sosial, sekaligus berhadapan dengan struktur pembangunan yang sering kali mengabaikan suara mereka.

Melalui perspektif Ekofeminisme, buku ini berupaya membaca keterhubungan antara eksploitasi terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang saling berkaitan. Ekofeminisme tidak hanya hadir sebagai pendekatan teoritis, tetapi juga sebagai cara pandang kritis untuk memahami bagaimana logika dominasi, eksploitasi, dan ketimpangan bekerja dalam relasi manusia dengan alam maupun dalam relasi sosial antarmanusia. Dalam konteks tersebut, membela lingkungan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari

upaya membela kehidupan, keadilan, dan martabat manusia itu sendiri.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang sepenuhnya final atas kompleksitas persoalan lingkungan dan gender yang terus berkembang. Sebaliknya, buku ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya membangun kesadaran ekologis yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Penulis juga berupaya menghadirkan pembahasan yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi tetap dekat dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai isu seperti krisis iklim, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, ketahanan pangan, hingga gerakan perempuan lingkungan akan dibahas sebagai bagian dari satu keterhubungan yang utuh.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi pembahasan maupun kedalaman analisis. Karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu menjadi bagian penting untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, pemerhati gender, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap masa depan lingkungan dan kehidupan bersama.

Pada akhirnya, buku ini lahir dari keyakinan bahwa menjaga lingkungan bukan semata-mata upaya mempertahankan alam, melainkan juga menjaga keberlangsungan hidup manusia secara kolektif. Sebab ketika bumi terus mengalami kerusakan, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, tetapi juga keadilan, kemanusiaan, dan masa depan generasi mendatang.

Jember, 10 Juni 2026

Penulis,

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi perubahan lingkungan yang berlangsung semakin cepat, kompleks, dan sulit dipulihkan. Perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan, hingga meningkatnya intensitas bencana ekologis menunjukkan bahwa bumi sedang berada dalam tekanan yang serius. Berbagai fenomena tersebut bukan lagi sekadar isu ilmiah yang dibicarakan dalam ruang akademik atau forum internasional, melainkan telah menjadi realitas yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara, kekeringan berkepanjangan, banjir yang semakin sering terjadi, kebakaran hutan dalam skala besar, serta perubahan pola musim yang tidak menentu menjadi tanda bahwa sistem ekologis global sedang mengalami ketidakseimbangan. Dalam situasi tersebut, perubahan iklim tidak lagi dapat dipahami sebagai ancaman masa depan, tetapi sebagai krisis yang sedang berlangsung pada masa kini. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga menjalar ke sektor ekonomi, kesehatan, pangan, sosial, hingga stabilitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Krisis lingkungan pada akhirnya memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan alam selama ini dibangun di atas pola yang tidak berkelanjutan. Alam diperlakukan sebagai objek eksploitasi yang dapat diambil, diolah, dan dikonsumsi tanpa batas demi memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Hutan dibuka secara masif untuk kepentingan industri, sungai dijadikan tempat pembuangan limbah, lahan-lahan produktif dialihfungsikan secara berlebihan, sementara sumber daya alam terus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Model pembangunan modern yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam telah menciptakan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, tetapi pada saat yang sama juga

menghasilkan kerusakan ekologis dalam skala besar. Pertumbuhan industri, ekspansi perkebunan, aktivitas pertambangan, serta pola konsumsi yang semakin tinggi telah mempercepat degradasi lingkungan. Dalam logika pembangunan semacam ini, alam sering kali dipandang hanya sebagai instrumen ekonomi yang nilainya diukur berdasarkan keuntungan material semata. Akibatnya, keberlanjutan lingkungan kerap ditempatkan di bawah kepentingan investasi dan akumulasi modal.

Di tengah situasi tersebut, perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar yang memperlihatkan dampak nyata dari relasi eksploitatif manusia terhadap alam. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan tata guna lahan telah mendorong kenaikan suhu bumi secara global. Kenaikan suhu tersebut kemudian memicu berbagai perubahan dalam sistem iklim dunia, termasuk meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan terganggunya siklus hidrologi.

Fenomena seperti El Nino, kekeringan ekstrem, badai tropis, serta meningkatnya intensitas hujan dalam waktu singkat menunjukkan bahwa perubahan iklim menghadirkan ancaman yang semakin sulit diprediksi. Dalam konteks Indonesia, perubahan pola musim menyebabkan sektor pertanian menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Musim hujan yang datang terlambat, musim kemarau yang lebih panjang, serta meningkatnya risiko gagal panen memperlihatkan bahwa krisis iklim telah berdampak langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Namun demikian, dampak krisis lingkungan tidak pernah berlangsung secara netral. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami dampak lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Masyarakat miskin, komunitas adat, nelayan kecil, petani tradisional, serta kelompok rentan lainnya sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika kerusakan lingkungan terjadi. Ketika sumber air mengering, hasil panen menurun, atau bencana ekologis menghancurkan ruang hidup masyarakat, kelompok

dengan akses ekonomi dan sosial yang terbatas menjadi pihak yang paling sulit bertahan.

Dalam banyak kasus, krisis lingkungan justru memperbesar ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya. Masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih kuat cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang lebih baik, sementara kelompok rentan harus menghadapi risiko yang lebih besar dengan perlindungan yang terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Krisis ekologis pada akhirnya bukan hanya tentang kerusakan alam, tetapi juga tentang siapa yang paling terdampak, siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang memiliki kuasa dalam menentukan arah pembangunan.

Di Indonesia, berbagai persoalan lingkungan menunjukkan keterhubungan yang erat antara eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial. Deforestasi yang terus berlangsung, ekspansi industri ekstraktif, konflik agraria, pencemaran sungai, hingga kebakaran hutan dan lahan telah menghadirkan tekanan besar terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam banyak situasi, pembangunan yang diklaim sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan kerusakan lingkungan dan meminggirkan kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada alam sebagai sumber kehidupan.

Konflik agraria, misalnya, memperlihatkan bagaimana perebutan sumber daya alam sering kali melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Ketika lahan masyarakat dialihkan untuk kepentingan industri, perkebunan skala besar, atau pertambangan, masyarakat lokal kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu relasi sosial, budaya, dan keberlanjutan kehidupan komunitas.

Dalam situasi tersebut, perempuan sering kali menjadi kelompok yang menghadapi beban berlapis. Ketika sumber air

semakin jauh, perempuan harus menempuh jarak lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika hasil pertanian menurun akibat perubahan iklim, perempuan harus mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan ekonomi. Ketika bencana ekologis terjadi, perempuan tidak hanya menghadapi ancaman kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan memiliki dimensi gender yang sangat kuat. Relasi sosial yang menempatkan perempuan dekat dengan kerja-kerja domestik dan tanggung jawab perawatan membuat perempuan lebih rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama, perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pengambilan keputusan, kepemilikan sumber daya, maupun perlindungan sosial. Akibatnya, ketika krisis ekologis terjadi, perempuan menghadapi risiko yang lebih besar meskipun suara dan pengalaman mereka kerap diabaikan dalam proses penyusunan kebijakan.

Meski demikian, perempuan bukan hanya pihak yang mengalami kerentanan. Dalam banyak komunitas, perempuan justru menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan ruang hidup masyarakat. Perempuan adat yang mempertahankan hutan dari ekspansi industri, perempuan petani yang menjaga benih lokal, hingga gerakan perempuan yang menolak perusakan lingkungan menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam perjuangan ekologis.

Peran perempuan dalam menjaga lingkungan pada dasarnya lahir dari kedekatan mereka dengan praktik kehidupan sehari-hari. Perempuan sering kali terlibat langsung dalam pengelolaan air, pangan, kesehatan keluarga, hingga pemanfaatan sumber daya alam di tingkat komunitas. Pengalaman tersebut membuat perempuan memiliki pengetahuan ekologis yang penting mengenai keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan hidup

masyarakat. Sayangnya, pengetahuan dan pengalaman tersebut kerap dipinggirkan dalam model pembangunan modern yang lebih menekankan pendekatan teknokratis dan kepentingan ekonomi.

Dalam konteks inilah perspektif Ekofeminisme menjadi relevan untuk digunakan dalam membaca krisis lingkungan kontemporer. Ekofeminisme melihat bahwa kerusakan alam dan subordinasi terhadap perempuan bukanlah dua persoalan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki akar yang sama dalam sistem dominasi yang eksploitatif. Alam diposisikan sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi keuntungan ekonomi, sementara perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat di bawah struktur patriarki yang membatasi ruang dan peran mereka.

Ekofeminisme mengkritik cara pandang modern yang memisahkan manusia dari alam dan menempatkan alam sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Perspektif ini juga menolak logika pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Dalam pandangan ekofeminis, krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi atau kebijakan ekonomi semata, tetapi membutuhkan perubahan cara pandang terhadap relasi manusia, alam, dan kehidupan.

Lebih jauh, ekofeminisme menawarkan perspektif bahwa keberlanjutan kehidupan harus dibangun melalui relasi yang lebih setara, peduli, dan tidak eksploitatif. Nilai-nilai seperti kepedulian, keberlanjutan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif menjadi penting dalam membangun masa depan yang lebih adil secara ekologis maupun sosial. Dengan demikian, perjuangan membela lingkungan pada dasarnya juga merupakan perjuangan membela kehidupan.

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa bumi tidak sedang menghadapi ancaman yang bersifat parsial, melainkan krisis multidimensi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Kerusakan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan, konflik sumber daya, dan perubahan iklim saling

berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, upaya menghadapi krisis ekologis membutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penyelamatan lingkungan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlangsungan hidup kelompok-kelompok yang paling rentan.

Pertanyaan mengenai lingkungan bukan hanya tentang bagaimana menjaga alam tetap lestari, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan kehidupan yang adil dan manusiawi di tengah dunia yang semakin rentan terhadap krisis ekologis. Sebab ketika lingkungan terus mengalami kerusakan, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan hutan, sungai, atau lahan pertanian, tetapi juga keberlanjutan hidup manusia secara keseluruhan.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENDAHULUAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
MEMAHAMI EKOFEMINISME	1
A. SEJARAH LAHIRNYA EKOFEMINISME	1
B. HUBUNGAN PEREMPUAN DAN ALAM DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS.....	5
C. KRITIK TERHADAP PATRIARKI DAN KAPITALISME.....	9
D. EKOFEMINISME SEBAGAI GERAKAN SOSIAL	13
E. RAGAM ALIRAN EKOFEMINISME	16
1) <i>Ekofeminisme Kultural</i>	17
2) <i>Ekofeminisme Sosial</i>	17
3) <i>Ekofeminisme Spiritual</i>	18
4) <i>Ekofeminisme Materialis</i>	19
BAB II.....	21
POLITIK KEHIDUPAN DAN KRISIS EKOLOGI.....	21
A. KRISIS LINGKUNGAN SEBAGAI KRISIS KEHIDUPAN.....	21
B. EKSPLOITASI ALAM DAN LOGIKA PEMBANGUNAN.....	25
C. KAPITALISME EKSTRAKTIF DAN KERUSAKAN EKOLOGI.....	29
D. TUBUH, ALAM, DAN KEKUASAAN	32
E. POLITIK KEHIDUPAN DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINIS.....	36
BAB III.....	39
PEREMPUAN DI TENGAH KRISIS LINGKUNGAN	39
A. BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KRISIS EKOLOGI	39
B. KEMISKINAN EKOLOGIS DAN KETIMPANGAN GENDER	43
C. PEREMPUAN, AIR, PANGAN, DAN RUANG HIDUP	47
D. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN.....	50
E. KEKERASAN EKOLOGIS DAN KERENTANAN SOSIAL	54
BAB IV.....	59
TUBUH PEREMPUAN DAN POLITIK EKSPLOITASI	59
A. TUBUH PEREMPUAN SEBAGAI ARENA KEKUASAAN	59
B. PATRIARKI DAN KONTROL ATAS TUBUH.....	62
C. RELASI ANTARA EKSPLOITASI ALAM DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN.....	66
D. KONSUMERISME, INDUSTRI, DAN PEREMPUAN.....	69

E. POLITIK PERAWATAN (<i>POLITICS OF CARE</i>)	72
BAB V	77
PEREMPUAN, ALAM, DAN KEARIFAN LOKAL	77
A. PEREMPUAN ADAT SEBAGAI PENJAGA EKOLOGI	77
B. PENGETAHUAN LOKAL DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	81
C. SPIRITUALITAS ALAM DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN	84
D. PRAKTIK MERAWAT ALAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	87
E. ANCAMAN MODERNISASI TERHADAP RUANG HIDUP KOMUNITAS.....	91
BAB VI.....	95
GERAKAN PEREMPUAN DAN ADVOKASI LINGKUNGAN.....	95
A. SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN LINGKUNGAN.....	95
B. AKTIVISME EKOFEMINIS DI BERBAGAI NEGARA	99
C. MEDIA, EDUKASI, DAN KAMPANYE LINGKUNGAN	106
D. SOLIDARITAS DAN POLITIK PERLAWANAN.....	110
BAB VII.....	115
EKOFEMINISME DI INDONESIA.....	115
A. KRISIS EKOLOGI DI INDONESIA	115
B. PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN	118
C. GERAKAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT.....	122
D. STUDI KASUS: MEMBACA KONFLIK EKOLOGIS INDONESIA DARI PERSPEKTIF EKOFEMINIS	124
E. MASA DEPAN GERAKAN EKOFEMINISME DI INDONESIA	127
BAB VIII.....	135
MEMBANGUN MASA DEPAN BERKEADILAN EKOLOGIS	135
A. ETIKA KEPEDULIAN TERHADAP ALAM.....	135
B. PENDIDIKAN LINGKUNGAN BERPERSPEKTIF GENDER	138
C. EKONOMI BERKELANJUTAN DAN KEHIDUPAN KOMUNAL	140
D. PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN	144
E. HARAPAN EKOFEMINISME BAGI MASA DEPAN BUMI	147
DAFTAR PUSTAKA	151
PROFIL PENULIS.....	153



BAB I

MEMAHAMI EKOFEMINISME

A. Sejarah Lahirnya Ekofeminisme

Kemunculan ekofeminisme tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran global terhadap dua persoalan besar yang berkembang secara bersamaan pada abad ke-20, yaitu krisis lingkungan dan ketidakadilan gender. Kerusakan ekologis yang semakin masif akibat industrialisasi modern memperlihatkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menghadirkan dampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan. Pada saat yang sama, gerakan feminisme berkembang sebagai respons terhadap berbagai bentuk subordinasi dan ketimpangan yang dialami perempuan dalam struktur sosial patriarkal. Dari titik pertemuan inilah ekofeminisme lahir sebagai perspektif yang melihat adanya keterhubungan antara eksploitasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan.

Istilah “ekofeminisme” pertama kali diperkenalkan oleh Françoise d'Eaubonne melalui bukunya *Le Féminisme ou la Mort* pada tahun 1974. Dalam gagasannya, d'Eaubonne menyoroti bagaimana sistem patriarki tidak

hanya menindas perempuan, tetapi juga mendorong eksploitasi alam secara destruktif. Ia melihat bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan berjalan beriringan dengan dominasi manusia terhadap alam. Karena itu, menurutnya, perjuangan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menyelamatkan lingkungan.

Kemunculan gagasan tersebut berlangsung dalam konteks dunia yang sedang mengalami perubahan besar. Revolusi industri dan perkembangan teknologi modern telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam dalam skala luas. Hutan dibuka untuk kepentingan industri, pencemaran meningkat, penggunaan bahan bakar fosil semakin masif, dan model pembangunan modern semakin bergantung pada logika produksi tanpa batas. Di sisi lain, gerakan feminisme gelombang kedua mulai berkembang dengan fokus pada persoalan tubuh, reproduksi, kerja domestik, dan ketimpangan sosial yang dialami perempuan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ekofeminisme tumbuh sebagai kritik terhadap cara pandang modern yang bersifat antroposentris, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan dan menganggap alam hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Perspektif ini juga mengkritik dualisme dalam tradisi pemikiran Barat yang memisahkan secara tegas antara manusia dan alam, laki-laki dan perempuan, rasionalitas dan emosi, budaya dan alam. Dalam struktur dualistik tersebut, pihak yang diasosiasikan dengan laki-laki, rasionalitas, dan budaya ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perempuan dan alam yang dianggap emosional, pasif, serta dapat dikendalikan.

Ekofeminisme berkembang semakin luas pada dekade 1970-an dan 1980-an, terutama seiring meningkatnya gerakan lingkungan hidup di berbagai negara. Berbagai bencana ekologis dan meningkatnya

kesadaran terhadap perubahan iklim membuat isu lingkungan menjadi perhatian global. Pada saat yang sama, banyak perempuan terlibat langsung dalam gerakan lingkungan karena mereka merasakan dampak kerusakan ekologis secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu gerakan yang sering dikaitkan dengan perkembangan ekofeminisme adalah gerakan Chipko di India pada tahun 1970-an. Gerakan ini dipelopori oleh masyarakat lokal, terutama perempuan desa, untuk menolak penebangan hutan yang mengancam sumber kehidupan mereka. Para perempuan memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan oleh perusahaan. Peristiwa tersebut menjadi simbol penting bagaimana perempuan hadir sebagai aktor utama dalam perjuangan mempertahankan lingkungan dan ruang hidup.

Tokoh seperti Vandana Shiva kemudian memperkuat perspektif ekofeminisme melalui kritik terhadap pembangunan modern dan kapitalisme global yang dianggap merusak keberlanjutan ekologis sekaligus meminggirkan perempuan, terutama di negara-negara berkembang. Shiva menyoroti bagaimana modernisasi pertanian, revolusi hijau, dan industrialisasi pangan telah menghancurkan pengetahuan lokal serta memperbesar ketimpangan terhadap perempuan petani.

Selain Vandana Shiva, pemikir seperti Karen J. Warren juga memiliki pengaruh besar dalam pengembangan teori ekofeminisme. Warren menjelaskan bahwa terdapat hubungan konseptual antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam melalui struktur berpikir patriarkal yang hierarkis. Menurutnya, selama sistem berpikir yang menempatkan dominasi sebagai dasar relasi sosial masih dipertahankan, maka eksploitasi terhadap perempuan dan alam akan terus berlangsung.

Dalam perkembangannya, ekofeminisme tidak tumbuh sebagai satu perspektif tunggal. Berbagai pemikir dan aktivis menghadirkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Ada yang menekankan hubungan spiritual antara perempuan dan alam, ada yang lebih fokus pada kritik terhadap kapitalisme dan pembangunan, serta ada pula yang melihat ekofeminisme sebagai gerakan politik untuk membangun keadilan ekologis dan sosial secara bersamaan.

Meski memiliki ragam pendekatan, ekofeminisme pada dasarnya memiliki titik temu dalam melihat bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang menindas. Kerusakan alam bukan hanya persoalan teknis atau akibat kesalahan pengelolaan lingkungan semata, tetapi juga berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan budaya yang mendorong eksploitasi tanpa batas. Dalam sistem tersebut, perempuan dan alam sering kali ditempatkan sebagai objek yang dapat dikontrol demi kepentingan produksi dan akumulasi keuntungan.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, relevansi ekofeminisme semakin terlihat ketika berbagai proyek pembangunan menghadirkan dampak ekologis yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Ekspansi pertambangan, perkebunan skala besar, deforestasi, dan konflik agraria menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam sering kali berjalan beriringan dengan marginalisasi masyarakat lokal, terutama perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan harus menghadapi beban tambahan akibat hilangnya akses terhadap air, pangan, tanah, dan lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah netral secara sosial. Dampak

kerusakan ekologis sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, serta posisi sosial dalam masyarakat. Karena itu, ekofeminisme hadir bukan hanya sebagai kritik terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya membangun perspektif yang lebih adil dalam melihat hubungan manusia dengan alam dan sesama manusia.

Lebih jauh, ekofeminisme menawarkan cara pandang alternatif yang menempatkan keberlanjutan kehidupan sebagai nilai utama. Jika model pembangunan modern bertumpu pada eksploitasi dan kompetisi, maka ekofeminisme justru menekankan pentingnya relasi yang berbasis kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga tindakan etis dan politik untuk mempertahankan keberlanjutan hidup bersama.

Sejarah lahirnya ekofeminisme menunjukkan bahwa perspektif ini muncul dari kesadaran bahwa krisis lingkungan dan ketidakadilan gender memiliki keterhubungan yang sangat erat. Ekofeminisme lahir sebagai kritik terhadap sistem dominasi yang menempatkan alam dan perempuan sebagai objek eksploitasi. Namun lebih dari itu, ekofeminisme juga berkembang sebagai harapan untuk membangun cara hidup yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi di tengah dunia yang semakin rentan terhadap krisis ekologis.

B. Hubungan Perempuan dan Alam dalam Perspektif Filosofis

Hubungan antara perempuan dan alam merupakan salah satu gagasan sentral dalam pemikiran ekofeminisme. Perspektif ini lahir dari kesadaran bahwa dalam banyak tradisi sosial dan filosofis, perempuan dan alam sering ditempatkan dalam posisi yang serupa: dianggap dekat

dengan tubuh, emosi, reproduksi, dan kehidupan domestik, sementara laki-laki diasosiasikan dengan rasionalitas, budaya, pengetahuan, dan kekuasaan. Pembagian tersebut tidak hanya membentuk cara pandang terhadap perempuan dan alam, tetapi juga melahirkan struktur dominasi yang menempatkan keduanya sebagai objek yang dapat dikendalikan.

Dalam sejarah filsafat Barat, relasi manusia dan alam banyak dipengaruhi oleh cara berpikir dualistik. Tradisi dualisme membagi realitas ke dalam dua kutub yang diposisikan secara hierarkis, seperti rasional-emosional, budaya-alam, laki-laki-perempuan, subjek-objek, dan manusia-alam. Dalam pembagian tersebut, unsur yang diasosiasikan dengan rasionalitas, budaya, dan laki-laki ditempatkan lebih tinggi dibandingkan unsur yang dikaitkan dengan alam, tubuh, dan perempuan.

Cara berpikir seperti ini berkembang kuat sejak era filsafat modern. Pemikiran René Descartes misalnya, memandang alam sebagai sesuatu yang mekanistik dan dapat dikendalikan melalui rasio manusia. Alam diperlakukan layaknya mesin yang dapat dipelajari, diukur, dan dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Perspektif tersebut kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan revolusi industri yang menempatkan eksploitasi alam sebagai bagian dari kemajuan peradaban.

Dalam struktur pemikiran tersebut, perempuan sering kali diasosiasikan dengan alam karena dianggap lebih dekat dengan fungsi biologis dan reproduksi. Tubuh perempuan dipandang berkaitan dengan siklus alam, kesuburan, kehamilan, melahirkan, dan aktivitas perawatan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang emosional, irasional, dan

domestik, sementara laki-laki ditempatkan sebagai representasi rasionalitas dan penguasaan terhadap alam.

Ekofeminisme mengkritik cara pandang filosofis tersebut karena dianggap menjadi dasar legitimasi bagi dominasi terhadap perempuan maupun alam. Ketika alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi, dan perempuan dipandang sebagai pihak yang lebih rendah secara sosial, maka keduanya sama-sama berada dalam posisi rentan terhadap penindasan. Perspektif ini menunjukkan bahwa eksploitasi ekologis tidak dapat dipisahkan dari struktur budaya dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat.

Namun demikian, hubungan perempuan dan alam dalam ekofeminisme bukan berarti perempuan “secara alami” lebih dekat dengan alam dibandingkan laki-laki. Gagasan ini sering kali disalahpahami sebagai bentuk romantisasi terhadap perempuan. Padahal, banyak pemikir ekofeminis justru menolak pandangan esensialis yang menganggap perempuan memiliki sifat biologis tertentu yang membuat mereka otomatis lebih peduli terhadap lingkungan.

Sebaliknya, ekofeminisme melihat kedekatan perempuan dengan alam lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sosial dan relasi kehidupan sehari-hari. Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kebutuhan hidup keluarga, seperti air, pangan, kesehatan, dan pengasuhan. Pengalaman tersebut membuat perempuan berinteraksi langsung dengan kondisi lingkungan dan merasakan dampak kerusakan ekologis secara lebih nyata.

Karena itu, ketika lingkungan mengalami kerusakan, perempuan sering kali menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Kekeringan, pencemaran air, gagal panen, hingga bencana ekologis menghadirkan beban

tambahan terhadap kehidupan perempuan, terutama di komunitas miskin dan pedesaan. Situasi tersebut kemudian membentuk kesadaran ekologis yang kuat dalam banyak gerakan perempuan lingkungan.

Di sisi lain, hubungan perempuan dan alam juga dapat dipahami melalui konsep politik perawatan (*politics of care*). Perspektif ini menekankan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya bergantung pada praktik merawat, menjaga, dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti merawat keluarga, menjaga pangan, menyediakan air, dan memelihara lingkungan merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup, tetapi sering kali tidak dihargai dalam sistem ekonomi modern karena dianggap tidak produktif secara kapitalistik.

Ekofeminisme kemudian mengangkat praktik perawatan tersebut sebagai nilai penting dalam membangun relasi yang lebih berkelanjutan dengan alam. Jika logika pembangunan modern bertumpu pada eksploitasi dan akumulasi keuntungan, maka politik perawatan menempatkan keberlanjutan hidup sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tindakan etis yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Hubungan filosofis antara perempuan dan alam juga terlihat dalam berbagai tradisi lokal dan masyarakat adat. Dalam banyak budaya tradisional, alam tidak dipandang sebagai objek mati yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Perempuan dalam komunitas adat sering kali memiliki pengetahuan ekologis yang penting mengenai pengelolaan tanah, benih, obat-obatan tradisional, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Sayangnya, modernisasi dan industrialisasi sering kali mengabaikan pengetahuan lokal tersebut. Model pembangunan yang berbasis eksploitasi sumber daya alam justru meminggirkan praktik-praktik kehidupan yang lebih berkelanjutan. Akibatnya, bukan hanya lingkungan yang mengalami kerusakan, tetapi juga pengetahuan dan relasi sosial yang selama ini menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan perempuan dan alam dalam perspektif filosofis ekofeminisme bukan sekadar hubungan simbolik, tetapi berkaitan dengan cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Ekofeminisme mengajak manusia untuk melihat bahwa alam bukan objek yang berdiri terpisah dari manusia, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung. Dalam relasi tersebut, keberlanjutan hidup hanya dapat terjaga ketika manusia membangun hubungan yang lebih setara, peduli, dan tidak eksploitatif terhadap sesama maupun terhadap alam.

C. Kritik terhadap Patriarki dan Kapitalisme

Salah satu fondasi utama dalam pemikiran Ekofeminisme adalah kritik terhadap sistem patriarki dan kapitalisme yang dianggap memiliki peran besar dalam menciptakan eksploitasi terhadap perempuan maupun alam. Ekofeminisme memandang bahwa krisis lingkungan tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dibangun di atas logika dominasi. Dalam struktur tersebut, alam diposisikan sebagai objek eksploitasi, sementara perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat yang mengalami marginalisasi dan ketidakadilan.

Patriarki dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam relasi

keluarga atau sosial semata, tetapi sebagai sistem nilai dan kekuasaan yang menempatkan kontrol, dominasi, dan hierarki sebagai dasar hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan alam. Sistem patriarki membentuk cara pandang bahwa pihak yang dianggap kuat, rasional, dan berkuasa memiliki legitimasi untuk mengendalikan pihak yang diposisikan lebih lemah.

Dalam struktur berpikir patriarkal, alam sering kali diasosiasikan dengan sesuatu yang liar, pasif, dan harus ditaklukkan demi kepentingan manusia. Cara pandang ini berkembang kuat dalam modernitas, terutama sejak revolusi industri ketika eksploitasi sumber daya alam menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi. Alam diperlakukan sebagai komoditas yang nilainya ditentukan berdasarkan manfaat ekonomi, bukan berdasarkan keberlanjutan kehidupan ekologis.

Pada saat yang sama, perempuan juga mengalami subordinasi melalui konstruksi sosial yang membatasi peran mereka dalam ruang domestik dan menempatkan kerja-kerja perawatan sebagai aktivitas yang tidak memiliki nilai ekonomi. Aktivitas seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, menjaga pangan keluarga, atau mengelola kebutuhan air sehari-hari sering dianggap sebagai "kewajiban alami" perempuan, sehingga tidak diakui sebagai bentuk kerja produktif dalam sistem ekonomi modern.

Ekofeminisme melihat bahwa cara pandang tersebut menciptakan keterhubungan antara eksploitasi terhadap alam dan eksploitasi terhadap perempuan. Alam dan perempuan sama-sama ditempatkan sebagai penyedia kehidupan, tetapi pada saat yang sama juga menjadi objek yang dieksploitasi demi mempertahankan sistem produksi dan akumulasi keuntungan. Dalam logika patriarki dan kapitalisme, keberhasilan pembangunan sering kali diukur

melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan akumulasi modal, sementara kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial dianggap sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi.

Kapitalisme modern memperkuat eksploitasi tersebut melalui sistem ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa batas. Dalam sistem kapitalistik, sumber daya alam dipandang sebagai bahan baku produksi yang harus terus diekstraksi demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan keuntungan pasar. Hutan ditebang untuk industri, tanah dialihkan untuk perkebunan skala besar, sungai dijadikan tempat pembuangan limbah, dan laut dieksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Logika kapitalisme juga menciptakan pola konsumsi yang semakin tinggi dan tidak berkelanjutan. Alam dipaksa memenuhi kebutuhan produksi massal dan gaya hidup konsumtif yang terus berkembang. Akibatnya, krisis lingkungan menjadi semakin kompleks karena sistem ekonomi modern mendorong eksploitasi yang melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri.

Dampak dari sistem tersebut tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika kerusakan lingkungan terjadi. Dalam banyak situasi, perempuan mengalami kerentanan yang lebih besar karena mereka memiliki keterhubungan langsung dengan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Ketika air bersih sulit diperoleh, ketika hasil panen menurun, atau ketika harga pangan meningkat akibat perubahan iklim, perempuan menjadi pihak yang harus menghadapi beban tambahan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga.

Ekofeminisme juga mengkritik pembangunan modern yang sering kali mengatasnamakan kemajuan

tetapi mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal. Proyek pertambangan, pembangunan industri, reklamasi, dan ekspansi perkebunan skala besar kerap menyebabkan konflik agraria, perusakan lingkungan, dan hilangnya sumber kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan kehilangan akses terhadap tanah, air, dan sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Tokoh seperti Vandana Shiva menjelaskan bahwa kapitalisme global tidak hanya menghancurkan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menghancurkan pengetahuan lokal dan sistem kehidupan masyarakat tradisional. Modernisasi pertanian melalui revolusi hijau, misalnya, dianggap memperbesar ketergantungan petani terhadap industri benih dan bahan kimia, sekaligus meminggirkan perempuan yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman pangan dan benih lokal.

Kritik ekofeminisme terhadap patriarki dan kapitalisme pada akhirnya bukan sekadar penolakan terhadap sistem ekonomi atau struktur sosial tertentu, tetapi merupakan kritik terhadap cara pandang yang menempatkan dominasi sebagai dasar relasi kehidupan. Selama relasi manusia dibangun di atas logika penguasaan dan eksploitasi, maka kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial akan terus berlangsung.

Karena itu, ekofeminisme menawarkan cara pandang alternatif yang menempatkan keberlanjutan, kepedulian, solidaritas, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga keberlangsungan ekologis dan martabat manusia secara bersamaan.

Secara sederhana, kritik terhadap patriarki dan kapitalisme menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang bekerja dalam masyarakat. Kerusakan alam bukan hanya akibat kesalahan teknis dalam pengelolaan lingkungan, tetapi merupakan refleksi dari sistem yang mengutamakan keuntungan di atas keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, upaya membangun keadilan ekologis juga membutuhkan perubahan terhadap cara manusia memahami kekuasaan, pembangunan, dan relasi dengan alam.

D. Ekofeminisme sebagai Gerakan Sosial

Selain berkembang sebagai perspektif teoritis dan kritik filosofis, ekofeminisme juga tumbuh sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan ekologis dan keadilan gender secara bersamaan. Gerakan ini lahir dari kesadaran bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kehidupan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap kerusakan ekologis. Dalam konteks tersebut, perempuan tidak hanya dipandang sebagai korban dari krisis lingkungan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mempertahankan ruang hidup dan keberlanjutan kehidupan.

Gerakan ekofeminisme berkembang di berbagai negara dengan bentuk perjuangan yang beragam. Ada yang muncul melalui perlawanan terhadap perusakan hutan, penolakan terhadap pertambangan, perjuangan mempertahankan sumber air, hingga gerakan pangan lokal dan pertanian berkelanjutan. Meski memiliki konteks yang berbeda-beda, gerakan-gerakan tersebut memiliki kesamaan dalam melihat bahwa lingkungan bukan sekadar

sumber ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.

Salah satu contoh penting dalam sejarah gerakan ekofeminis adalah gerakan Chipko di India pada tahun 1970-an. Gerakan ini dipelopori oleh masyarakat desa, terutama perempuan, yang menolak penebangan hutan oleh perusahaan. Para perempuan memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan karena mereka menyadari bahwa hutan bukan hanya kumpulan kayu yang memiliki nilai ekonomi, tetapi sumber air, pangan, dan keberlangsungan hidup komunitas mereka.

Gerakan tersebut menunjukkan bahwa perempuan sering memiliki keterhubungan langsung dengan lingkungan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Ketika hutan rusak, sumber air mengering, atau tanah kehilangan kesuburan, perempuan menjadi pihak yang pertama kali merasakan dampaknya. Pengalaman tersebut kemudian melahirkan kesadaran ekologis yang kuat dan mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bentuk perjuangan lingkungan.

Di banyak negara berkembang, perempuan berada di garis depan dalam mempertahankan ruang hidup masyarakat dari eksploitasi sumber daya alam. Mereka terlibat dalam penolakan terhadap tambang, pembukaan hutan, pencemaran lingkungan, dan proyek pembangunan yang dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan komunitas lokal. Dalam situasi tersebut, perjuangan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga perjuangan mempertahankan identitas sosial, budaya, dan hak hidup masyarakat.

Di Indonesia, gerakan perempuan lingkungan juga berkembang dalam berbagai bentuk. Perempuan Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan karst menjadi salah satu contoh bagaimana

perempuan hadir sebagai aktor penting dalam perjuangan ekologis. Mereka memandang pegunungan dan sumber air sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi mendatang. Dalam perjuangan tersebut, perempuan tidak hanya melawan kerusakan lingkungan, tetapi juga mempertahankan hak atas ruang hidup dan keberlanjutan komunitas mereka.

Gerakan ekofeminisme juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki pengetahuan ekologis yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam banyak komunitas lokal dan masyarakat adat, perempuan berperan dalam menjaga benih, mengelola pangan, memanfaatkan tanaman obat, dan mempertahankan praktik-praktik hidup yang lebih selaras dengan alam. Pengetahuan tersebut sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Namun demikian, gerakan ekofeminisme tidak selalu berjalan mudah. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam perjuangan lingkungan justru menghadapi berbagai bentuk tekanan dan marginalisasi. Mereka sering dianggap menghambat pembangunan, mengalami intimidasi, bahkan tidak jarang menghadapi kekerasan ketika mempertahankan lingkungan dan tanah mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa perjuangan ekologis juga merupakan perjuangan politik yang berkaitan dengan relasi kuasa dan kepentingan ekonomi.

Ekofeminisme sebagai gerakan sosial pada akhirnya tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keberlanjutan kehidupan membutuhkan relasi yang lebih adil antara manusia, alam, dan sistem sosial. Gerakan ini menolak model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi tanpa batas dan menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada

keberlanjutan, solidaritas, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama.

Lebih jauh, gerakan ekofeminis juga menghadirkan kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan dimensi sosial dan ekologis. Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui angka pertumbuhan dan investasi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

Ekofeminisme sebagai gerakan sosial memperlihatkan bahwa perjuangan lingkungan bukan hanya persoalan menjaga alam tetap lestari, tetapi juga perjuangan mempertahankan kehidupan yang adil dan manusiawi. Ketika perempuan bergerak mempertahankan hutan, tanah, air, dan ruang hidup komunitas, mereka sesungguhnya sedang memperjuangkan masa depan kehidupan bersama di tengah ancaman krisis ekologis yang semakin besar.

E. Ragam Aliran Ekofeminisme

Dalam perkembangannya, Ekofeminisme tidak tumbuh sebagai satu perspektif tunggal. Berbagai pemikir dan aktivis menghadirkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, politik, dan filosofis masing-masing. Perbedaan tersebut melahirkan berbagai aliran dalam ekofeminisme yang memiliki fokus kajian dan strategi perjuangan yang beragam. Meski demikian, seluruh aliran ekofeminisme pada dasarnya memiliki kesamaan dalam melihat keterhubungan antara kerusakan lingkungan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

1) Ekofeminisme Kultural

Ekofeminisme kultural menekankan adanya kedekatan antara perempuan dan alam yang dianggap lahir dari pengalaman biologis maupun pengalaman hidup perempuan. Perspektif ini melihat bahwa perempuan memiliki nilai-nilai seperti kepedulian, empati, kemampuan merawat, dan menjaga kehidupan yang lebih dekat dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Dalam pandangan ini, perempuan dianggap memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan alam dibandingkan laki-laki karena pengalaman reproduksi, melahirkan, mengasuh, dan merawat kehidupan membuat perempuan lebih memahami pentingnya keberlanjutan hidup. Karena itu, ekofeminisme kultural sering menempatkan perempuan sebagai simbol perlindungan terhadap alam dan kehidupan.

Aliran ini juga banyak dipengaruhi oleh tradisi spiritual dan budaya yang memandang bumi sebagai “ibu” atau sumber kehidupan. Alam tidak diposisikan sebagai objek mati, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan harus dihormati. Namun demikian, ekofeminisme kultural juga mendapat kritik karena dianggap terlalu romantis dan berpotensi memperkuat stereotip bahwa perempuan “secara alami” harus dekat dengan kerja-kerja perawatan dan domestik. Kritik ini muncul karena tidak semua pengalaman perempuan bersifat universal, dan kedekatan perempuan dengan alam sering kali lebih dibentuk oleh konstruksi sosial dibandingkan faktor biologis semata.

2) Ekofeminisme Sosial

Ekofeminisme sosial berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan yang terlalu menekankan

hubungan biologis atau spiritual antara perempuan dan alam. Perspektif ini lebih fokus pada struktur sosial dan politik yang menyebabkan perempuan maupun alam mengalami penindasan. Ekofeminisme sosial melihat bahwa akar persoalan ekologis terletak pada sistem patriarki, kapitalisme, dan relasi kekuasaan yang eksploitatif. Karena itu, perjuangan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui perubahan kesadaran individual, tetapi juga membutuhkan perubahan struktur sosial dan ekonomi yang melahirkan ketimpangan.

Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan dipahami sebagai bagian dari sistem dominasi yang lebih luas. Alam dieksploitasi demi keuntungan ekonomi, sementara perempuan dan kelompok rentan sering menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, perjuangan ekologis harus berjalan beriringan dengan perjuangan keadilan sosial dan transformasi politik. Ekofeminisme sosial banyak berkembang dalam gerakan akar rumput yang memperjuangkan hak atas tanah, air, pangan, dan ruang hidup masyarakat. Perspektif ini menekankan solidaritas kolektif dan keterlibatan komunitas dalam membangun keberlanjutan ekologis.

3) Ekofeminisme Spiritual

Ekofeminisme spiritual menekankan hubungan sakral antara manusia dan alam. Perspektif ini lahir dari kritik terhadap modernitas yang dianggap terlalu menekankan rasionalitas dan memisahkan manusia dari dimensi spiritual kehidupan. Dalam pandangan ekofeminisme spiritual, alam dipahami sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang memiliki nilai suci dan harus dihormati. Kerusakan lingkungan dipandang bukan hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga krisis

spiritual akibat hilangnya rasa hormat manusia terhadap alam.

Aliran ini banyak terinspirasi dari tradisi lokal, spiritualitas perempuan, dan keyakinan masyarakat adat yang melihat manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa atas alam. Karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan harus dibangun melalui rasa hormat, keseimbangan, dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Ekofeminisme spiritual juga menekankan pentingnya membangun kesadaran baru mengenai relasi manusia dengan bumi. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual dan etika kehidupan. Meski demikian, aliran ini juga sering mendapat kritik karena dianggap terlalu simbolik dan kurang memberikan solusi struktural terhadap persoalan ekonomi dan politik yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.

4) Ekofeminisme Materialis

Ekofeminisme materialis berfokus pada analisis ekonomi-politik terhadap relasi antara perempuan, alam, dan kapitalisme. Perspektif ini melihat bahwa eksploitasi terhadap perempuan dan lingkungan berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik yang bertumpu pada akumulasi keuntungan dan eksploitasi tenaga kerja maupun sumber daya alam. Aliran ini menyoroti bagaimana kerja-kerja perempuan, terutama kerja domestik dan perawatan, sering kali tidak diakui dalam sistem ekonomi modern meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Pada saat yang sama, alam juga diperlakukan sebagai sumber daya gratis yang terus dieksploitasi demi kepentingan produksi.

Ekofeminisme materialis melihat bahwa perempuan dan alam sama-sama menjadi “fondasi tersembunyi” bagi keberlangsungan kapitalisme. Sistem ekonomi modern bergantung pada kerja reproduktif perempuan dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi keduanya sering tidak dihargai secara adil. Karena itu, aliran ini menekankan pentingnya perubahan sistem ekonomi dan politik secara struktural. Keberlanjutan lingkungan tidak dapat tercapai selama pembangunan masih bertumpu pada eksploitasi tanpa batas terhadap manusia dan alam. Dalam konteks ini, ekofeminisme materialis banyak digunakan untuk membaca persoalan seperti konflik agraria, industri ekstraktif, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, hingga kemiskinan ekologis yang dialami masyarakat rentan.

Pada akhirnya, berbagai aliran ekofeminisme menunjukkan bahwa perspektif ini memiliki kekayaan pendekatan dalam membaca keterhubungan antara perempuan dan lingkungan. Perbedaan tersebut tidak menjadikan ekofeminisme terpecah, melainkan memperlihatkan bahwa persoalan ekologis dan ketidakadilan gender memang sangat kompleks dan membutuhkan cara pandang yang beragam. Meski memiliki titik tekan yang berbeda, seluruh aliran ekofeminisme tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun relasi kehidupan yang lebih adil, berkelanjutan, dan tidak eksploitatif terhadap manusia maupun alam.[]



BAB II

POLITIK KEHIDUPAN DAN KRISIS EKOLOGI

A. Krisis Lingkungan sebagai Krisis Kehidupan

Krisis lingkungan pada hari ini tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kerusakan alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, deforestasi, krisis air, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya frekuensi bencana ekologis menunjukkan bahwa persoalan lingkungan telah berkembang menjadi krisis kehidupan yang memengaruhi hampir seluruh aspek keberlangsungan hidup manusia. Kerusakan ekologis tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menjalar ke sektor ekonomi, kesehatan, pangan, relasi sosial, bahkan stabilitas politik dalam masyarakat.

Selama ini, pembahasan mengenai lingkungan sering diposisikan sebagai isu teknis yang berkaitan dengan konservasi alam, pengelolaan sumber daya, atau persoalan pembangunan berkelanjutan. Padahal, di balik kerusakan lingkungan terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar,

yaitu terganggunya sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketika hutan kehilangan fungsi ekologisnya, ketika air bersih semakin sulit diperoleh, atau ketika tanah kehilangan kesuburan akibat eksploitasi yang berlebihan, maka yang terancam bukan hanya keberadaan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung padanya.

Perubahan iklim menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana krisis ekologis berkembang menjadi krisis kehidupan. Peningkatan suhu global memicu berbagai perubahan dalam sistem iklim dunia, mulai dari kekeringan ekstrem, banjir besar, badai tropis, gagal panen, hingga krisis pangan. Dalam konteks tersebut, dampak perubahan iklim tidak hanya berbicara mengenai perubahan cuaca, tetapi juga menyangkut meningkatnya ketidakpastian hidup masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan akses ekonomi dan sosial.

Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masyarakat yang bergantung langsung pada alam menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi krisis ekologis. Petani mengalami ketidakpastian musim tanam akibat perubahan pola cuaca, nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan karena kerusakan ekosistem laut, sementara masyarakat pedesaan harus berhadapan dengan krisis air akibat berkurangnya sumber mata air dan rusaknya kawasan hutan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan bukan sekadar ruang geografis tempat manusia hidup, tetapi fondasi utama yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Krisis lingkungan juga memperlihatkan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya saling terhubung dengan sistem ekologis. Ketika alam mengalami kerusakan, dampaknya tidak berhenti pada satu sektor tertentu, melainkan menjalar secara luas dan memengaruhi berbagai

dimensi kehidupan. Kerusakan hutan, misalnya, tidak hanya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga menurunnya kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks perkotaan, krisis lingkungan menghadirkan persoalan yang tidak kalah serius. Pencemaran udara, berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya limbah, dan buruknya tata kelola lingkungan menyebabkan kualitas hidup masyarakat semakin menurun. Urbanisasi yang tidak terkendali juga memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan memperlihatkan bagaimana model pembangunan modern sering kali mengabaikan daya dukung ekologis.

Lebih jauh, krisis lingkungan memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi dampak. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering menjadi pihak yang paling terdampak meskipun mereka bukan penyebab utama kerusakan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, kawasan pesisir, daerah kering, atau wilayah sekitar industri ekstraktif harus menghadapi risiko ekologis yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki akses ekonomi lebih kuat.

Dalam situasi tersebut, perempuan sering kali menghadapi beban yang berlapis. Ketika krisis air terjadi, perempuan harus mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika harga pangan meningkat akibat gagal panen atau gangguan produksi, perempuan menjadi pihak yang harus memastikan keberlangsungan konsumsi keluarga di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan juga mengalami keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan dan perlindungan sosial ketika bencana ekologis terjadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis relasi kehidupan. Cara manusia membangun hubungan dengan alam selama ini lebih banyak didasarkan pada logika eksploitasi dan penguasaan dibandingkan keberlanjutan. Alam dipandang sebagai sumber daya yang dapat diekstraksi tanpa batas demi memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, keseimbangan ekologis terganggu dan kehidupan manusia sendiri menjadi semakin rentan terhadap berbagai ancaman lingkungan.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan politik yang bekerja dalam masyarakat. Kerusakan lingkungan bukan hanya akibat kesalahan teknis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga merupakan hasil dari sistem pembangunan yang bertumpu pada dominasi, eksploitasi, dan akumulasi keuntungan. Dalam sistem tersebut, alam diperlakukan sebagai objek ekonomi, sementara kelompok-kelompok rentan sering kali dipinggirkan dari akses terhadap sumber daya dan ruang pengambilan keputusan.

Ekofeminisme juga menekankan bahwa kehidupan manusia sesungguhnya bergantung pada praktik-praktik perawatan yang sering tidak dihargai dalam sistem ekonomi modern. Aktivitas menjaga pangan, menyediakan air, merawat keluarga, dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, tetapi sering dianggap tidak produktif karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung. Padahal, tanpa praktik-praktik tersebut, kehidupan sosial tidak akan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam konteks inilah krisis lingkungan dapat dipahami sebagai krisis kehidupan. Yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam, tetapi juga keberlangsungan

hidup manusia, keadilan sosial, dan masa depan generasi mendatang. Ketika lingkungan terus mengalami kerusakan, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber daya alam, tetapi juga kehilangan rasa aman, stabilitas ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup.

Karena itu, menghadapi krisis ekologis tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis semata, seperti pembangunan infrastruktur atau inovasi teknologi lingkungan. Krisis ini membutuhkan perubahan cara pandang terhadap relasi manusia dengan alam dan kehidupan secara keseluruhan. Pembangunan harus diarahkan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial secara bersamaan.

Memahami krisis lingkungan sebagai krisis kehidupan berarti menyadari bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Keberlangsungan hidup manusia bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan ekologis dan membangun relasi yang lebih adil dengan lingkungan maupun sesama manusia. Sebab ketika alam mengalami kerusakan secara terus-menerus, yang sesungguhnya sedang terancam bukan hanya ekosistem bumi, tetapi fondasi kehidupan manusia itu sendiri.

B. Eksploitasi Alam dan Logika Pembangunan

Pembangunan modern sering dipahami sebagai simbol kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ekspansi investasi, serta peningkatan produksi dipandang sebagai indikator keberhasilan suatu negara dalam mencapai kemajuan. Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana alam diposisikan dalam sistem ekonomi dan politik modern. Dalam banyak kasus,

pembangunan justru berjalan di atas logika eksploitasi terhadap sumber daya alam yang melampaui batas keberlanjutan ekologis.

Sejak revolusi industri, alam semakin dipandang sebagai komoditas yang dapat diekstraksi demi memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Hutan ditebang untuk industri kayu dan perkebunan, tanah dialihkan untuk kawasan industri dan pertambangan, sungai dimanfaatkan secara berlebihan untuk kebutuhan produksi, sementara laut menjadi ruang eksploitasi sumber daya dalam skala besar. Alam tidak lagi dilihat sebagai ruang kehidupan yang memiliki nilai intrinsik, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang nilainya diukur berdasarkan keuntungan material.

Cara pandang tersebut berkembang kuat dalam paradigma pembangunan modern yang bersifat antroposentris. Dalam paradigma ini, manusia ditempatkan sebagai pusat kehidupan dan memiliki legitimasi untuk menguasai serta memanfaatkan alam demi kepentingannya sendiri. Keberhasilan pembangunan kemudian diukur melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan ekspansi produksi, sementara kerusakan ekologis sering dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Logika pembangunan semacam ini melahirkan relasi yang timpang antara manusia dan alam. Alam dipaksa terus menyediakan bahan baku, energi, dan ruang produksi untuk menopang sistem ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa batas. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara masif dan sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan.

Di Indonesia, logika pembangunan yang eksploitatif terlihat dalam berbagai sektor industri ekstraktif. Ekspansi pertambangan, pembukaan perkebunan skala besar, eksploitasi hutan, dan pembangunan kawasan industri

sering kali dilakukan atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masyarakat lokal justru harus menghadapi kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, pencemaran, dan konflik agraria.

Deforestasi menjadi salah satu contoh paling nyata dari dampak pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi alam. Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, penjaga sumber air, dan habitat keanekaragaman hayati. Akibatnya, risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan meningkat secara signifikan.

Selain itu, pembangunan modern juga sering menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan risiko. Keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam umumnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik modal dan elite politik, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampak ekologis dan sosial yang berat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan kesejahteraan kolektif, terutama ketika dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis dan sosial.

Dalam perspektif Ekofeminisme, eksploitasi alam tidak dapat dipisahkan dari struktur dominasi yang bekerja dalam sistem pembangunan modern. Alam diposisikan sebagai objek yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi, sementara kelompok-kelompok rentan sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dalam situasi tersebut. Ketika lahan pertanian dialihfungsikan, ketika sumber air tercemar, atau

ketika hutan kehilangan fungsi ekologisnya, perempuan sering kali menghadapi beban tambahan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Mereka harus bekerja lebih keras untuk memperoleh air, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya di tengah kondisi lingkungan yang semakin rusak.

Namun demikian, suara perempuan sering kali tidak mendapat ruang yang memadai dalam proses pembangunan. Kebijakan lingkungan dan investasi umumnya lebih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan kepentingan ekonomi dibandingkan pengalaman hidup masyarakat yang terdampak langsung. Akibatnya, pembangunan sering berjalan tanpa mempertimbangkan dimensi kehidupan sehari-hari yang justru menjadi fondasi keberlangsungan sosial masyarakat.

Eksplorasi alam dalam logika pembangunan modern pada akhirnya menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan sekadar akibat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akibat cara pandang yang menempatkan alam sebagai objek penguasaan. Selama pembangunan hanya bertumpu pada akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial, maka kerusakan lingkungan akan terus berlangsung dan memperbesar kerentanan kehidupan manusia.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi menjadikan alam sebagai objek eksploitasi semata. Pembangunan harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang.

C. Kapitalisme Ekstraktif dan Kerusakan Ekologi

Perkembangan kapitalisme modern telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global. Pertumbuhan industri, ekspansi investasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan produksi sering dipandang sebagai tanda keberhasilan pembangunan modern. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kapitalisme juga melahirkan pola relasi ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara masif. Dalam sistem ini, alam diposisikan sebagai sumber bahan baku yang harus terus diekstraksi demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan.

Kapitalisme ekstraktif merujuk pada model ekonomi yang bergantung pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar untuk kepentingan industri dan pasar global. Pertambangan, perkebunan monokultur, eksploitasi hutan, industri energi fosil, serta berbagai bentuk industri berbasis sumber daya alam menjadi bagian dari sistem ekstraktif tersebut. Dalam logika ini, keberhasilan ekonomi diukur melalui peningkatan produksi dan keuntungan, sementara keberlanjutan ekologis sering ditempatkan sebagai persoalan sekunder.

Sistem ekstraktif berkembang melalui asumsi bahwa alam merupakan sumber daya yang selalu tersedia dan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Hutan dipandang sebagai komoditas kayu, tanah sebagai ruang produksi, laut sebagai sumber eksploitasi hasil tangkapan, dan sungai sebagai penopang aktivitas industri. Akibatnya, relasi manusia dengan alam dibangun di atas logika penguasaan dan eksploitasi, bukan keberlanjutan kehidupan.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kapitalisme ekstraktif berkembang sangat kuat melalui ekspansi industri pertambangan, perkebunan sawit,

pembukaan kawasan industri, dan eksploitasi energi fosil. Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, jutaan hektare hutan dibuka, wilayah adat dialihfungsikan, dan ruang hidup masyarakat lokal mengalami tekanan yang semakin besar. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi modern sangat bergantung pada eksploitasi ekologis.

Kerusakan ekologis yang dihasilkan dari sistem ekstraktif tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Deforestasi mempercepat perubahan iklim melalui meningkatnya emisi karbon, eksploitasi tambang merusak kualitas tanah dan air, sementara industri berbasis bahan bakar fosil memperbesar krisis iklim dunia. Dalam konteks tersebut, kapitalisme ekstraktif menjadi salah satu penyebab utama krisis lingkungan kontemporer.

Namun demikian, dampak dari sistem ekstraktif tidak dirasakan secara merata. Masyarakat lokal dan kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika eksploitasi sumber daya alam terjadi. Komunitas adat kehilangan wilayah hidupnya, petani kehilangan lahan produktif, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat pencemaran laut, sementara masyarakat sekitar kawasan industri harus menghadapi risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Dalam situasi tersebut, perempuan mengalami kerentanan yang lebih besar karena mereka memiliki keterhubungan langsung dengan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Ketika sumber air tercemar akibat aktivitas industri, perempuan harus mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika lahan pertanian rusak atau hasil panen menurun, perempuan harus menghadapi tekanan ekonomi untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Pada saat yang sama, perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas

terhadap pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kapitalisme ekstraktif bekerja melalui logika dominasi yang sama dengan patriarki. Alam dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi mempertahankan sistem produksi dan akumulasi keuntungan. Tubuh perempuan dan tubuh alam dipandang sebagai “sumber daya” yang harus terus menghasilkan, tetapi pada saat yang sama tidak mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang setara.

Tokoh seperti Maria Mies menjelaskan bahwa kapitalisme modern bergantung pada dua bentuk eksploitasi yang sering tidak terlihat, yaitu eksploitasi terhadap kerja reproduktif perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Sistem ekonomi memperoleh keuntungan dari kerja-kerja domestik dan perawatan yang dilakukan perempuan tanpa pengakuan ekonomi yang layak, sementara alam terus dieksploitasi untuk menopang produksi industri dan konsumsi global.

Dalam konteks ini, kapitalisme ekstraktif tidak hanya menciptakan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial dan ekologis. Keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal dan elite politik, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak ekologis dan sosial yang berkepanjangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan pada dasarnya berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan dan distribusi sumber daya.

Kapitalisme ekstraktif juga mendorong budaya konsumsi yang semakin tinggi. Masyarakat modern didorong untuk terus mengonsumsi barang dan energi dalam jumlah besar demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, eksploitasi terhadap alam terus

meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Dalam situasi tersebut, keberlanjutan ekologis sering dikorbankan demi kepentingan produksi jangka pendek.

Kritik terhadap kapitalisme ekstraktif pada akhirnya bukan berarti menolak pembangunan atau aktivitas ekonomi secara keseluruhan, melainkan mempertanyakan model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi tanpa batas. Selama alam dipandang hanya sebagai instrumen ekonomi, maka krisis ekologis akan terus berkembang dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia sendiri.

Karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan secara ekologis dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dalam konteks ini, pembangunan tidak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Kapitalisme ekstraktif memperlihatkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan alam yang rusak, tetapi juga akibat dari sistem ekonomi yang menjadikan eksploitasi sebagai fondasi utama pertumbuhan. Ketika keuntungan ditempatkan di atas keberlanjutan kehidupan, maka kerusakan ekologis akan terus berlangsung dan memperbesar kerentanan manusia terhadap berbagai bentuk krisis di masa depan.

D. Tubuh, Alam, dan Kekuasaan

Dalam perspektif Ekofeminisme, tubuh dan alam memiliki keterhubungan yang sangat erat dalam struktur kekuasaan modern. Keduanya sama-sama menjadi ruang dominasi, pengendalian, dan eksploitasi dalam sistem sosial

yang bertumpu pada patriarki dan kapitalisme. Tubuh perempuan maupun tubuh alam diposisikan sebagai objek yang dapat diatur, dimanfaatkan, dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi, politik, maupun sosial.

Sejarah modernitas memperlihatkan bagaimana tubuh manusia, terutama tubuh perempuan, mengalami pengawasan dan kontrol yang kuat melalui berbagai institusi sosial. Perempuan sering kali diposisikan berdasarkan fungsi biologis dan reproduktifnya. Tubuh perempuan dikaitkan dengan reproduksi, pengasuhan, dan kerja domestik, sehingga ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial kerap dibatasi oleh konstruksi budaya dan norma patriarkal.

Pada saat yang sama, alam juga diperlakukan dengan cara yang serupa. Alam dipandang sebagai objek yang harus dikendalikan demi memenuhi kebutuhan manusia. Hutan dibuka untuk industri, tanah dipaksa terus memproduksi, sungai dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, sementara laut menjadi ruang perebutan sumber daya global. Dalam relasi tersebut, tubuh alam mengalami proses penguasaan yang mirip dengan bagaimana tubuh perempuan dikendalikan dalam sistem patriarki.

Ekofeminisme melihat bahwa keterhubungan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari cara kerja kekuasaan modern yang dibangun di atas logika dominasi. Perempuan dan alam sama-sama diasosiasikan dengan tubuh, emosi, reproduksi, dan kehidupan biologis, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan rasionalitas, budaya, dan kontrol sosial. Pembagian tersebut kemudian menciptakan hierarki yang menempatkan tubuh dan alam sebagai sesuatu yang dapat dikuasai.

Dalam masyarakat modern, tubuh perempuan sering menjadi arena politik dan ekonomi. Standar kecantikan, kontrol terhadap reproduksi, objektifikasi tubuh,

hingga eksploitasi tenaga kerja perempuan menunjukkan bahwa tubuh perempuan tidak sepenuhnya berada dalam ruang otonom. Tubuh perempuan kerap diposisikan sebagai objek konsumsi maupun instrumen produksi dalam sistem ekonomi modern.

Hal yang serupa terjadi terhadap alam. Alam dinilai berdasarkan nilai ekonominya dan dipaksa terus menghasilkan sumber daya untuk menopang sistem produksi. Ketika alam tidak lagi menghasilkan keuntungan ekonomi, keberadaannya sering dianggap tidak penting. Akibatnya, kerusakan ekologis terus berlangsung karena relasi manusia dengan alam dibangun di atas logika pemanfaatan, bukan keberlanjutan.

Dalam konteks kapitalisme modern, tubuh dan alam sama-sama menjadi bagian dari sistem produksi. Tubuh manusia dijadikan tenaga kerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sementara alam menjadi penyedia bahan baku dan energi bagi industri. Sistem ini bekerja dengan cara mengekstraksi sebanyak mungkin sumber daya dari tubuh maupun alam demi mempertahankan akumulasi keuntungan.

Perempuan sering mengalami dampak paling besar dalam situasi tersebut karena mereka berada di persimpangan antara kerja reproduktif dan kerusakan ekologis. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, perempuan tetap harus menjalankan tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga di tengah kondisi sosial-ekologis yang semakin sulit. Dalam banyak kasus, perempuan harus menghadapi tekanan ekonomi sekaligus kerentanan sosial akibat hilangnya sumber kehidupan.

Di sisi lain, tubuh perempuan juga sering menjadi simbol dalam berbagai narasi tentang alam. Istilah seperti “ibu pertiwi”, “rahim bumi”, atau “alam sebagai ibu” menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dan alam

dikaitkan sebagai sumber kehidupan. Namun, simbolisasi tersebut sering kali bersifat paradoksal karena di satu sisi perempuan dan alam dipuja sebagai pemberi kehidupan, tetapi di sisi lain juga terus dieksploitasikan dan dikendalikan.

Ekofeminisme mengkritik cara pandang tersebut karena menempatkan tubuh dan alam dalam posisi subordinat. Perspektif ini menolak relasi yang dibangun di atas dominasi dan penguasaan, serta menawarkan cara pandang yang lebih menghargai tubuh dan alam sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai intrinsik.

Dalam konteks ini, politik tubuh dan politik lingkungan sebenarnya saling berkaitan. Ketika perempuan memperjuangkan hak atas tubuhnya, hak atas ruang hidup, dan hak atas lingkungan yang sehat, mereka sesungguhnya sedang melawan sistem dominasi yang sama. Karena itu, perjuangan ekologis tidak dapat dipisahkan dari perjuangan terhadap keadilan gender dan hak asasi manusia.

Lebih jauh, ekofeminisme juga menekankan pentingnya membangun relasi baru yang lebih setara terhadap tubuh dan alam. Tubuh tidak seharusnya dipahami hanya sebagai instrumen produksi, begitu pula alam tidak dapat terus diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Kehidupan yang berkelanjutan hanya dapat tercipta ketika manusia membangun hubungan yang berbasis penghormatan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama maupun lingkungan.

Pembahasan mengenai tubuh, alam, dan kekuasaan menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga persoalan bagaimana kekuasaan bekerja dalam mengendalikan kehidupan. Tubuh perempuan dan tubuh alam sama-sama menjadi ruang perebutan kepentingan ekonomi dan politik dalam sistem modern. Karena itu, membela lingkungan juga

berarti membela martabat tubuh dan kehidupan manusia dari berbagai bentuk eksploitasi dan dominasi.

E. Politik Kehidupan dalam Perspektif Ekofeminis

Konsep politik kehidupan dalam perspektif Ekofeminisme lahir dari kesadaran bahwa persoalan lingkungan bukan hanya berkaitan dengan alam, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh. Politik kehidupan tidak berbicara semata-mata mengenai kekuasaan negara, kebijakan ekonomi, atau perebutan sumber daya, melainkan tentang bagaimana kehidupan dipertahankan, dirawat, dan dijaga keberlanjutannya di tengah krisis ekologis dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks.

Dalam sistem modern, politik sering dipahami dalam kerangka institusional seperti pemerintahan, hukum, dan kekuasaan formal. Namun, ekofeminisme memperluas makna politik hingga mencakup praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perawatan, pangan, air, kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Aktivitas yang selama ini dianggap “domestik” dan tidak politis justru dipandang sebagai fondasi utama keberlangsungan kehidupan sosial.

Perspektif ini lahir dari kritik terhadap model pembangunan modern yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan aspek keberlanjutan kehidupan. Sistem ekonomi modern lebih menghargai aktivitas yang menghasilkan keuntungan material, sementara kerja-kerja perawatan seperti mengasuh anak, menjaga pangan keluarga, merawat lingkungan, dan mempertahankan komunitas sering tidak dianggap memiliki nilai politik maupun ekonomi yang penting.

Padahal, kehidupan manusia pada dasarnya bergantung pada praktik-praktik perawatan tersebut. Tanpa air bersih, pangan yang cukup, lingkungan yang sehat, dan relasi sosial yang saling menopang, masyarakat tidak akan mampu bertahan. Karena itu, ekofeminisme melihat bahwa menjaga kehidupan merupakan tindakan politik yang sangat mendasar.

Politik kehidupan juga berkaitan dengan upaya mempertahankan ruang hidup masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi. Ketika perempuan mempertahankan sumber air dari pencemaran industri, ketika masyarakat adat menjaga hutan dari ekspansi tambang, atau ketika petani mempertahankan benih lokal dari dominasi industri pangan global, mereka sesungguhnya sedang menjalankan politik kehidupan. Perjuangan tersebut bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang hak hidup, keberlanjutan generasi, dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekofeminis, kehidupan tidak dapat dipisahkan dari relasi saling ketergantungan antara manusia dan alam. Manusia bukan entitas yang berdiri terpisah dari lingkungan, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling memengaruhi. Karena itu, politik kehidupan menolak cara pandang yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi dan menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai bagian penting dari keadilan sosial.

Politik kehidupan juga menekankan pentingnya nilai kepedulian (*care*), solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dalam sistem kapitalisme modern yang bertumpu pada kompetisi dan individualisme, nilai-nilai perawatan sering dianggap lemah atau tidak produktif. Padahal, praktik merawat justru menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kehidupan manusia dan lingkungan.

Perempuan memiliki peran penting dalam politik kehidupan karena pengalaman sosial mereka sering

berkaitan langsung dengan praktik-praktik perawatan dan keberlanjutan hidup sehari-hari. Namun, ekofeminisme tidak bermaksud membebankan tanggung jawab menjaga lingkungan hanya kepada perempuan. Sebaliknya, perspektif ini mengajak seluruh masyarakat untuk membangun relasi kehidupan yang lebih setara, peduli, dan berkelanjutan.

Dalam konteks krisis ekologis global, politik kehidupan menjadi semakin relevan. Perubahan iklim, krisis pangan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan memperlihatkan bahwa model pembangunan yang eksploitatif telah menciptakan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, diperlukan cara pandang baru yang menempatkan kehidupan sebagai pusat dari pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan.

Politik kehidupan juga mengandung dimensi etis yang kuat. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban teknis atau administratif, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama dan generasi mendatang. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekologis harus dipahami sebagai bagian dari keadilan sosial dan kemanusiaan. Politik kehidupan dalam perspektif ekofeminis mengajarkan bahwa perjuangan membela lingkungan sesungguhnya adalah perjuangan membela kehidupan itu sendiri. Ketika manusia menjaga air, tanah, hutan, pangan, dan ruang hidup bersama, mereka sedang mempertahankan fondasi keberlangsungan masyarakat. Sebab tanpa lingkungan yang sehat dan relasi sosial yang adil, kehidupan manusia akan terus berada dalam ancaman krisis yang semakin dalam.[]



BAB III

PEREMPUAN DI TENGAH KRISIS LINGKUNGAN

A. Beban Ganda Perempuan dalam Krisis Ekologi

Krisis lingkungan menghadirkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran air, krisis pangan, hingga bencana ekologis tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dampak dari krisis ekologis tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perlindungan sosial cenderung mengalami kerentanan yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena mereka berada pada posisi sosial yang sering kali memikul tanggung jawab besar dalam

menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas.

Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki peran penting dalam kerja-kerja domestik dan perawatan kehidupan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab terhadap penyediaan pangan, pengelolaan air, pengasuhan anak, hingga menjaga kesehatan keluarga. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, seluruh tanggung jawab tersebut menjadi semakin berat karena sumber-sumber kehidupan yang selama ini menopang kehidupan rumah tangga ikut terganggu.

Krisis air menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana kerusakan lingkungan memperbesar beban perempuan. Di banyak wilayah pedesaan, perempuan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Ketika sumber air mengering akibat kekeringan, pencemaran, atau kerusakan hutan, perempuan harus menempuh jarak yang lebih jauh dan mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk memperoleh air bersih. Situasi ini tidak hanya meningkatkan beban fisik, tetapi juga mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, maupun ruang partisipasi sosial lainnya.

Hal yang serupa terjadi dalam persoalan pangan. Ketika perubahan iklim menyebabkan gagal panen atau menurunkan produktivitas pertanian, perempuan sering menjadi pihak yang harus menjaga keberlangsungan konsumsi keluarga di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam kondisi krisis, perempuan kerap mengurangi konsumsi makanan mereka sendiri demi memastikan anggota keluarga lain tetap dapat makan. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana krisis ekologis dapat memperdalam ketimpangan sosial dan menghadirkan beban yang tidak proporsional terhadap perempuan.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kerja-kerja reproduktif dan domestik. Aktivitas seperti merawat keluarga, menjaga pangan, menyediakan air, dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga sering dianggap sebagai kewajiban alami perempuan. Padahal, kerja-kerja tersebut merupakan fondasi utama keberlangsungan kehidupan sosial.

Ironisnya, kerja perawatan yang dilakukan perempuan sering kali tidak diakui sebagai bentuk kerja produktif dalam sistem ekonomi modern. Pembangunan lebih banyak menghargai aktivitas yang menghasilkan keuntungan material, sementara kerja domestik dan reproduktif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Akibatnya, ketika krisis ekologis terjadi dan kerja-kerja perawatan menjadi semakin berat, perempuan harus menanggung beban tambahan tanpa dukungan sosial dan ekonomi yang memadai.

Kondisi ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai beban ganda perempuan. Di satu sisi, perempuan tetap harus menjalankan tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga, sementara di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam banyak kasus, perempuan bahkan harus terlibat dalam aktivitas ekonomi tambahan untuk membantu mempertahankan pendapatan keluarga di tengah krisis ekologis.

Beban ganda tersebut menjadi semakin berat ketika bencana lingkungan terjadi. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, atau bencana iklim lainnya tidak hanya menghancurkan ruang hidup masyarakat, tetapi juga memperbesar risiko sosial yang dihadapi perempuan. Dalam situasi pengungsian, perempuan sering menghadapi

keterbatasan akses terhadap kebutuhan kesehatan, sanitasi, perlindungan sosial, hingga keamanan diri. Tidak jarang perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi dalam situasi krisis.

Selain itu, perempuan juga sering mengalami keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan kebijakan pembangunan. Meskipun mereka merasakan dampak langsung dari kerusakan ekologis, suara perempuan sering tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan publik. Akibatnya, banyak kebijakan lingkungan dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan pengalaman hidup serta kebutuhan spesifik perempuan.

Namun demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai korban dari krisis ekologis. Dalam banyak situasi, perempuan juga menjadi aktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan komunitas. Perempuan terlibat dalam menjaga sumber air, mempertahankan benih lokal, mengembangkan pertanian berkelanjutan, hingga memimpin gerakan penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan.

Pengalaman hidup perempuan dalam mengelola kebutuhan sehari-hari justru melahirkan pengetahuan ekologis yang penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai pelengkap semata, tetapi sebagai bagian penting dalam membangun keadilan ekologis dan sosial.

Pada akhirnya, beban ganda perempuan dalam krisis ekologi menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah bersifat netral secara sosial. Dampaknya

sangat dipengaruhi oleh relasi gender, akses terhadap sumber daya, dan posisi sosial dalam masyarakat. Ketika sistem sosial masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan kerja-kerja perawatan tidak dihargai secara adil, maka krisis ekologis akan terus memperbesar ketimpangan yang telah ada sebelumnya.

Karena itu, upaya menghadapi krisis lingkungan tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis dan pembangunan infrastruktur semata. Dibutuhkan perubahan sosial yang lebih mendasar, termasuk pengakuan terhadap kerja-kerja perawatan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pembangunan sistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.

B. Kemiskinan Ekologis dan Ketimpangan Gender

Krisis lingkungan pada dasarnya tidak hanya menghasilkan kerusakan ekologis, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga eksploitasi sumber daya alam sering kali berdampak paling besar terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi apa yang dapat disebut sebagai kemiskinan ekologis.

Kemiskinan ekologis merujuk pada kondisi ketika kerusakan lingkungan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber-sumber kehidupan yang menopang keberlangsungan hidup mereka. Air bersih menjadi semakin sulit diperoleh, tanah kehilangan produktivitas, hasil pertanian menurun, sumber pangan terganggu, dan ruang hidup masyarakat mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam. Situasi ini

memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki keterhubungan langsung dengan sumber daya alam melalui aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan pangan keluarga, penyediaan air, pengumpulan bahan bakar, hingga menjaga kesehatan rumah tangga. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, perempuan menjadi pihak yang pertama kali merasakan dampaknya karena seluruh aktivitas tersebut bergantung pada keberadaan sumber daya alam yang memadai.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memperbesar beban ekonomi perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas miskin. Ketika hasil panen menurun akibat kekeringan atau cuaca ekstrem, perempuan harus menghadapi tekanan untuk mempertahankan kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam situasi tersebut, perempuan sering dipaksa bekerja lebih keras dengan sumber daya yang semakin terbatas.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kemiskinan ekologis tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan gender yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Perempuan sering memiliki akses yang lebih terbatas terhadap tanah, pendidikan, modal ekonomi, dan pengambilan keputusan. Akibatnya, ketika krisis ekologis terjadi, perempuan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang memiliki akses sumber daya lebih besar.

Di banyak wilayah, perempuan bahkan tidak memiliki hak formal atas tanah yang mereka kelola. Ketika konflik agraria atau proyek pembangunan berlangsung,

perempuan sering kehilangan akses terhadap lahan produktif tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan gender memperbesar kerentanan perempuan terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Kemiskinan ekologis juga terlihat dalam persoalan kesehatan. Pencemaran udara, air, dan tanah menghadirkan risiko kesehatan yang besar bagi masyarakat miskin, terutama perempuan dan anak-anak. Perempuan yang tinggal di sekitar kawasan industri atau pertambangan sering menghadapi paparan limbah berbahaya yang memengaruhi kesehatan reproduksi maupun kesehatan keluarga secara keseluruhan. Namun, akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial sering kali sangat terbatas.

Selain itu, perubahan iklim juga memperbesar ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Ketika bencana ekologis terjadi, perempuan sering kehilangan sumber pendapatan sekaligus harus tetap menjalankan tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling sulit pulih setelah bencana karena keterbatasan akses terhadap bantuan, pekerjaan, maupun kepemilikan aset ekonomi.

Ketimpangan gender dalam konteks krisis ekologis juga berkaitan dengan minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan sering didominasi oleh pendekatan teknokratis dan kepentingan ekonomi, sementara pengalaman hidup perempuan sebagai pihak yang terdampak langsung jarang dijadikan pertimbangan utama. Akibatnya, solusi yang dihasilkan sering tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama perempuan.

Padahal, perempuan memiliki pengetahuan ekologis yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam banyak komunitas lokal, perempuan berperan dalam menjaga benih, mengelola pangan, memanfaatkan tanaman obat, dan mempertahankan praktik hidup yang lebih selaras dengan alam. Pengetahuan tersebut sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari ketahanan komunitas menghadapi krisis lingkungan.

Namun demikian, sistem pembangunan modern cenderung mengabaikan pengetahuan lokal tersebut dan lebih mengutamakan pendekatan industrial serta eksploitasi sumber daya dalam skala besar. Akibatnya, perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber kehidupan, tetapi juga kehilangan ruang sosial dan budaya yang selama ini menopang keberlangsungan komunitas mereka.

Kemiskinan ekologis pada akhirnya menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Kerusakan lingkungan memperbesar ketimpangan yang sudah ada sebelumnya dan membuat kelompok rentan semakin sulit mempertahankan kehidupannya. Dalam situasi tersebut, perempuan berada pada posisi yang sangat rentan karena mereka menghadapi tekanan ekologis sekaligus ketidakadilan gender secara bersamaan.

Karena itu, upaya mengatasi krisis lingkungan harus dilakukan dengan perspektif yang lebih adil secara sosial dan gender. Perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai jika masih ada kelompok masyarakat yang dipinggirkan dari akses terhadap sumber daya, ruang hidup, dan pengambilan keputusan.

Kemiskinan ekologis dan ketimpangan gender memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya tentang alam yang rusak, tetapi juga tentang bagaimana

kehidupan manusia menjadi semakin rentan akibat struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Sebab ketika lingkungan kehilangan kemampuan menopang kehidupan, kelompok yang paling lemah akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya dan pihak terakhir yang memperoleh perlindungan.

C. Perempuan, Air, Pangan, dan Ruang Hidup

Hubungan perempuan dengan air, pangan, dan ruang hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam perspektif Ekofeminisme. Dalam banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat adat, perempuan memiliki keterhubungan langsung dengan sumber-sumber kehidupan yang menopang keberlangsungan keluarga dan komunitas. Mereka terlibat dalam penyediaan air, pengelolaan pangan, pemeliharaan benih, hingga menjaga keberlanjutan lingkungan tempat hidup masyarakat.

Keterhubungan tersebut bukan sekadar persoalan biologis atau kodrati, melainkan terbentuk melalui pengalaman sosial dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari yang dijalankan perempuan. Karena itu, ketika lingkungan mengalami kerusakan, perempuan menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Krisis air, berkurangnya produksi pangan, dan hilangnya ruang hidup bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan dan komunitasnya.

Air merupakan salah satu elemen paling mendasar dalam kehidupan manusia. Namun dalam banyak masyarakat, tanggung jawab memperoleh dan mengelola air rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Ketika sumber air masih tersedia dan lingkungan terjaga, aktivitas tersebut mungkin berjalan

sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Akan tetapi, ketika krisis ekologis menyebabkan sumber air mengering atau tercemar, beban perempuan meningkat secara signifikan.

Di banyak wilayah, perempuan harus berjalan lebih jauh untuk memperoleh air bersih akibat rusaknya sumber mata air atau berkurangnya debit sungai. Waktu dan tenaga yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas sosial lainnya habis untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan dapat mempersempit ruang hidup perempuan sekaligus memperbesar ketimpangan sosial.

Persoalan air juga berkaitan erat dengan kesehatan dan martabat kehidupan. Ketika akses terhadap air bersih terbatas, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat sanitasi yang buruk dan pencemaran lingkungan. Dalam situasi bencana atau pengungsian, keterbatasan akses terhadap air dan sanitasi bahkan dapat meningkatkan risiko kekerasan dan kerentanan sosial terhadap perempuan.

Selain air, pangan juga menjadi ruang penting yang memperlihatkan keterhubungan perempuan dengan lingkungan. Dalam banyak komunitas agraris, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga. Mereka terlibat dalam menanam, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit perempuan yang juga menjadi penjaga keberagaman benih lokal dan pengetahuan pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, sistem pangan modern yang bertumpu pada industrialisasi dan kapitalisme ekstraktif justru semakin meminggirkan peran perempuan. Revolusi hijau, penggunaan benih hibrida, dominasi perusahaan

agribisnis, serta ekspansi perkebunan monokultur menyebabkan masyarakat kehilangan kemandirian pangan dan ketergantungan terhadap industri global semakin meningkat. Dalam situasi tersebut, perempuan kehilangan akses terhadap benih, tanah, dan ruang produksi yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Perubahan iklim juga memperburuk kondisi tersebut. Ketidakpastian musim, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem menyebabkan hasil pertanian menurun dan mengganggu stabilitas pangan rumah tangga. Dalam kondisi krisis, perempuan sering kali menjadi pihak yang harus memastikan kebutuhan konsumsi keluarga tetap terpenuhi meskipun sumber daya yang tersedia semakin terbatas.

Persoalan air dan pangan pada akhirnya berkaitan erat dengan ruang hidup. Ruang hidup bukan hanya berarti tempat tinggal secara fisik, tetapi mencakup seluruh lingkungan sosial dan ekologis yang menopang keberlangsungan komunitas. Hutan, sungai, tanah pertanian, laut, dan wilayah adat merupakan bagian dari ruang hidup masyarakat yang memiliki makna ekonomi, sosial, budaya, bahkan spiritual.

Ketika ruang hidup dirusak melalui pertambangan, pembangunan industri, reklamasi, atau ekspansi perkebunan, perempuan sering menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kehilangan akses terhadap sumber pangan, air bersih, dan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, perempuan juga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi akibat perubahan struktur kehidupan komunitas.

Di banyak wilayah, perempuan menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankan ruang hidup dari eksploitasi sumber daya alam. Mereka terlibat dalam gerakan menolak tambang, mempertahankan sumber air,

menjaga hutan, dan melindungi tanah adat dari perampasan. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa membela lingkungan pada dasarnya juga merupakan upaya mempertahankan kehidupan dan masa depan komunitas.

Namun, perempuan yang terlibat dalam perjuangan ekologis sering menghadapi berbagai bentuk tekanan. Mereka tidak jarang dianggap menghambat pembangunan, mengalami intimidasi, bahkan menghadapi kriminalisasi ketika mempertahankan lingkungan dan ruang hidup komunitasnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik lingkungan bukan hanya persoalan sumber daya alam, tetapi juga persoalan kekuasaan dan hak hidup masyarakat.

Perspektif ekofeminisme menegaskan bahwa air, pangan, dan ruang hidup tidak dapat dipandang sekadar sebagai komoditas ekonomi. Ketiganya merupakan fondasi utama kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Ketika sumber-sumber kehidupan tersebut dikuasai dan dieksploitasi demi kepentingan pasar, maka yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga martabat dan keberlangsungan hidup manusia.

Karena itu, membangun keadilan ekologis berarti memastikan bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan seperti perempuan, memiliki akses yang adil terhadap air, pangan, dan ruang hidup yang layak. Pembangunan tidak seharusnya mengorbankan lingkungan dan komunitas demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Sebab ketika ruang hidup masyarakat dihancurkan, yang sesungguhnya hilang bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sejarah, identitas, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

D. Dampak Perubahan Iklim terhadap Kehidupan Perempuan

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan suhu

global, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga meningkatnya frekuensi bencana ekologis menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi, sosial, dan politik menjadi pihak yang paling rentan menghadapi krisis tersebut. Dalam konteks ini, perempuan berada pada posisi yang sangat rentan karena mereka menghadapi tekanan ekologis sekaligus ketimpangan gender yang telah lama berkembang dalam masyarakat.

Perubahan iklim memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar seperti air, pangan, kesehatan, dan ruang hidup. Di banyak wilayah pedesaan, perempuan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan keberlangsungan keluarga. Ketika perubahan iklim menyebabkan kekeringan, gagal panen, atau krisis air, perempuan menjadi pihak yang harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.

Kekeringan yang berkepanjangan, misalnya, menyebabkan sumber air semakin sulit diperoleh. Dalam situasi tersebut, perempuan harus mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini memperbesar beban fisik sekaligus membatasi kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial lainnya.

Di sektor pertanian, perubahan iklim juga menghadirkan ancaman serius terhadap kehidupan perempuan. Ketidakpastian musim tanam, meningkatnya serangan hama, cuaca ekstrem, dan menurunnya

produktivitas lahan menyebabkan stabilitas pangan rumah tangga terganggu. Perempuan yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga pangan keluarga harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat di tengah kondisi lingkungan yang tidak menentu.

Dalam banyak kasus, perubahan iklim juga memperbesar risiko kemiskinan perempuan. Ketika hasil pertanian menurun atau sumber penghidupan masyarakat terganggu akibat bencana ekologis, perempuan sering kehilangan sumber pendapatan tetapi tetap harus menjalankan tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya menghadirkan persoalan ekologis, tetapi juga memperdalam ketidakadilan sosial dan gender.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim berkaitan erat dengan struktur sosial yang tidak setara. Perempuan sering memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, kepemilikan aset, perlindungan sosial, dan pengambilan keputusan. Akibatnya, kemampuan perempuan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim menjadi lebih rendah dibandingkan kelompok yang memiliki akses sumber daya lebih besar.

Perubahan iklim juga menghadirkan ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. Gelombang panas, pencemaran lingkungan, krisis pangan, dan buruknya sanitasi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan. Dalam situasi bencana, perempuan sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, kebutuhan sanitasi, dan perlindungan sosial yang memadai.

Selain itu, bencana akibat perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Dalam situasi pengungsian dan ketidakstabilan sosial,

perempuan dan anak perempuan sering menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia. Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim dapat memperbesar kerentanan sosial yang telah ada sebelumnya.

Perempuan di wilayah pesisir juga menghadapi ancaman besar akibat naiknya permukaan laut dan kerusakan ekosistem laut. Abrasi, banjir rob, dan menurunnya hasil tangkapan ikan memengaruhi kehidupan keluarga nelayan dan memperbesar tekanan ekonomi rumah tangga. Dalam banyak komunitas pesisir, perempuan harus mencari strategi bertahan hidup baru di tengah perubahan lingkungan yang semakin cepat. Namun demikian, perempuan bukan hanya korban dari perubahan iklim. Dalam banyak situasi, perempuan juga menjadi aktor penting dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi krisis ekologis. Mereka terlibat dalam pengelolaan pangan lokal, konservasi air, pertanian berkelanjutan, hingga gerakan lingkungan yang memperjuangkan keberlanjutan hidup masyarakat.

Pengalaman hidup perempuan dalam menjaga kebutuhan sehari-hari justru melahirkan pengetahuan ekologis yang penting dalam menghadapi perubahan iklim. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan lingkungan dan strategi adaptasi iklim menjadi sangat penting. Tanpa perspektif perempuan, kebijakan perubahan iklim sering kali gagal memahami dampak nyata yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput.

Secara sederhana, dampak perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan gender. Ketika struktur sosial masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan tidak setara, maka perubahan iklim akan terus

memperbesar ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, menghadapi perubahan iklim membutuhkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif. Perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Sebab krisis iklim pada akhirnya bukan hanya tentang perubahan cuaca, tetapi tentang bagaimana manusia mempertahankan kehidupan yang layak, aman, dan berkelanjutan di tengah dunia yang semakin tidak menentu.

E. Kekerasan Ekologis dan Kerentanan Sosial

Kerusakan lingkungan sering kali dipahami sebagai persoalan ekologis yang berkaitan dengan pencemaran, hilangnya hutan, perubahan iklim, atau menurunnya kualitas sumber daya alam. Namun, di balik kerusakan tersebut terdapat bentuk kekerasan yang lebih dalam dan sering tidak terlihat secara langsung, yaitu kekerasan ekologis. Kekerasan ekologis tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi bekerja melalui penghancuran ruang hidup, hilangnya akses terhadap sumber kehidupan, serta terciptanya kondisi sosial yang membuat masyarakat semakin rentan dan tidak berdaya.

Dalam perspektif Ekofeminisme, kekerasan ekologis merupakan bagian dari sistem dominasi yang menempatkan alam dan kelompok rentan sebagai objek eksploitasi. Ketika lingkungan dirusak demi kepentingan industri, investasi, atau pembangunan yang eksploitatif, masyarakat yang hidup bergantung pada alam ikut mengalami dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang sangat besar. Kerusakan lingkungan pada akhirnya bukan hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menghancurkan rasa aman, stabilitas hidup, dan keberlangsungan komunitas.

Kekerasan ekologis dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Pencemaran sungai akibat limbah industri, misalnya, bukan sekadar persoalan kualitas air yang menurun, tetapi juga bentuk kekerasan terhadap masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber kehidupan. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, ketika hasil tangkapan ikan menurun akibat pencemaran laut, atau ketika tanah pertanian kehilangan kesuburan karena aktivitas tambang, maka kehidupan sosial masyarakat ikut terganggu.

Dalam banyak kasus, masyarakat yang paling terdampak justru merupakan kelompok yang memiliki posisi sosial dan ekonomi paling lemah. Komunitas adat, masyarakat miskin, petani kecil, nelayan tradisional, serta perempuan sering kali berada di garis depan menghadapi dampak kerusakan lingkungan. Mereka memiliki ketergantungan langsung terhadap alam, tetapi pada saat yang sama memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, sumber daya ekonomi, maupun pengambilan keputusan.

Perempuan mengalami kerentanan yang lebih kompleks dalam situasi kekerasan ekologis karena mereka menghadapi tekanan lingkungan sekaligus ketimpangan gender dalam struktur sosial. Ketika ruang hidup masyarakat rusak, perempuan tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga harus menghadapi tekanan untuk menjaga keberlangsungan keluarga di tengah kondisi yang semakin sulit. Beban sosial tersebut sering kali tidak terlihat dalam kebijakan pembangunan maupun penanganan krisis lingkungan.

Kekerasan ekologis juga sering berjalan beriringan dengan kekerasan struktural. Banyak proyek eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Tanah

masyarakat diambil alih atas nama pembangunan, kawasan hutan dialihfungsikan untuk industri, dan wilayah pesisir direklamasi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup komunitas lokal. Dalam situasi tersebut, masyarakat kehilangan hak atas ruang hidupnya dan dipaksa berhadapan dengan kekuatan ekonomi maupun politik yang jauh lebih besar.

Tidak sedikit masyarakat yang mengalami intimidasi ketika mempertahankan lingkungan dan wilayah hidup mereka. Aktivis lingkungan, masyarakat adat, petani, dan perempuan pejuang lingkungan sering menghadapi kriminalisasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik ketika menolak proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan pada dasarnya berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan perebutan kepentingan ekonomi.

Kekerasan ekologis juga menghadirkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Hilangnya tanah, rusaknya lingkungan, dan hancurnya ruang hidup komunitas dapat memicu trauma kolektif, kecemasan, serta hilangnya rasa keterikatan sosial masyarakat terhadap lingkungannya. Dalam banyak komunitas adat, alam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan spiritual. Ketika lingkungan dihancurkan, masyarakat bukan hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan sejarah dan makna hidup yang selama ini membentuk identitas mereka.

Kerentanan sosial akibat krisis ekologis semakin besar ketika negara dan sistem pembangunan lebih memihak pada kepentingan modal dibandingkan perlindungan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan justru kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan. Proses hukum yang panjang, lemahnya perlindungan terhadap

masyarakat adat dan kelompok rentan, serta dominasi kepentingan ekonomi menyebabkan banyak korban kerusakan lingkungan berada dalam posisi yang tidak berdaya.

Selain itu, kerusakan ekologis juga memperbesar potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Krisis air, perebutan lahan, menurunnya sumber daya alam, dan ketidakstabilan ekonomi akibat perubahan lingkungan dapat memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, kelompok rentan sering menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan dan sumber daya untuk bertahan.

Perspektif ekofeminisme melihat bahwa kekerasan ekologis tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis lingkungan semata. Persoalan ini berkaitan dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan eksploitasi terhadap alam dan manusia terus berlangsung. Karena itu, perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan keadilan sosial.

Membangun keadilan ekologis berarti memastikan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang sehat, ruang hidup yang aman, dan keterlibatan yang adil dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dalam konteks ini, perempuan dan kelompok rentan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar pihak yang menerima dampak dari kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman hidup mereka.

Kekerasan ekologis memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya tentang alam yang hancur, tetapi tentang kehidupan manusia yang dipertaruhkan. Ketika lingkungan dieksploitasi tanpa batas,

yang sesungguhnya ikut dirusak adalah relasi sosial, rasa aman, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Sebab krisis ekologis pada akhirnya selalu berujung pada pertanyaan paling mendasar: siapa yang memperoleh keuntungan dari pembangunan, dan siapa yang harus menanggung beban kerusakannya.





BAB IV

TUBUH PEREMPUAN DAN POLITIK EKSPLOITASI

A. Tubuh Perempuan sebagai Arena Kekuasaan

Tubuh perempuan tidak pernah benar-benar berada dalam ruang yang netral. Sejak lama, tubuh perempuan menjadi arena tempat berbagai kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bekerja sekaligus saling berebut pengaruh. Cara perempuan berpakaian, berbicara, bergerak, bekerja, hingga menentukan pilihan atas dirinya sendiri sering kali tidak sepenuhnya berada dalam ruang otonom, melainkan diatur melalui norma sosial dan struktur kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam banyak budaya patriarkal, tubuh perempuan diposisikan bukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan penuh atas dirinya, tetapi sebagai objek yang harus dikendalikan, dijaga, dan disesuaikan dengan standar sosial tertentu. Perempuan sering dinilai berdasarkan tubuhnya, penampilannya, fungsi reproduksinya, atau kemampuannya

memenuhi ekspektasi sosial yang dibentuk masyarakat. Akibatnya, tubuh perempuan menjadi ruang tempat kontrol sosial bekerja secara sangat kuat.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kontrol terhadap tubuh perempuan memiliki keterkaitan dengan cara manusia memperlakukan alam. Tubuh perempuan dan tubuh alam sama-sama diposisikan sebagai sesuatu yang dapat diatur, dimanfaatkan, dan dieksploitasi demi kepentingan sistem sosial maupun ekonomi. Keduanya sering ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kekuasaan yang lebih dominan.

Dalam sejarah modernitas, tubuh perempuan mengalami proses objektifikasi yang sangat kuat. Perempuan sering dipandang berdasarkan nilai fisik dan fungsi biologisnya dibandingkan sebagai individu yang utuh. Tubuh perempuan menjadi objek pengawasan moral, simbol kehormatan keluarga, instrumen industri hiburan, bahkan komoditas ekonomi dalam budaya konsumsi modern.

Media massa dan industri kapitalisme modern memperkuat kondisi tersebut melalui penciptaan standar kecantikan yang sempit dan seragam. Tubuh perempuan terus dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan citra ideal yang dikonstruksi industri. Perempuan didorong untuk terus mengontrol tubuhnya melalui produk kecantikan, diet, mode, hingga berbagai standar visual yang sering tidak realistis.

Dalam situasi tersebut, tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek budaya, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme ekonomi. Industri kecantikan, fashion, hiburan, dan media memperoleh keuntungan besar dari kecemasan perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Tubuh perempuan akhirnya diperlakukan sebagai ruang

konsumsi yang terus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi industri kapitalisme modern.

Namun, kontrol terhadap tubuh perempuan tidak hanya bekerja melalui industri dan budaya populer. Negara dan institusi sosial juga sering ikut menentukan bagaimana tubuh perempuan harus diatur. Kebijakan terkait reproduksi, moralitas, seksualitas, hingga peran sosial perempuan menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering diposisikan sebagai wilayah yang dapat diintervensi oleh kekuasaan.

Dalam banyak kasus, perempuan bahkan mengalami pembatasan terhadap hak dasar atas tubuh mereka sendiri. Keputusan mengenai reproduksi, kesehatan, pekerjaan, hingga kebebasan bergerak sering dipengaruhi oleh norma sosial dan relasi kekuasaan yang tidak setara. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tubuh perempuan bukan sekadar persoalan biologis, tetapi juga persoalan politik.

Tubuh perempuan juga menjadi arena eksploitasi dalam dunia kerja modern. Banyak perempuan bekerja dalam sektor-sektor dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan perlindungan yang minim karena tubuh perempuan dianggap lebih mudah dikendalikan dan dieksploitasi. Industri padat karya, pekerjaan domestik, hingga sektor informal banyak bergantung pada tenaga kerja perempuan yang sering tidak mendapatkan perlindungan sosial yang layak.

Dalam konteks krisis lingkungan, perempuan bahkan menghadapi bentuk kerentanan yang lebih kompleks. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim meningkatkan beban sosial perempuan, sementara tubuh mereka tetap menjadi ruang kontrol dan eksploitasi dalam sistem ekonomi maupun budaya patriarkal. Situasi ini

menunjukkan bahwa tubuh perempuan dan krisis ekologis saling berkaitan dalam struktur dominasi yang sama.

Ekofeminisme memandang bahwa pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari upaya membongkar relasi kekuasaan yang menjadikan tubuh sebagai objek penguasaan. Tubuh perempuan harus dipahami sebagai bagian dari martabat manusia yang memiliki hak atas kebebasan, keamanan, dan otonomi. Karena itu, perjuangan perempuan bukan hanya soal memperoleh ruang sosial dan politik, tetapi juga tentang merebut kembali hak atas tubuh mereka sendiri.

Perspektif ini juga menolak cara pandang yang memisahkan tubuh dari kehidupan sosial dan ekologis. Tubuh manusia sesungguhnya memiliki keterhubungan dengan lingkungan, ruang hidup, dan relasi sosial di sekitarnya. Ketika tubuh perempuan terus dieksploitasi demi kepentingan ekonomi dan budaya konsumsi, yang terjadi bukan hanya ketidakadilan gender, tetapi juga penguatan sistem yang menempatkan kehidupan sebagai komoditas.

Tubuh perempuan sebagai arena kekuasaan memperlihatkan bahwa dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Kekuasaan juga bekerja melalui norma, budaya, media, dan sistem ekonomi yang membentuk cara masyarakat memandang perempuan dan tubuh mereka. Karena itu, membicarakan tubuh perempuan berarti membicarakan relasi kekuasaan yang lebih luas tentang siapa yang memiliki hak menentukan kehidupan, dan siapa yang dipaksa menyesuaikan diri terhadap sistem yang tidak setara.

B. Patriarki dan Kontrol atas Tubuh

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam

berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam sistem ini, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat dan dipandang melalui peran-peran yang telah ditentukan oleh norma sosial. Salah satu bentuk dominasi patriarki yang paling kuat terlihat melalui kontrol terhadap tubuh perempuan.

Kontrol atas tubuh perempuan bekerja melalui berbagai mekanisme sosial yang sering kali dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan diatur melalui standar moral, aturan berpakaian, norma kesopanan, tuntutan reproduksi, hingga pembatasan terhadap ruang gerak dan kebebasan memilih. Tubuh perempuan bukan dipahami sebagai ruang otonom milik perempuan itu sendiri, melainkan sebagai wilayah yang dapat diatur oleh keluarga, masyarakat, agama, negara, bahkan pasar.

Dalam budaya patriarkal, perempuan sering dinilai berdasarkan kemampuan mereka memenuhi ekspektasi sosial tertentu. Perempuan dianggap ideal ketika mampu menjadi “baik”, “patuh”, “menjaga kehormatan”, dan menjalankan fungsi domestik sesuai norma yang berlaku. Akibatnya, tubuh perempuan terus berada dalam pengawasan sosial yang sangat kuat.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa kontrol terhadap tubuh perempuan memiliki hubungan erat dengan logika dominasi terhadap alam. Patriarki bekerja dengan cara membangun hierarki antara pihak yang dianggap superior dan pihak yang ditempatkan sebagai objek kontrol. Dalam relasi tersebut, perempuan dan alam sama-sama diposisikan sebagai sesuatu yang dapat diatur demi kepentingan kekuasaan.

Tubuh perempuan sering dikaitkan dengan fungsi biologis dan reproduksi. Perempuan dianggap memiliki “kodrat” tertentu yang kemudian dijadikan dasar pembatasan peran sosial mereka. Pandangan ini membuat

perempuan lebih banyak diarahkan pada ruang domestik dan kerja-kerja perawatan, sementara ruang publik dan pengambilan keputusan lebih didominasi oleh laki-laki.

Padahal, apa yang disebut sebagai “kodrat” sering kali merupakan konstruksi sosial yang dibentuk secara historis. Patriarki menggunakan konstruksi tersebut untuk mempertahankan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan dianggap secara alami lebih cocok berada di ruang domestik, maka pembagian kerja yang tidak adil menjadi terlihat normal dan sulit dipersoalkan.

Kontrol patriarki terhadap tubuh perempuan juga terlihat dalam persoalan seksualitas. Tubuh perempuan sering dijadikan simbol moralitas sosial, sehingga perempuan menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menjaga citra dan perilaku mereka. Dalam banyak masyarakat, perempuan yang dianggap tidak sesuai norma sosial lebih mudah mengalami stigma dan penghakiman dibandingkan laki-laki.

Selain melalui norma budaya, kontrol terhadap tubuh perempuan juga berlangsung melalui institusi ekonomi dan media. Industri modern membentuk standar tubuh ideal yang mendorong perempuan terus mengontrol penampilan mereka demi memenuhi tuntutan sosial dan pasar. Tubuh perempuan menjadi objek komersialisasi yang menghasilkan keuntungan besar bagi industri kecantikan, fashion, dan hiburan.

Dalam konteks dunia kerja, patriarki juga memengaruhi cara tubuh perempuan diperlakukan. Banyak perempuan mengalami diskriminasi berdasarkan penampilan fisik, usia, status reproduksi, atau standar kecantikan tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering tidak dipandang sebagai bagian dari

martabat manusia yang utuh, melainkan sebagai objek yang dinilai berdasarkan kebutuhan sistem sosial dan ekonomi.

Kontrol patriarki semakin kompleks ketika bersinggungan dengan kelas sosial, kemiskinan, dan krisis ekologis. Perempuan dari kelompok miskin sering mengalami keterbatasan lebih besar terhadap akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam kondisi lingkungan yang rusak, perempuan harus tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan domestik meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang berat.

Ekofeminisme mengkritik sistem patriarki karena membangun relasi yang bertumpu pada dominasi dan penguasaan. Cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek kontrol memiliki kesamaan dengan cara manusia mengeksploitasi alam demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dalam kedua relasi tersebut, kehidupan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan maupun keadilan.

Karena itu, perjuangan melawan patriarki tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu perempuan, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun relasi sosial yang lebih setara dan manusiawi. Perempuan harus memiliki hak penuh atas tubuh, pilihan hidup, dan masa depan mereka tanpa tekanan dari sistem sosial yang membatasi kebebasan tersebut.

Lebih jauh, pembebasan tubuh perempuan juga berkaitan dengan upaya membangun kehidupan yang lebih berkeadilan secara ekologis dan sosial. Ketika tubuh perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek kontrol dan eksploitasi, maka terbuka kemungkinan untuk membangun relasi yang lebih sehat antara manusia, kekuasaan, dan kehidupan itu sendiri.

Secara sederhana, patriarki dan kontrol atas tubuh menunjukkan bahwa ketidakadilan gender bekerja bukan hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui norma sosial yang membentuk cara masyarakat memandang perempuan. Karena itu, perjuangan perempuan pada dasarnya merupakan perjuangan untuk merebut kembali hak atas tubuh, suara, dan kehidupan mereka sendiri dari berbagai bentuk dominasi yang selama ini dianggap normal dalam masyarakat.

C. Relasi antara Eksploitasi Alam dan Eksploitasi Perempuan

Salah satu gagasan paling mendasar dalam Ekofeminisme adalah adanya keterhubungan antara eksploitasi terhadap alam dan eksploitasi terhadap perempuan. Keduanya tidak dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari struktur dominasi yang sama, yaitu sistem patriarki dan kapitalisme yang bertumpu pada penguasaan, kontrol, serta eksploitasi terhadap kehidupan.

Dalam sejarah modernitas, alam dipandang sebagai objek yang harus ditaklukkan demi kemajuan manusia. Hutan ditebang, tanah dieksploitasi, sungai dikendalikan, dan laut dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Cara pandang tersebut berkembang bersamaan dengan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat yang dianggap lebih dekat dengan alam, emosi, dan tubuh biologis.

Relasi tersebut kemudian membentuk hierarki sosial yang menempatkan laki-laki, rasionalitas, dan kekuasaan sebagai posisi dominan, sementara perempuan dan alam ditempatkan sebagai objek yang dapat dikendalikan. Dalam sistem ini, baik alam maupun perempuan diperlakukan sebagai sumber daya yang keberadaannya diukur

berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial bagi pihak yang memiliki kekuasaan.

Perempuan sering diasosiasikan dengan fungsi reproduksi, pengasuhan, dan kerja-kerja domestik yang dianggap “alami”. Pada saat yang sama, alam dipahami sebagai penyedia sumber kehidupan yang terus dieksploitasi demi menopang sistem produksi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, baik perempuan maupun alam sama-sama mengalami proses pemanfaatan yang tidak disertai penghargaan dan perlindungan yang setara.

Vandana Shiva menjelaskan bahwa model pembangunan modern telah menciptakan bentuk kolonialisasi baru terhadap alam dan perempuan. Revolusi industri, kapitalisme global, dan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam menyebabkan masyarakat kehilangan hubungan yang seimbang dengan lingkungan. Dalam situasi tersebut, perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka memiliki keterhubungan langsung dengan kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, air, dan ruang hidup.

Eksploitasi terhadap perempuan dan alam juga bekerja melalui logika produksi kapitalisme modern. Alam dipaksa terus menghasilkan sumber daya tanpa henti, sementara tubuh dan tenaga perempuan dimanfaatkan untuk menopang sistem ekonomi yang tidak adil. Kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan sering dianggap tidak produktif karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung, padahal kerja tersebut merupakan fondasi utama keberlangsungan kehidupan sosial.

Dalam dunia kerja modern, perempuan banyak ditempatkan pada sektor-sektor dengan upah rendah dan perlindungan minim. Industri padat karya, pekerjaan

domestik, hingga sektor informal banyak bergantung pada tenaga kerja perempuan yang mudah dieksploitasi. Situasi ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan diposisikan sebagai instrumen produksi dalam sistem ekonomi kapitalistik.

Hal yang sama terjadi terhadap alam. Sistem ekonomi modern terus mendorong eksploitasi sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan pasar global. Hutan dibuka untuk industri, tanah dipaksa menghasilkan komoditas monokultur, dan laut dieksploitasi demi kepentingan perdagangan internasional. Dalam logika tersebut, keberlanjutan kehidupan sering dikorbankan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Perspektif ekofeminisme melihat bahwa dominasi terhadap perempuan dan alam bekerja melalui cara pandang yang sama, yaitu objektifikasi kehidupan. Alam dipandang sekadar sebagai bahan baku, sementara perempuan dipandang berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi sistem sosial maupun ekonomi. Ketika kehidupan direduksi menjadi objek produksi dan konsumsi, maka eksploitasi menjadi sesuatu yang dianggap normal.

Relasi ini juga terlihat dalam berbagai konflik lingkungan. Ketika tambang, perkebunan besar, atau proyek industri masuk ke wilayah masyarakat, perempuan sering mengalami dampak yang berlapis. Mereka kehilangan akses terhadap sumber air, lahan pertanian, dan ruang hidup, tetapi pada saat yang sama tetap harus mempertahankan keberlangsungan keluarga di tengah krisis sosial-ekologis yang terjadi.

Namun demikian, perempuan juga menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankan lingkungan. Di banyak wilayah, perempuan berada di garis depan dalam gerakan menjaga hutan, mempertahankan sumber air, melawan pencemaran, dan menolak eksploitasi sumber

daya alam yang merusak kehidupan komunitas. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun keberlanjutan hidup.

Ekofeminisme tidak bermaksud menyamakan perempuan dengan alam secara biologis, melainkan menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mengalami subordinasi dalam sistem dominasi modern. Karena itu, perjuangan membela perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan membela lingkungan. Selama sistem sosial dan ekonomi masih bertumpu pada eksploitasi terhadap kehidupan, maka ketidakadilan terhadap perempuan dan kerusakan ekologis akan terus berlangsung secara bersamaan.

Relasi antara eksploitasi alam dan eksploitasi perempuan memperlihatkan bahwa krisis ekologis dan ketidakadilan gender memiliki akar persoalan yang saling berkaitan. Keduanya lahir dari sistem yang lebih menghargai kekuasaan dan keuntungan dibandingkan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, membangun keadilan ekologis berarti juga membangun relasi sosial yang lebih setara, manusiawi, dan menghormati kehidupan dalam seluruh bentuknya.

D. Konsumerisme, Industri, dan Perempuan

Perkembangan kapitalisme modern tidak hanya mengubah cara manusia memproduksi barang, tetapi juga membentuk budaya konsumsi yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Konsumerisme berkembang melalui dorongan untuk terus membeli, menggunakan, dan mengganti berbagai produk demi memenuhi standar gaya hidup tertentu. Dalam sistem ini, manusia tidak lagi diposisikan hanya sebagai warga negara atau individu sosial, tetapi juga sebagai konsumen yang terus diarahkan

untuk mempertahankan siklus pasar dan pertumbuhan ekonomi.

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling sering dijadikan target utama dalam budaya konsumsi modern. Industri kecantikan, fashion, hiburan, media, hingga produk rumah tangga membangun citra ideal tentang perempuan yang cantik, sempurna, modern, dan sesuai dengan standar pasar. Akibatnya, tubuh dan identitas perempuan terus dikonstruksi melalui logika konsumsi yang tidak pernah selesai.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa budaya konsumerisme tidak dapat dipisahkan dari sistem kapitalisme yang bertumpu pada eksploitasi manusia dan alam secara bersamaan. Untuk mempertahankan pasar, industri membutuhkan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar sekaligus menciptakan kebutuhan konsumsi baru secara terus-menerus. Dalam situasi tersebut, perempuan sering dijadikan sasaran utama sekaligus instrumen pemasaran industri modern.

Media dan industri membentuk standar kecantikan yang sangat sempit dan sering tidak realistis. Kulit putih, tubuh langsing, wajah tertentu, dan penampilan yang sesuai tren pasar dijadikan ukuran ideal tentang perempuan. Standar tersebut menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang membuat banyak perempuan merasa harus terus memperbaiki tubuh mereka agar dianggap layak dan diterima secara sosial.

Akibatnya, tubuh perempuan menjadi ruang konsumsi yang sangat menguntungkan bagi industri. Produk kecantikan, perawatan tubuh, fashion, diet, hingga prosedur estetika berkembang menjadi pasar global bernilai sangat besar. Perempuan didorong untuk terus membeli produk demi memenuhi citra ideal yang sebenarnya dibentuk oleh industri itu sendiri.

Konsumerisme juga memperkuat objektifikasi terhadap perempuan. Tubuh perempuan sering digunakan sebagai alat promosi dan simbol komersial dalam berbagai bentuk iklan maupun media populer. Perempuan diposisikan bukan sebagai individu yang utuh, tetapi sebagai citra visual yang dapat menarik perhatian pasar dan meningkatkan keuntungan industri.

Di sisi lain, budaya konsumsi modern memiliki dampak ekologis yang sangat besar. Industri fashion cepat (*fast fashion*), misalnya, menjadi salah satu sektor yang menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan dalam jumlah besar. Produksi massal pakaian membutuhkan eksploitasi air, energi, bahan kimia, dan tenaga kerja murah dalam skala luas. Namun, di balik industri tersebut, perempuan justru banyak menjadi pekerja dengan kondisi kerja yang rentan dan perlindungan minim.

Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi paradoksal dalam budaya konsumerisme modern. Di satu sisi mereka dijadikan target pasar dan simbol konsumsi, tetapi di sisi lain juga menjadi kelompok tenaga kerja yang dieksploitasi untuk mempertahankan industri tersebut. Tubuh perempuan dijadikan komoditas visual, sementara tenaga kerja perempuan dimanfaatkan untuk menjaga efisiensi produksi kapitalisme global.

Budaya konsumsi juga memengaruhi cara perempuan memandang diri mereka sendiri. Nilai perempuan sering diukur berdasarkan penampilan fisik dan kemampuan mengikuti standar gaya hidup tertentu. Akibatnya, perempuan menghadapi tekanan sosial yang besar untuk terus memenuhi ekspektasi pasar, bahkan ketika standar tersebut sering tidak sehat maupun tidak realistis.

Ekofeminisme mengkritik budaya konsumerisme karena membangun relasi kehidupan yang bertumpu pada

eksploitasi dan ketidakberlanjutan. Alam terus dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan industri, sementara manusia didorong untuk terus mengonsumsi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologisnya. Dalam sistem tersebut, perempuan menjadi bagian dari mekanisme pasar yang mengubah kehidupan menjadi komoditas ekonomi.

Karena itu, kritik terhadap konsumerisme bukan sekadar ajakan untuk mengurangi konsumsi individu, tetapi juga kritik terhadap sistem ekonomi yang membangun keuntungan melalui penciptaan kebutuhan semu dan eksploitasi kehidupan. Dibutuhkan cara pandang baru yang tidak menempatkan manusia dan alam sebagai objek pasar semata, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Konsumerisme dan industri modern memperlihatkan bagaimana kapitalisme bekerja tidak hanya melalui produksi barang, tetapi juga melalui pembentukan identitas sosial manusia. Perempuan terus diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan standar pasar, sementara alam terus dieksploitasi demi mempertahankan budaya konsumsi yang tidak berkelanjutan. Karena itu, membangun kesadaran ekologis juga berarti membangun kesadaran kritis terhadap budaya konsumsi yang selama ini dianggap normal dalam kehidupan modern.

E. Politik Perawatan (*Politics of Care*)

Di tengah sistem sosial dan ekonomi modern yang bertumpu pada kompetisi, produktivitas, dan pertumbuhan tanpa batas, praktik-praktik perawatan sering dipandang sebagai sesuatu yang kecil, domestik, dan tidak memiliki nilai politik yang penting. Aktivitas merawat anak, menjaga keluarga, menyediakan makanan, membersihkan rumah, menjaga lingkungan, hingga memastikan keberlangsungan

hidup sehari-hari sering dianggap sebagai tanggung jawab pribadi yang berada di luar persoalan politik dan ekonomi. Padahal, seluruh kehidupan sosial manusia bergantung pada kerja-kerja perawatan tersebut.

Perspektif Ekofeminisme memandang bahwa praktik merawat bukan sekadar aktivitas domestik, melainkan fondasi utama keberlangsungan kehidupan. Politik perawatan (*politics of care*) lahir dari kesadaran bahwa kehidupan manusia pada dasarnya dibangun melalui relasi saling bergantung, saling menjaga, dan saling merawat. Tanpa praktik-praktik tersebut, masyarakat tidak akan mampu bertahan.

Dalam sistem patriarki dan kapitalisme modern, kerja perawatan sering dibebankan kepada perempuan dan dianggap sebagai sesuatu yang “alami”. Perempuan diharapkan mengurus rumah tangga, merawat anak, menjaga anggota keluarga, sekaligus memastikan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Namun, kerja tersebut sering tidak dihargai sebagai bentuk kerja sosial yang penting karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung.

Padahal, kerja perawatan merupakan fondasi yang memungkinkan sistem ekonomi berjalan. Pekerja dapat bekerja karena ada seseorang yang merawat rumah, menyediakan makanan, menjaga anak, dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Namun ironisnya, sistem ekonomi modern justru lebih menghargai aktivitas produksi dibandingkan kerja-kerja reproduktif dan perawatan.

Politik perawatan hadir sebagai kritik terhadap cara pandang tersebut. Perspektif ini menolak logika pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Politik perawatan mengajak

masyarakat untuk menempatkan kehidupan sebagai pusat dari pembangunan, bukan sekadar keuntungan dan akumulasi modal.

Dalam konteks ekologi, praktik merawat juga berkaitan dengan cara manusia membangun hubungan dengan alam. Alam tidak seharusnya dipandang sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai ruang kehidupan yang membutuhkan tanggung jawab dan keberlanjutan. Menjaga air, tanah, hutan, pangan, dan lingkungan merupakan bagian dari praktik perawatan terhadap kehidupan bersama.

Politik perawatan juga menekankan pentingnya solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern yang semakin individualistik, hubungan antarmanusia sering dibangun berdasarkan kompetisi dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab kolektif semakin melemah. Politik perawatan menawarkan cara pandang yang berbeda, yaitu membangun kehidupan melalui relasi yang lebih empatik, setara, dan saling menopang.

Perempuan memiliki pengalaman penting dalam praktik perawatan karena mereka selama ini berada sangat dekat dengan kerja-kerja menjaga kehidupan sehari-hari. Namun, politik perawatan tidak bermaksud membebankan tanggung jawab merawat hanya kepada perempuan. Sebaliknya, perspektif ini menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kehidupan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Dalam konteks krisis ekologis dan ketimpangan sosial global, politik perawatan menjadi semakin relevan. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial menunjukkan bahwa model pembangunan modern telah menciptakan kehidupan yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Karena itu, diperlukan

paradigma baru yang lebih menghargai keberlangsungan hidup dibandingkan sekadar pertumbuhan ekonomi.

Politik perawatan juga memiliki dimensi etis dan politik yang sangat kuat. Merawat kehidupan berarti menolak sistem yang menjadikan manusia dan alam sebagai komoditas ekonomi semata. Merawat berarti mempertahankan martabat manusia, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membangun masyarakat yang lebih adil secara sosial maupun ekologis.

Politik perawatan mengajarkan bahwa kekuatan terbesar dalam kehidupan bukan terletak pada dominasi dan penguasaan, melainkan pada kemampuan menjaga dan mempertahankan kehidupan bersama. Dalam dunia yang semakin dipenuhi krisis ekologis dan ketimpangan sosial, praktik merawat justru menjadi bentuk perlawanan yang paling mendasar terhadap sistem yang mengabaikan keberlangsungan hidup manusia dan alam.[]





BRANDED
TECH
PUBLISHER



BAB V

PEREMPUAN, ALAM, DAN KEARIFAN LOKAL

A. Perempuan Adat sebagai Penjaga Ekologi

Di berbagai wilayah dunia, masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Hutan, sungai, tanah, laut, dan seluruh ruang hidup tidak dipandang sekadar sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, dan historis. Dalam relasi tersebut, perempuan adat memiliki posisi yang sangat penting sebagai penjaga pengetahuan ekologis sekaligus pelindung keberlangsungan komunitas.

Perempuan adat bukan hanya menjalankan peran domestik dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga terlibat aktif dalam menjaga sumber pangan, mengelola air, mempertahankan benih lokal, merawat hutan, hingga menjaga keseimbangan relasi antara manusia dan alam. Pengalaman hidup mereka yang sangat dekat dengan lingkungan membuat perempuan adat memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai musim, tanaman, pola ekologi, serta cara mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam secara turun-temurun.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa pengalaman perempuan adat memperlihatkan bentuk relasi kehidupan yang berbeda dengan logika pembangunan modern. Jika kapitalisme modern memandang alam sebagai objek eksploitasi, maka komunitas adat cenderung membangun hubungan yang lebih berbasis pada keseimbangan dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, perempuan adat memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni kehidupan komunitas dengan lingkungannya.

Di banyak komunitas adat, perempuan menjadi penjaga utama sistem pangan lokal. Mereka mengetahui jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam dalam kondisi tertentu, memahami cara menyimpan dan mempertahankan benih, serta menjaga keberagaman pangan yang menopang ketahanan komunitas. Pengetahuan tersebut tidak lahir dari sistem pendidikan formal, melainkan diwariskan melalui pengalaman hidup yang berlangsung selama generasi.

Selain itu, perempuan adat juga memiliki peran penting dalam menjaga sumber air dan kawasan hutan. Banyak komunitas adat memiliki aturan adat yang mengatur cara memanfaatkan alam secara bijaksana agar tidak merusak keseimbangan ekologis. Dalam praktik tersebut, perempuan sering menjadi pihak yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, posisi perempuan adat sering menghadapi ancaman serius akibat ekspansi pembangunan modern dan kapitalisme ekstraktif. Pembukaan tambang, perkebunan skala besar, pembangunan industri, dan perampasan wilayah adat menyebabkan banyak komunitas kehilangan ruang hidupnya. Ketika hutan dibuka dan sumber air tercemar, perempuan adat menjadi kelompok yang paling cepat

merasakan dampaknya karena kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada keberadaan lingkungan yang sehat.

Hilangnya wilayah adat tidak hanya berarti hilangnya sumber ekonomi, tetapi juga hilangnya identitas budaya dan pengetahuan ekologis yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Ketika masyarakat dipaksa meninggalkan ruang hidupnya, relasi sosial dan budaya yang menopang kehidupan komunitas ikut mengalami kerusakan. Dalam situasi tersebut, perempuan adat sering berada pada posisi paling rentan karena mereka harus mempertahankan keberlangsungan keluarga di tengah perubahan sosial-ekologis yang drastis.

Meskipun menghadapi berbagai tekanan, perempuan adat juga menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankan lingkungan dan hak komunitas. Di berbagai wilayah, perempuan adat berada di garis depan dalam menolak perusakan hutan, mempertahankan sumber air, dan melawan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kehidupan komunitas mereka. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan adat tidak hanya menjadi korban dari krisis ekologis, tetapi juga aktor utama dalam mempertahankan keberlanjutan hidup.

Perempuan adat sering menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan lingkungan. Mereka tidak hanya berbicara mengenai kerusakan ekologis dalam bahasa hukum atau ekonomi, tetapi juga melalui pengalaman hidup, relasi budaya, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Alam dipandang bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.

Pandangan tersebut menjadi kritik penting terhadap model pembangunan modern yang terlalu menekankan

eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi. Pengalaman perempuan adat menunjukkan bahwa keberlanjutan kehidupan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menjaga keseimbangan ekologis dan relasi sosial komunitas. Ekofeminisme melihat bahwa perjuangan perempuan adat merupakan bentuk politik kehidupan yang sangat penting di tengah krisis ekologis global. Ketika dunia modern terus mendorong eksploitasi tanpa batas, perempuan adat justru mempertahankan praktik hidup yang lebih menghargai keberlanjutan dan keterhubungan manusia dengan alam.

Namun, suara perempuan adat sering kali masih dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan pembangunan. Kebijakan negara maupun proyek investasi sering dibuat tanpa melibatkan komunitas secara adil, termasuk perempuan sebagai pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam menjaga lingkungan. Akibatnya, pembangunan sering berjalan dengan mengorbankan masyarakat lokal demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Karena itu, pengakuan terhadap peran perempuan adat tidak cukup dilakukan secara simbolis semata. Dibutuhkan perlindungan nyata terhadap wilayah adat, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan pembangunan. Sebab menjaga perempuan adat berarti juga menjaga pengetahuan ekologis dan keberlanjutan kehidupan yang selama ini mereka pertahankan.

Perempuan adat memperlihatkan bahwa relasi manusia dengan alam tidak selalu harus dibangun melalui dominasi dan eksploitasi. Melalui pengalaman hidup dan praktik keseharian mereka, perempuan adat menunjukkan bahwa menjaga lingkungan sesungguhnya adalah cara

menjaga kehidupan itu sendiri. Dalam dunia yang semakin dipenuhi krisis ekologis, pengetahuan dan perjuangan perempuan adat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana manusia dapat hidup lebih seimbang dengan alam dan sesama.

B. Pengetahuan Lokal dan Kelestarian Lingkungan

Di tengah krisis ekologis global yang semakin kompleks, pengetahuan lokal menjadi salah satu sumber kebijaksanaan yang memiliki nilai sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengetahuan lokal merupakan kumpulan pengalaman, praktik, dan nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat melalui hubungan panjang mereka dengan alam. Pengetahuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai cara bertahan hidup, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun relasi yang lebih seimbang antara manusia dan lingkungan.

Dalam banyak komunitas tradisional dan masyarakat adat, pengetahuan lokal diwariskan secara turun-temurun melalui praktik kehidupan sehari-hari. Cara bertani, mengelola air, menjaga hutan, membaca musim, hingga memanfaatkan tanaman obat berkembang melalui pengalaman kolektif masyarakat selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini lahir bukan dari eksploitasi terhadap alam, melainkan dari upaya memahami ritme ekologis dan menjaga keberlanjutan kehidupan komunitas.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa pengetahuan lokal memiliki keterkaitan erat dengan pengalaman perempuan dalam menjaga kehidupan sehari-hari. Perempuan sering menjadi penjaga pengetahuan tentang pangan, benih, tanaman obat, pola musim, serta praktik merawat lingkungan yang diwariskan secara sosial dan budaya. Karena itu, perempuan memiliki peran penting

dalam mempertahankan keberlanjutan pengetahuan ekologis di tingkat komunitas.

Berbeda dengan logika pembangunan modern yang bertumpu pada produksi massal dan eksploitasi sumber daya alam, pengetahuan lokal umumnya berkembang berdasarkan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Banyak komunitas memiliki aturan adat mengenai waktu panen, larangan merusak kawasan tertentu, pembatasan eksploitasi sumber daya, hingga praktik pertanian yang mempertahankan kesuburan tanah secara alami. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan adanya kesadaran bahwa kehidupan manusia bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan ekologis.

Dalam konteks pertanian, misalnya, masyarakat lokal sering mengembangkan sistem tanam yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Penggunaan benih lokal, pola tanam beragam, serta pengelolaan lahan yang tidak eksploitatif membantu menjaga ketahanan pangan sekaligus keberlanjutan ekologis. Praktik-praktik semacam ini menjadi sangat penting di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.

Pengetahuan lokal juga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Banyak komunitas tradisional memiliki pengetahuan mengenai jenis-jenis tanaman pangan, tanaman obat, serta ekosistem lokal yang tidak terdokumentasi dalam sistem pengetahuan modern. Ketika pengetahuan tersebut hilang akibat modernisasi dan eksploitasi lingkungan, maka masyarakat bukan hanya kehilangan tradisi budaya, tetapi juga kehilangan sumber pengetahuan penting bagi keberlanjutan kehidupan.

Namun demikian, pengetahuan lokal sering dipandang rendah dalam sistem pembangunan modern. Modernisasi cenderung menempatkan ilmu pengetahuan

teknokratis sebagai satu-satunya sumber legitimasi dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Akibatnya, pengalaman hidup masyarakat lokal sering dianggap tidak ilmiah, tradisional, atau tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Padahal, banyak krisis ekologis justru lahir dari model pembangunan modern yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar, industrialisasi pertanian, penggunaan bahan kimia berlebihan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung ekologis menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan keberlanjutan hidup. Dalam situasi tersebut, pengetahuan lokal menawarkan perspektif alternatif mengenai cara manusia membangun hubungan dengan alam. Pengetahuan tersebut tidak berorientasi pada eksploitasi tanpa batas, tetapi lebih menekankan tanggung jawab, keterhubungan, dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pengetahuan lokal. Dalam banyak komunitas, perempuan menjadi pihak yang mempertahankan praktik pangan tradisional, pengobatan alami, pengelolaan rumah tangga yang ramah lingkungan, hingga pendidikan nilai-nilai ekologis kepada generasi berikutnya. Namun ironisnya, peran tersebut sering tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam sistem pembangunan modern.

Modernisasi dan ekspansi industri juga menghadirkan ancaman serius terhadap keberlangsungan pengetahuan lokal. Ketika hutan hilang, wilayah adat rusak, dan masyarakat dipaksa meninggalkan ruang hidupnya, maka pengetahuan ekologis yang berkembang selama generasi ikut mengalami kepunahan. Situasi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya

menghancurkan ekosistem, tetapi juga menghancurkan memori kolektif dan kebijaksanaan hidup masyarakat.

Karena itu, menjaga pengetahuan lokal bukan sekadar upaya melestarikan tradisi budaya, tetapi juga bagian penting dalam membangun masa depan ekologis yang lebih berkelanjutan. Pengetahuan lokal dapat menjadi sumber pembelajaran penting dalam menghadapi perubahan iklim, krisis pangan, dan berbagai persoalan lingkungan kontemporer. Ekofeminisme menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus menghargai pengalaman hidup masyarakat lokal, terutama perempuan, sebagai bagian dari pengetahuan yang sah dan penting. Keberlanjutan lingkungan tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan teknis dan ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan penghormatan terhadap cara hidup dan kebijaksanaan komunitas yang telah lama menjaga hubungan harmonis dengan alam.

Pengetahuan lokal memperlihatkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Dalam dunia modern yang semakin dipenuhi krisis ekologis, kearifan lokal menjadi pengingat bahwa keberlanjutan kehidupan tidak selalu lahir dari eksploitasi dan pertumbuhan tanpa batas, tetapi justru dari kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial secara bersama-sama.

C. Spiritualitas Alam dalam Kehidupan Perempuan

Bagi banyak komunitas tradisional dan masyarakat adat, alam tidak dipahami sekadar sebagai ruang fisik yang menyediakan sumber daya kehidupan. Alam juga memiliki makna spiritual yang mendalam dan menjadi bagian dari cara manusia memahami keberadaan dirinya di dunia. Gunung, sungai, laut, hutan, tanah, dan berbagai unsur alam lainnya sering dipandang sebagai bagian dari

kehidupan yang sakral, memiliki roh, dan harus diperlakukan dengan hormat. Dalam relasi tersebut, perempuan memiliki posisi penting sebagai penjaga nilai-nilai spiritual sekaligus penghubung antara kehidupan sosial dan alam.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa spiritualitas alam menghadirkan cara pandang yang berbeda dengan logika modernitas yang cenderung memisahkan manusia dari lingkungan. Jika sistem kapitalisme modern memandang alam sebagai komoditas ekonomi, maka spiritualitas ekologis memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki makna intrinsik dan tidak dapat direduksi hanya berdasarkan nilai material.

Dalam banyak tradisi lokal, perempuan memiliki keterhubungan yang sangat erat dengan praktik-praktik spiritual yang berkaitan dengan alam. Mereka terlibat dalam ritual pertanian, penghormatan terhadap sumber air, penjagaan hutan adat, hingga berbagai bentuk tradisi yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi cara komunitas membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Spiritualitas alam pada dasarnya lahir dari pengalaman hidup manusia yang menyadari ketergantungannya terhadap lingkungan. Manusia membutuhkan air, tanah, udara, dan pangan untuk bertahan hidup. Karena itu, alam dipahami bukan sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keberlanjutannya.

Perempuan sering menjadi penjaga nilai-nilai tersebut melalui praktik kehidupan sehari-hari maupun pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Mereka mengajarkan penghormatan terhadap alam melalui tradisi

keluarga, pengelolaan pangan, penggunaan tanaman obat, hingga cara memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab. Dalam banyak komunitas, perempuan juga menjadi penjaga cerita, simbol, dan nilai budaya yang berkaitan dengan relasi manusia dan alam.

Namun demikian, spiritualitas ekologis sering dipinggirkan dalam pembangunan modern yang lebih mengutamakan rasionalitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Cara pandang modern cenderung memisahkan manusia dari alam dan menempatkan lingkungan hanya sebagai instrumen produksi. Akibatnya, hubungan emosional dan spiritual masyarakat terhadap lingkungan semakin melemah. Ketika alam hanya dipandang berdasarkan nilai ekonominya, maka kerusakan ekologis menjadi lebih mudah dibenarkan atas nama pembangunan dan investasi. Hutan dapat ditebang demi industri, sungai dapat dicemari demi produksi, dan tanah dapat dirampas demi kepentingan pasar. Dalam situasi tersebut, spiritualitas alam menghadirkan kritik penting terhadap cara manusia modern membangun relasi dengan lingkungan.

Ekofeminisme melihat bahwa hilangnya spiritualitas ekologis berkaitan erat dengan berkembangnya budaya dominasi terhadap alam dan kehidupan. Ketika manusia tidak lagi memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, maka eksploitasi menjadi sesuatu yang dianggap normal. Dalam konteks tersebut, spiritualitas bukan hanya persoalan keyakinan, tetapi juga cara membangun etika ekologis dan tanggung jawab sosial terhadap kehidupan bersama.

Perempuan memiliki kontribusi penting dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut, terutama di tengah dunia modern yang semakin individualistik dan materialistik. Melalui pengalaman hidup dan praktik keseharian mereka,

perempuan sering mempertahankan relasi yang lebih dekat dengan praktik merawat kehidupan dan menjaga keseimbangan ekologis. Namun, penting untuk dipahami bahwa ekofeminisme tidak memandang perempuan secara esensial sebagai “makhluk yang secara alami lebih spiritual”. Perspektif ini lebih menekankan bahwa pengalaman sosial perempuan yang dekat dengan kerja-kerja perawatan kehidupan membuat mereka memiliki pengalaman ekologis yang berbeda dalam memahami relasi manusia dan alam.

Spiritualitas alam juga mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak berdiri sendiri. Manusia hidup dalam jaringan relasi yang saling bergantung dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Kesadaran tersebut penting di tengah krisis ekologis global yang memperlihatkan bagaimana kerusakan lingkungan pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup manusia sendiri.

Spiritualitas alam dalam kehidupan perempuan memperlihatkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga persoalan nilai, etika, dan cara manusia memaknai kehidupan. Dalam dunia yang semakin dipenuhi eksploitasi dan krisis ekologis, spiritualitas ekologis menjadi pengingat bahwa keberlanjutan hidup hanya dapat tercipta ketika manusia mampu membangun hubungan yang lebih hormat, peduli, dan bertanggung jawab terhadap alam dan sesama.

D. Praktik Merawat Alam dalam Kehidupan Sehari-hari

Merawat alam tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan besar atau kebijakan lingkungan berskala nasional. Dalam banyak situasi, praktik menjaga lingkungan justru berlangsung melalui aktivitas sederhana dan keseharian masyarakat. Cara mengelola air, memilih pangan, menjaga

kebersihan lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, hingga mempertahankan pola hidup yang tidak berlebihan merupakan bagian dari praktik ekologis yang memiliki dampak penting terhadap keberlanjutan kehidupan.

Dalam perspektif Ekofeminisme, praktik merawat kehidupan sehari-hari memiliki makna politik dan ekologis yang sangat penting. Aktivitas yang sering dianggap kecil dan domestik sesungguhnya menjadi fondasi utama keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Karena itu, merawat alam bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga besar, tetapi juga bagian dari relasi keseharian manusia dengan ruang hidupnya.

Perempuan memiliki peran yang sangat dekat dengan praktik-praktik tersebut karena pengalaman sosial mereka sering berkaitan langsung dengan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Dalam banyak keluarga dan komunitas, perempuan terlibat dalam pengelolaan pangan, penggunaan air, pengolahan limbah rumah tangga, hingga menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. Aktivitas tersebut membentuk pengetahuan ekologis yang berkembang melalui pengalaman hidup sehari-hari.

Di berbagai komunitas lokal, praktik merawat alam terlihat dalam cara masyarakat mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Penggunaan benih lokal, pertanian tanpa bahan kimia berlebihan, penghematan air, pemanfaatan bahan alami, hingga kebiasaan tidak mengambil sumber daya secara berlebihan merupakan bagian dari budaya ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik-praktik tersebut lahir dari kesadaran bahwa manusia hidup bergantung pada alam. Ketika sumber daya digunakan secara berlebihan, maka keseimbangan ekologis akan terganggu dan kehidupan masyarakat sendiri ikut terancam. Karena itu, banyak

komunitas tradisional membangun nilai-nilai hidup yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam kehidupan modern, praktik merawat alam sering dianggap kurang penting dibandingkan teknologi besar atau kebijakan pembangunan. Padahal, gaya hidup konsumtif dan pola produksi modern justru menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan global. Penggunaan plastik berlebihan, pemborosan energi, eksploitasi sumber daya, dan budaya konsumsi cepat memperbesar tekanan terhadap lingkungan secara terus-menerus.

Di tengah situasi tersebut, praktik merawat alam dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya eksploitasi dan konsumerisme. Memilih pola hidup yang lebih berkelanjutan berarti menolak logika pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Perempuan sering menjadi pelaku penting dalam membangun budaya ekologis di tingkat keluarga dan komunitas. Mereka mengajarkan kebiasaan hemat, menjaga kebersihan lingkungan, mengelola pangan lokal, hingga membangun solidaritas sosial dalam menghadapi persoalan lingkungan. Meskipun sering tidak terlihat sebagai aktivitas politik, praktik tersebut sesungguhnya memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan.

Ekofeminisme melihat bahwa kerja-kerja perawatan semacam ini selama ini kurang dihargai karena sistem modern lebih menekankan produktivitas ekonomi dibandingkan keberlangsungan hidup. Aktivitas yang menghasilkan keuntungan finansial dianggap lebih penting dibandingkan kerja merawat lingkungan dan komunitas. Akibatnya, praktik-praktik ekologis sehari-hari sering

dipandang sebagai tanggung jawab pribadi perempuan dan tidak dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan sosial. Padahal, tanpa praktik perawatan tersebut, kehidupan sosial tidak akan dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, hingga kualitas hidup masyarakat sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas kecil yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik merawat alam juga berkaitan dengan membangun kesadaran kolektif mengenai keterhubungan manusia dengan lingkungan. Ketika masyarakat terbiasa memperlakukan alam secara bertanggung jawab, maka terbentuk budaya ekologis yang lebih menghargai keberlanjutan dibandingkan eksploitasi. Kesadaran semacam ini menjadi sangat penting di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan global yang semakin meningkat.

Namun demikian, praktik ekologis sehari-hari tidak dapat dibebankan hanya kepada individu, terutama perempuan. Tanggung jawab menjaga lingkungan harus menjadi bagian dari sistem sosial dan kebijakan publik yang lebih luas. Negara, industri, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan sistem kehidupan yang lebih berkelanjutan dan adil secara ekologis.

Praktik merawat alam dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari relasi kecil manusia dengan lingkungan sekitarnya. Menjaga air, menghemat energi, mengelola pangan secara bijaksana, dan membangun kehidupan yang tidak berlebihan merupakan bagian dari upaya mempertahankan masa depan bersama. Dalam dunia yang semakin dipenuhi krisis ekologis, praktik merawat justru menjadi bentuk paling mendasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan bumi.

E. Ancaman Modernisasi terhadap Ruang Hidup Komunitas

Modernisasi sering dipahami sebagai simbol kemajuan dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju secara ekonomi maupun teknologi. Industrialisasi, pembangunan infrastruktur, urbanisasi, dan ekspansi investasi dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, modernisasi juga menghadirkan ancaman serius terhadap ruang hidup komunitas, terutama masyarakat adat dan kelompok lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada lingkungan.

Ruang hidup tidak hanya berarti wilayah geografis tempat masyarakat tinggal, tetapi mencakup seluruh relasi sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis yang menopang keberlangsungan komunitas. Hutan, sungai, tanah pertanian, laut, dan kawasan adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat. Ketika ruang hidup tersebut rusak atau diambil alih, yang hilang bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga sejarah, pengetahuan, dan relasi sosial yang telah dibangun selama generasi.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa modernisasi sering berjalan melalui logika dominasi terhadap alam dan komunitas lokal. Pembangunan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan menjaga keberlanjutan ekologis maupun kehidupan masyarakat. Akibatnya, ruang hidup komunitas menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar.

Ekspansi pertambangan, perkebunan monokultur, pembangunan kawasan industri, hingga proyek infrastruktur sering menyebabkan masyarakat kehilangan

akses terhadap tanah, air, dan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat dipaksa meninggalkan wilayahnya atau hidup berdampingan dengan kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan ekonomi mereka.

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dalam situasi tersebut. Ketika ruang hidup komunitas rusak, perempuan harus menghadapi hilangnya sumber pangan, krisis air, meningkatnya beban kerja domestik, serta ketidakstabilan sosial dalam keluarga dan komunitas. Namun ironisnya, suara perempuan sering kali tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Modernisasi juga menghadirkan perubahan budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang alam dan kehidupan. Nilai-nilai kolektif, solidaritas komunitas, dan praktik hidup yang berbasis keberlanjutan perlahan tergeser oleh budaya individualisme dan konsumsi modern. Alam semakin dipandang sebagai komoditas ekonomi, sementara keberhasilan hidup diukur melalui kepemilikan materi dan pertumbuhan ekonomi semata.

Perubahan tersebut menyebabkan banyak pengetahuan lokal dan praktik ekologis komunitas mulai kehilangan ruang. Generasi muda semakin jauh dari tradisi menjaga lingkungan karena sistem modern lebih menghargai teknologi industri dibandingkan kebijaksanaan lokal. Akibatnya, modernisasi tidak hanya mengubah kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mengubah cara manusia membangun hubungan dengan alam.

Dalam banyak situasi, modernisasi juga memperbesar ketimpangan sosial. Keuntungan ekonomi dari pembangunan sering terkonsentrasi pada kelompok

pemilik modal dan elite politik, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak ekologis dan sosialnya. Ketika ruang hidup masyarakat dirampas demi proyek pembangunan, masyarakat bukan hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan hak untuk menentukan masa depan hidup mereka sendiri.

Ekofeminisme mengkritik model modernisasi yang bertumpu pada eksploitasi dan pertumbuhan tanpa batas. Perspektif ini menolak cara pandang yang menempatkan alam dan komunitas lokal sebagai hambatan pembangunan yang harus disingkirkan demi kepentingan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan seharusnya dibangun di atas prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat.

Ancaman modernisasi terhadap ruang hidup komunitas juga memperlihatkan bahwa krisis ekologis berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan. Siapa yang memiliki hak menentukan penggunaan tanah, siapa yang memperoleh keuntungan dari sumber daya alam, dan siapa yang harus menanggung dampak kerusakan lingkungan merupakan pertanyaan politik yang sangat penting dalam persoalan pembangunan modern. Ancaman modernisasi terhadap ruang hidup komunitas menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu identik dengan keberlanjutan kehidupan. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan komunitas demi keuntungan ekonomi sesungguhnya sedang menciptakan krisis baru yang mengancam masa depan manusia sendiri. Karena itu, menjaga ruang hidup komunitas bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi memastikan bahwa pembangunan tetap berpihak pada kehidupan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang.[]



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BAB VI

GERAKAN PEREMPUAN DAN ADVOKASI LINGKUNGAN

A. Sejarah Gerakan Perempuan Lingkungan

Gerakan perempuan dalam isu lingkungan lahir dari pengalaman panjang ketidakadilan sosial dan ekologis yang dialami perempuan di berbagai belahan dunia. Ketika pembangunan modern semakin mendorong eksploitasi sumber daya alam, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Kerusakan hutan, pencemaran air, hilangnya lahan pertanian, dan krisis pangan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas yang banyak bergantung pada kerja-kerja perawatan perempuan.

Dari pengalaman tersebut, lahir berbagai bentuk gerakan perempuan lingkungan yang memperjuangkan keberlanjutan hidup sekaligus keadilan sosial. Gerakan ini berkembang bukan semata-mata dari ruang akademik atau teori politik, tetapi dari pengalaman nyata perempuan yang menghadapi langsung dampak kerusakan ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif Ekofeminisme kemudian

hadir untuk menjelaskan keterkaitan antara dominasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Ekofeminisme melihat bahwa sistem patriarki dan kapitalisme modern membangun relasi kekuasaan yang sama terhadap perempuan maupun lingkungan. Karena itu, perjuangan membela alam tidak dapat dipisahkan dari perjuangan membela kehidupan dan keadilan gender.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan lingkungan muncul pada dekade 1970-an ketika berbagai gerakan sosial mulai mengkritik dampak pembangunan industrial dan kerusakan ekologis global. Pada masa tersebut, perempuan di banyak negara mulai terlibat aktif dalam perjuangan lingkungan karena mereka mengalami secara langsung dampak pencemaran, krisis pangan, dan hilangnya sumber kehidupan akibat eksploitasi alam.

Di India, misalnya, muncul gerakan perempuan pedesaan yang dikenal luas melalui Gerakan Chipko. Gerakan ini lahir sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap penebangan hutan besar-besaran yang mengancam kehidupan komunitas lokal. Perempuan menjadi aktor utama dengan memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan. Aksi tersebut bukan hanya simbol perlindungan lingkungan, tetapi juga bentuk perjuangan mempertahankan ruang hidup dan keberlangsungan komunitas. Tokoh seperti Vandana Shiva kemudian memperkuat pemikiran bahwa perempuan memiliki pengalaman ekologis yang penting dalam melawan model pembangunan yang eksploitatif. Ia mengkritik revolusi hijau dan industrialisasi pertanian yang dianggap menghancurkan keberagaman hayati sekaligus meminggirkan petani kecil dan perempuan desa.

Di Kenya, gerakan perempuan lingkungan berkembang melalui perjuangan penghijauan dan

perlindungan lingkungan yang dipimpin oleh Wangari Maathai. Melalui Gerakan Green Belt, perempuan didorong untuk menanam pohon sekaligus memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka. Gerakan ini memperlihatkan bahwa perjuangan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan perjuangan pemberdayaan perempuan dan demokrasi sosial.

Dalam perkembangan berikutnya, gerakan perempuan lingkungan semakin meluas dan beragam. Perempuan terlibat dalam perjuangan melawan tambang, pembangunan industri yang merusak lingkungan, reklamasi pesisir, pencemaran sungai, hingga perubahan iklim global. Gerakan tersebut muncul baik di tingkat lokal maupun internasional dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial masing-masing.

Di banyak negara berkembang, gerakan perempuan lingkungan lahir dari komunitas akar rumput yang mempertahankan tanah, air, dan hutan dari ancaman eksploitasi industri. Sementara di tingkat global, perempuan juga aktif dalam berbagai forum internasional yang memperjuangkan keadilan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Gerakan perempuan lingkungan memiliki karakter yang khas karena perjuangan mereka sangat dekat dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Isu lingkungan tidak dipahami hanya sebagai persoalan teknis ekologis, tetapi juga berkaitan dengan pangan, kesehatan, air bersih, ruang hidup, dan keberlangsungan komunitas. Karena itu, gerakan ini sering memiliki pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pengalaman hidup masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, perempuan juga memainkan peran penting dalam berbagai perjuangan lingkungan. Perempuan adat, petani, nelayan, dan masyarakat lokal banyak terlibat dalam gerakan

mempertahankan ruang hidup dari ancaman tambang, perkebunan skala besar, pembangunan industri, dan kerusakan ekologis lainnya. Mereka memperjuangkan lingkungan bukan sekadar demi alam, tetapi demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

Namun demikian, gerakan perempuan lingkungan sering menghadapi tantangan yang berat. Aktivis perempuan tidak jarang mengalami intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan ketika memperjuangkan lingkungan. Selain menghadapi kekuatan modal dan negara, mereka juga harus berhadapan dengan budaya patriarki yang masih meminggirkan suara perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan.

Meski demikian, gerakan perempuan lingkungan terus berkembang sebagai bagian penting dari perjuangan sosial global. Di tengah krisis iklim dan kerusakan ekologis yang semakin besar, perempuan menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya persoalan konservasi alam, tetapi juga perjuangan mempertahankan kehidupan dan keadilan sosial.

Ekofeminisme melihat bahwa gerakan perempuan lingkungan menghadirkan cara pandang alternatif terhadap pembangunan. Jika sistem modern bertumpu pada eksploitasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas, maka gerakan perempuan lingkungan lebih menekankan keberlanjutan, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Sejarah gerakan perempuan lingkungan telah memperlihatkan bahwa perubahan sosial sering lahir dari keberanian komunitas kecil yang mempertahankan kehidupan di tengah tekanan kekuasaan dan modal. Perempuan membuktikan bahwa perjuangan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang mempertahankan martabat manusia, ruang hidup

komunitas, dan masa depan bumi yang lebih adil bagi semua.

B. Aktivisme Ekofeminis di Berbagai Negara

Perkembangan Ekofeminisme tidak hanya berlangsung sebagai diskursus akademik, tetapi juga tumbuh melalui berbagai bentuk gerakan sosial di banyak negara. Aktivisme ekofeminis hadir sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan dominasi patriarki yang memengaruhi kehidupan perempuan dan komunitas lokal. Meskipun memiliki konteks yang berbeda-beda, gerakan-gerakan tersebut memperlihatkan kesamaan penting, yaitu upaya mempertahankan kehidupan dari sistem pembangunan yang eksploitatif.

Di berbagai negara, perempuan terlibat aktif dalam perjuangan lingkungan karena mereka memiliki pengalaman langsung menghadapi dampak kerusakan ekologis. Krisis air, pencemaran, hilangnya tanah pertanian, kerusakan hutan, dan perubahan iklim memengaruhi kehidupan perempuan secara sangat nyata, terutama karena perempuan sering bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar keluarga dan komunitas.

Di India, aktivisme ekofeminis berkembang kuat melalui gerakan masyarakat pedesaan yang mempertahankan hutan dan pertanian lokal dari ancaman industrialisasi. Salah satu gerakan paling terkenal adalah Gerakan Chipko yang muncul pada 1970-an. Dalam gerakan ini, perempuan desa memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan oleh perusahaan kayu. Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap eksploitasi alam sekaligus kritik terhadap pembangunan yang mengorbankan masyarakat lokal.

Pemikiran Vandana Shiva juga memiliki pengaruh besar dalam gerakan lingkungan global. Ia mengkritik kapitalisme global dan industrialisasi pertanian yang dianggap merusak keanekaragaman hayati serta meminggirkan petani kecil dan perempuan desa. Melalui berbagai advokasi, Vandana Shiva memperjuangkan kedaulatan pangan, pelestarian benih lokal, dan hak komunitas atas sumber daya alam.

Di Kenya, gerakan ekofeminis berkembang melalui perjuangan penghijauan dan pemberdayaan perempuan yang dipimpin oleh Wangari Maathai. Melalui Green Belt Movement, perempuan diajak menanam pohon sebagai bentuk perlindungan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas. Gerakan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan demokrasi sosial saling berkaitan erat.

Di Amerika Serikat dan berbagai negara Barat lainnya, aktivisme ekofeminis berkembang melalui kritik terhadap budaya patriarki, kapitalisme, dan eksploitasi lingkungan. Banyak aktivis perempuan terlibat dalam gerakan anti-nuklir, perlindungan lingkungan, hak reproduksi, dan keadilan iklim. Mereka mengkritik cara pembangunan modern yang menjadikan alam dan tubuh perempuan sebagai objek kontrol serta komoditas ekonomi.

Sementara itu, di berbagai negara Amerika Latin, perempuan adat dan komunitas lokal memainkan peran penting dalam melawan eksploitasi tambang dan perusakan hutan. Perempuan menjadi aktor utama dalam mempertahankan wilayah adat, sumber air, dan ruang hidup komunitas dari ancaman perusahaan multinasional dan proyek ekstraktif negara. Perjuangan tersebut sering dilakukan melalui aksi komunitas, pendidikan rakyat, hingga gerakan hukum dan politik.

Di Indonesia, aktivisme ekofeminis berkembang melalui berbagai gerakan perempuan akar rumput yang mempertahankan lingkungan dan hak masyarakat. Perempuan Kendeng, misalnya, menjadi simbol perjuangan masyarakat melawan pembangunan industri semen yang dianggap mengancam sumber air dan ruang hidup petani. Dengan aksi yang kuat dan simbolik, perempuan menunjukkan bahwa mempertahankan lingkungan berarti mempertahankan kehidupan komunitas.

Selain itu, perempuan adat di berbagai wilayah Indonesia juga aktif memperjuangkan perlindungan hutan dan wilayah adat dari ancaman tambang, perkebunan sawit, dan eksploitasi industri lainnya. Mereka tidak hanya memperjuangkan lingkungan, tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Aktivisme ekofeminis di berbagai negara memperlihatkan bahwa perjuangan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan politik yang lebih luas. Kerusakan ekologis sering berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, dominasi korporasi, marginalisasi masyarakat lokal, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Perempuan menghadirkan pendekatan yang khas dalam gerakan lingkungan karena perjuangan mereka sering berangkat dari pengalaman menjaga kehidupan sehari-hari. Isu lingkungan dipahami bukan hanya sebagai persoalan konservasi alam, tetapi juga tentang pangan, kesehatan, air bersih, ruang hidup, dan masa depan komunitas. Namun demikian, aktivisme perempuan lingkungan sering menghadapi tantangan besar. Banyak aktivis perempuan mengalami intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, hingga stigmatisasi sosial ketika melawan proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam. Mereka harus

menghadapi kekuatan modal, negara, dan budaya patriarki secara bersamaan.

Meskipun demikian, gerakan ekofeminis terus berkembang sebagai bagian penting dari perjuangan global menghadapi krisis ekologis dan ketidakadilan sosial. Perempuan menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar tindakan konservasi, tetapi juga bentuk perjuangan mempertahankan kehidupan dari sistem yang mengutamakan keuntungan dibandingkan keberlanjutan.

Pada akhirnya, aktivisme ekofeminis di berbagai negara memperlihatkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam membangun masa depan ekologis yang lebih adil dan manusiawi. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi krisis lingkungan dan ketimpangan sosial, perjuangan perempuan menghadirkan harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi ketika kehidupan ditempatkan di atas kepentingan eksploitasi dan kekuasaan.

A. Perempuan Melawan Tambang, Deforestasi, dan Reklamasi

Konflik lingkungan pada dasarnya bukan hanya persoalan kerusakan alam, tetapi juga perebutan ruang hidup, akses sumber daya, dan hak menentukan masa depan komunitas. Dalam banyak kasus, proyek tambang, pembukaan hutan, maupun reklamasi pesisir dijalankan dengan logika pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sementara keberlangsungan sosial dan ekologis masyarakat lokal diposisikan sebagai konsekuensi yang dapat dikorbankan. Situasi inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk perlawanan masyarakat, termasuk gerakan perempuan yang muncul sebagai kekuatan penting dalam advokasi lingkungan.

Dalam perspektif Ekofeminisme, keterlibatan perempuan dalam konflik ekologis tidak lahir secara kebetulan. Perempuan sering berada pada posisi yang paling dekat dengan dampak kerusakan lingkungan karena kehidupan sehari-hari mereka berkaitan langsung dengan pengelolaan kebutuhan dasar keluarga dan komunitas. Ketika tanah rusak, sumber air hilang, atau laut tercemar, perempuan menjadi pihak yang pertama kali merasakan perubahan tersebut dalam kehidupan domestik maupun sosial.

Namun, penting dipahami bahwa perjuangan perempuan lingkungan tidak dapat direduksi hanya sebagai bentuk “naluri merawat”. Perlawanan perempuan juga merupakan tindakan politik yang lahir dari kesadaran bahwa eksploitasi sumber daya alam berkaitan erat dengan ketimpangan kekuasaan. Dalam banyak konflik lingkungan, masyarakat lokal sering tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan pembangunan ditentukan secara top-down, sementara masyarakat hanya menjadi objek yang harus menerima dampaknya.

Dalam konflik pertambangan, misalnya, persoalan utama sering kali bukan hanya pencemaran lingkungan, tetapi juga hilangnya kontrol masyarakat terhadap ruang hidup mereka sendiri. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber produksi pangan berubah menjadi kawasan industri ekstraktif. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan mengalami pencemaran. Perubahan tersebut memengaruhi struktur ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Perempuan dalam situasi seperti itu sering mengambil peran penting sebagai penjaga keberlangsungan komunitas. Mereka mengorganisasi warga, menjaga solidaritas sosial, mendokumentasikan dampak lingkungan, hingga membangun jaringan advokasi

dengan organisasi masyarakat sipil dan media. Bentuk perjuangan ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan lingkungan tidak hanya bergerak pada aspek simbolik, tetapi juga memiliki kemampuan politik dan organisasi yang kuat.

Di banyak wilayah pedesaan, perempuan menjadi pihak yang mempertahankan keberadaan lahan produktif karena mereka memahami bahwa hilangnya tanah berarti hilangnya kemandirian komunitas. Ketika masyarakat kehilangan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, ketergantungan terhadap pasar semakin meningkat dan kerentanan ekonomi masyarakat menjadi lebih besar. Karena itu, perjuangan mempertahankan lingkungan sering kali juga merupakan perjuangan mempertahankan kedaulatan hidup masyarakat.

Dalam konflik deforestasi, perempuan adat memiliki posisi yang sangat penting karena keterhubungan mereka dengan sistem pengetahuan lokal dan keberlangsungan ekologi komunitas. Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar kawasan vegetasi, tetapi bagian dari struktur sosial dan budaya yang menopang kehidupan bersama. Di dalamnya terdapat sumber pangan, pengetahuan obat-obatan, ruang spiritual, hingga identitas kolektif komunitas.

Ketika deforestasi terjadi akibat ekspansi industri atau perkebunan monokultur, perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga menghadapi perubahan sosial yang besar. Relasi komunitas terganggu, pola hidup berubah, dan ketergantungan terhadap sistem ekonomi eksternal semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut, perempuan sering menjadi penggerak penting dalam mempertahankan nilai-nilai komunitas dan keberlanjutan ekologis.

Sementara itu, dalam konflik reklamasi pesisir, perempuan pesisir menghadapi tantangan yang berbeda.

Reklamasi mengubah ruang hidup masyarakat pesisir melalui pengerukan laut, pembangunan kawasan industri, maupun proyek pariwisata yang menggeser aktivitas ekonomi tradisional masyarakat. Dampak sosial dari reklamasi sering tidak terlihat secara langsung, tetapi perlahan mengubah kehidupan komunitas pesisir secara mendalam.

Perempuan nelayan, misalnya, mengalami perubahan besar ketika hasil tangkapan menurun akibat rusaknya ekosistem laut. Aktivitas ekonomi rumah tangga terganggu, sementara biaya hidup meningkat akibat hilangnya akses terhadap sumber daya lokal. Dalam situasi tersebut, perempuan tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi, tetapi juga ketidakpastian sosial yang memengaruhi keberlangsungan keluarga dan komunitas.

Gerakan perempuan dalam konflik lingkungan juga menghadirkan pendekatan advokasi yang lebih berbasis pengalaman hidup masyarakat. Mereka menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: tentang air, pangan, kesehatan, keselamatan anak-anak, dan keberlangsungan masa depan komunitas. Pendekatan ini membuat isu lingkungan tidak lagi dipahami sebagai persoalan teknis yang jauh dari masyarakat, tetapi sebagai persoalan hidup yang sangat nyata.

Selain itu, perempuan sering menggunakan strategi perjuangan yang lebih kultural dan komunitarian. Aksi memasak bersama, doa bersama, ritual adat, pendidikan warga, hingga penguatan ekonomi komunitas menjadi bagian dari bentuk perlawanan yang memperlihatkan bahwa mempertahankan lingkungan juga berarti mempertahankan relasi sosial dan identitas kolektif masyarakat.

Meskipun demikian, perempuan pejuang lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Mereka

sering diremehkan dalam ruang pengambilan keputusan karena budaya patriarki masih memandang isu lingkungan dan politik sebagai domain laki-laki. Tidak sedikit perempuan aktivis yang mengalami intimidasi, kriminalisasi, bahkan tekanan sosial ketika terlibat dalam gerakan lingkungan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demokrasi dan keadilan sosial. Konflik ekologis bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang siapa yang memiliki hak menentukan arah pembangunan dan siapa yang harus menanggung dampaknya. Perjuangan perempuan melawan tambang, deforestasi, dan reklamasi memperlihatkan bahwa keberlanjutan lingkungan sangat berkaitan dengan keberanian masyarakat mempertahankan ruang hidupnya. Perempuan menunjukkan bahwa menjaga alam bukan semata-mata tindakan konservasi, tetapi bentuk pertahanan terhadap kehidupan, identitas komunitas, dan hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang layak.

C. Media, Edukasi, dan Kampanye Lingkungan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara gerakan sosial membangun advokasi dan memengaruhi kesadaran publik, termasuk dalam isu lingkungan. Jika pada masa sebelumnya perjuangan masyarakat banyak bergantung pada mobilisasi langsung di lapangan, maka saat ini media dan ruang digital menjadi arena penting dalam membentuk opini publik, memperluas solidaritas, serta memperkuat tekanan terhadap kebijakan yang merusak lingkungan.

Dalam konteks gerakan lingkungan, media tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi

juga menjadi ruang perebutan narasi. Konflik ekologis sering kali menghadirkan dua kepentingan yang berbeda: narasi pembangunan yang dikendalikan negara dan korporasi, dengan narasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Karena itu, siapa yang mampu menguasai ruang informasi akan sangat memengaruhi bagaimana publik memahami suatu persoalan lingkungan.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa penguasaan narasi menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan modern. Banyak kerusakan lingkungan dipresentasikan sebagai konsekuensi “wajar” dari pembangunan ekonomi, sementara suara masyarakat terdampak sering dipinggirkan atau dianggap menghambat kemajuan. Dalam situasi tersebut, media menjadi alat penting untuk menghadirkan pengalaman masyarakat yang selama ini tidak terlihat.

Perempuan memainkan peran penting dalam membangun narasi alternatif mengenai lingkungan. Mereka banyak menggunakan pengalaman keseharian sebagai basis advokasi: bagaimana pencemaran memengaruhi kesehatan keluarga, bagaimana hilangnya sumber air mengubah beban kerja domestik, atau bagaimana kerusakan lingkungan memengaruhi masa depan anak-anak. Pendekatan semacam ini membuat isu ekologis menjadi lebih dekat dan mudah dipahami masyarakat luas.

Berbeda dengan pendekatan teknokratis yang sering dipenuhi istilah ilmiah dan statistik, narasi perempuan dalam gerakan lingkungan cenderung lebih humanis dan berangkat dari pengalaman konkret kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena salah satu tantangan terbesar dalam isu lingkungan adalah jarak antara persoalan ekologis dengan kesadaran publik. Banyak masyarakat memahami kerusakan lingkungan sebagai sesuatu yang abstrak dan

jauh dari kehidupan mereka, padahal dampaknya sangat dekat dengan realitas sosial sehari-hari.

Media digital kemudian memperluas kemungkinan advokasi lingkungan secara lebih cepat dan luas. Dokumentasi kerusakan lingkungan, testimoni warga, kampanye daring, hingga gerakan solidaritas dapat menyebar lintas wilayah dalam waktu singkat. Platform media sosial memungkinkan masyarakat lokal yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap media arus utama untuk membangun ruang komunikasinya sendiri.

Namun, perkembangan media digital juga menghadirkan tantangan baru. Informasi mengenai lingkungan sering bersaing dengan arus konten hiburan dan konsumsi digital yang sangat cepat. Selain itu, tidak semua informasi ekologis memperoleh perhatian yang sama. Konflik lingkungan yang melibatkan komunitas kecil di daerah terpencil sering tenggelam di tengah dominasi isu politik nasional dan kepentingan ekonomi media.

Karena itu, gerakan lingkungan membutuhkan strategi komunikasi yang lebih kreatif dan partisipatif. Kampanye lingkungan tidak cukup hanya menyampaikan data kerusakan ekologis, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan emosional dan kesadaran sosial masyarakat. Seni, film dokumenter, fotografi, sastra, musik, hingga budaya populer kemudian menjadi bagian penting dalam memperluas pesan-pesan ekologis kepada publik.

Dalam banyak gerakan perempuan lingkungan, pendekatan budaya digunakan untuk memperkuat advokasi. Cerita rakyat, tradisi lokal, ritual komunitas, dan simbol-simbol keseharian dipakai untuk membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan sesuatu yang asing dari kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga membantu mempertahankan identitas komunitas di tengah tekanan modernisasi dan homogenisasi budaya.

Selain media, edukasi lingkungan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran jangka panjang. Krisis ekologis tidak hanya berkaitan dengan kebijakan negara atau industri, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya masyarakat. Cara manusia memandang konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan dengan alam sangat menentukan arah keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Karena itu, pendidikan ekologis perlu melampaui pendekatan formal yang hanya menempatkan lingkungan sebagai materi pengetahuan sekolah. Edukasi lingkungan harus membangun kesadaran kritis mengenai relasi antara gaya hidup modern, ketimpangan sosial, dan kerusakan ekologis. Masyarakat perlu memahami bahwa persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sistem ekonomi dan politik yang lebih luas.

Perempuan memiliki posisi strategis dalam proses pendidikan ekologis karena mereka banyak terlibat dalam pembentukan nilai sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Praktik sederhana seperti pengelolaan pangan, penggunaan sumber daya secara bijaksana, hingga kebiasaan hidup yang tidak berlebihan menjadi bentuk pendidikan ekologis yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Kampanye lingkungan yang efektif juga harus mampu menjangkau kelompok muda sebagai generasi yang akan menghadapi dampak krisis ekologis paling besar di masa depan. Karena itu, pendekatan edukasi perlu menggunakan bahasa dan medium yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda, termasuk melalui media digital, budaya populer, dan ruang kreatif komunitas.

Meski demikian, edukasi dan kampanye lingkungan tidak dapat berhenti pada perubahan perilaku individu semata. Kesadaran ekologis perlu diiringi dengan

keberanian mengkritik sistem pembangunan yang terus mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tanpa perubahan struktural, kampanye lingkungan berisiko hanya menjadi ajakan moral individual tanpa menyentuh akar persoalan ekologis yang sebenarnya.

Secara sederhana, media, edukasi, dan kampanye lingkungan merupakan bagian penting dari perjuangan membangun kesadaran kolektif tentang masa depan kehidupan. Di tengah dunia yang semakin didominasi logika konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, penyebaran pengetahuan ekologis menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya yang memisahkan manusia dari alam dan dari tanggung jawab sosialnya sendiri.

D. Solidaritas dan Politik Perlawanan

Gerakan lingkungan tidak pernah lahir dari perjuangan individu semata. Di balik setiap upaya mempertahankan tanah, hutan, sungai, dan ruang hidup, selalu terdapat kerja kolektif yang dibangun melalui solidaritas antarmasyarakat, antarkomunitas, dan antargerakan sosial. Solidaritas menjadi kekuatan penting karena konflik lingkungan sering memperhadapkan masyarakat dengan kekuatan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar, seperti korporasi, elite politik, maupun kebijakan pembangunan negara.

Dalam perspektif Ekofeminisme, solidaritas bukan hanya bentuk dukungan sosial, tetapi juga bagian dari politik perlawanan terhadap sistem yang menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial. Perlawanan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi terhadap alam dan masyarakat terus berlangsung.

Politik perlawanan dalam gerakan perempuan lingkungan sering tumbuh dari pengalaman hidup yang konkret. Ketika sumber air mengering, tanah pertanian rusak, wilayah tangkap nelayan hilang, atau hutan adat dibuka untuk industri, masyarakat dipaksa menghadapi ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka. Dalam situasi tersebut, solidaritas lahir bukan hanya karena kesamaan ideologi, tetapi karena kesamaan pengalaman menghadapi ketidakadilan.

Perempuan memainkan peran penting dalam membangun solidaritas komunitas. Dalam banyak gerakan lingkungan, perempuan menjadi penghubung antarkelompok masyarakat melalui kerja-kerja sosial, ruang diskusi warga, pendidikan komunitas, hingga pengorganisasian aksi bersama. Mereka membangun hubungan yang tidak hanya bertumpu pada strategi politik formal, tetapi juga melalui kedekatan emosional dan pengalaman kolektif menjaga kehidupan sehari-hari.

Solidaritas menjadi sangat penting karena konflik lingkungan sering berusaha memecah masyarakat melalui berbagai cara. Tidak jarang perusahaan atau kepentingan politik menggunakan pendekatan ekonomi untuk menciptakan perpecahan di tingkat komunitas. Sebagian masyarakat dijanjikan pekerjaan atau kompensasi tertentu, sementara kelompok yang menolak proyek pembangunan dianggap sebagai penghambat kemajuan. Dalam situasi seperti itu, menjaga persatuan komunitas menjadi tantangan yang sangat besar.

Gerakan perempuan lingkungan banyak menunjukkan bahwa solidaritas dapat dibangun melalui nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Perjuangan lingkungan tidak diposisikan sebagai kepentingan individu, tetapi sebagai upaya menjaga masa depan komunitas dan generasi berikutnya. Pendekatan ini

membuat gerakan lingkungan memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Di berbagai wilayah, solidaritas juga berkembang melampaui batas komunitas lokal. Gerakan masyarakat adat, kelompok perempuan, organisasi lingkungan, akademisi, jurnalis, mahasiswa, hingga komunitas seni sering membangun jaringan bersama untuk mendukung perjuangan lingkungan. Dukungan tersebut dapat berupa advokasi hukum, kampanye media, penggalangan dukungan publik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami tekanan akibat konflik lingkungan.

Perkembangan teknologi komunikasi turut memperluas bentuk solidaritas dalam gerakan lingkungan. Informasi mengenai konflik ekologis dapat menyebar dengan cepat melalui media digital sehingga dukungan masyarakat tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu. Kampanye solidaritas lintas daerah bahkan lintas negara memungkinkan perjuangan komunitas lokal memperoleh perhatian publik yang lebih luas.

Namun demikian, solidaritas dalam gerakan lingkungan tidak selalu mudah dibangun. Perbedaan kepentingan politik, latar belakang sosial, strategi gerakan, hingga tekanan ekonomi sering memunculkan tantangan internal dalam perjuangan kolektif. Karena itu, gerakan lingkungan membutuhkan ruang dialog dan kesadaran bersama bahwa tujuan utama perjuangan adalah mempertahankan keberlangsungan hidup dan keadilan ekologis.

Politik perlawanan dalam gerakan perempuan lingkungan juga sering menghadirkan bentuk-bentuk perjuangan yang berbeda dari politik kekuasaan formal. Perlawanan tidak selalu dilakukan melalui institusi politik resmi, tetapi juga melalui praktik budaya, pendidikan rakyat, aksi simbolik, kerja komunitas, dan penguatan solidaritas

sosial. Dalam konteks ini, kehidupan sehari-hari menjadi ruang politik yang sangat penting.

Perempuan menghadirkan bentuk politik yang lebih dekat dengan pengalaman hidup masyarakat. Isu yang diperjuangkan bukan sekadar persoalan abstrak mengenai lingkungan, tetapi berkaitan langsung dengan air bersih, pangan, kesehatan, keselamatan keluarga, dan keberlangsungan ruang hidup. Pendekatan ini membuat perjuangan lingkungan menjadi lebih membumi dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Ekofeminisme melihat bahwa politik perlawanan harus dibangun di atas prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap kehidupan. Perlawanan terhadap kerusakan lingkungan tidak cukup hanya menghentikan proyek eksploitasi tertentu, tetapi juga harus mendorong perubahan cara pandang mengenai pembangunan, relasi manusia dengan alam, dan struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan.

Karena itu, solidaritas dalam gerakan lingkungan bukan hanya strategi menghadapi konflik, tetapi juga upaya membangun alternatif kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan. Solidaritas mengajarkan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup secara individual di tengah krisis ekologis global. Keberlangsungan hidup hanya dapat dijaga melalui hubungan yang saling mendukung antara manusia, komunitas, dan lingkungan.

Di tengah dunia yang semakin dipenuhi kompetisi dan individualisme, solidaritas menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem yang memisahkan manusia dari sesamanya maupun dari alam. Ketika masyarakat bersatu mempertahankan tanah, air, hutan, dan ruang hidup, mereka sesungguhnya sedang mempertahankan nilai paling mendasar dalam kehidupan: hak untuk hidup secara bermartabat di lingkungan yang sehat dan berkeadilan.

Solidaritas dan politik perlawanan memperlihatkan bahwa perjuangan lingkungan bukan sekadar upaya menyelamatkan alam, tetapi juga perjuangan mempertahankan hubungan sosial, martabat manusia, dan masa depan bersama. Perempuan menunjukkan bahwa kekuatan gerakan tidak selalu lahir dari kekuasaan dan dominasi, melainkan dari kemampuan membangun kepedulian, kebersamaan, dan keberanian untuk menjaga kehidupan di tengah tekanan sistem yang eksploitatif.[]





BAB VII

EKOFEMINISME DI INDONESIA

A. Krisis Ekologi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan ekologis terbesar di dunia. Hutan tropis, kawasan pesisir, laut, sungai, dan keanekaragaman hayati yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai wilayah penting bagi keberlangsungan ekologi global. Namun di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi krisis lingkungan yang semakin serius dan kompleks. Deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, krisis sampah, eksploitasi tambang, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim memperlihatkan bagaimana ruang hidup masyarakat terus mengalami tekanan akibat model pembangunan yang eksploitatif.

Krisis ekologis di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis lingkungan. Kerusakan alam berkaitan erat dengan persoalan politik, ekonomi, dan ketimpangan penguasaan sumber daya.

Dalam banyak kasus, eksploitasi lingkungan berlangsung melalui kerja sama antara kekuatan modal dan kebijakan pembangunan negara yang lebih berorientasi pada investasi dibandingkan keberlanjutan hidup masyarakat.

Perspektif Ekofeminisme melihat bahwa krisis ekologis di Indonesia memperlihatkan bagaimana alam diposisikan sebagai objek eksploitasi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hutan dipandang sebagai sumber komoditas, laut sebagai ruang investasi, dan tanah sebagai aset produksi. Dalam logika tersebut, keberlanjutan ekologis sering menjadi persoalan sekunder dibandingkan kepentingan akumulasi keuntungan.

Salah satu persoalan terbesar dalam krisis ekologis Indonesia adalah tingginya laju eksploitasi sumber daya alam. Pembukaan hutan untuk industri kayu, tambang, dan perkebunan skala besar menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas. Hilangnya kawasan hutan tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga memengaruhi sistem hidrologi, meningkatkan risiko bencana ekologis, dan memperbesar kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Di banyak daerah, ekspansi industri ekstraktif berlangsung dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal dan adat. Konflik agraria meningkat ketika tanah masyarakat dialihkan untuk kepentingan industri, sementara akses komunitas terhadap sumber daya alam semakin terbatas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis di Indonesia juga merupakan krisis keadilan sosial.

Persoalan lingkungan di Indonesia juga semakin diperparah oleh model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi jangka pendek. Orientasi pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Akibatnya, kerusakan

ekologis diperlakukan sebagai konsekuensi yang dianggap “normal” dalam proses pembangunan.

Kawasan pesisir menjadi salah satu wilayah yang mengalami tekanan besar akibat pembangunan modern. Reklamasi, industrialisasi pesisir, dan pencemaran laut menyebabkan banyak komunitas nelayan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan. Kerusakan mangrove dan ekosistem laut memperburuk ketahanan ekologis wilayah pesisir, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Sementara itu, krisis iklim global semakin memperlihatkan dampaknya di Indonesia melalui cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan perubahan pola musim yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Kelompok miskin dan komunitas yang bergantung langsung pada sumber daya alam menjadi pihak yang paling rentan menghadapi situasi tersebut.

Krisis ekologis di Indonesia juga berkaitan erat dengan budaya konsumsi dan urbanisasi modern. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali, peningkatan produksi sampah, penggunaan energi fosil, dan pola konsumsi massal memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Di sisi lain, sistem ekonomi modern terus mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar global.

Namun demikian, persoalan utama bukan hanya terletak pada eksploitasi lingkungan, melainkan juga lemahnya keberpihakan terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat. Banyak kebijakan pembangunan dibuat tanpa partisipasi yang adil dari komunitas terdampak. Masyarakat lokal sering berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi dan kekuatan modal besar.

Dalam situasi tersebut, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi dampak

krisis ekologis. Beban sosial akibat kerusakan lingkungan sering jatuh pada perempuan melalui meningkatnya kerja domestik, ketidakstabilan ekonomi keluarga, hingga ancaman kesehatan dan keselamatan komunitas. Namun pada saat yang sama, perempuan juga menjadi bagian penting dari gerakan sosial yang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Ekofeminisme di Indonesia berkembang dari pengalaman konkret masyarakat menghadapi kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Perspektif ini tidak hanya mengkritik eksploitasi lingkungan, tetapi juga mempertanyakan model pembangunan yang meminggirkan masyarakat kecil dan kelompok rentan demi kepentingan ekonomi. Krisis ekologis Indonesia pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan dan arah pembangunan nasional. Pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dan siapa yang harus menanggung dampaknya menjadi sangat penting dalam memahami situasi ekologis Indonesia saat ini.

Di tengah meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun model pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Sebab tanpa perubahan cara pandang terhadap alam dan kehidupan, eksploitasi sumber daya akan terus melahirkan konflik sosial, ketimpangan ekologis, dan krisis kemanusiaan yang semakin luas di masa depan.

B. Perempuan dalam Konflik Agraria dan Lingkungan

Konflik agraria dan lingkungan di Indonesia terus meningkat seiring meluasnya ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, perkebunan skala besar, serta penguasaan lahan oleh korporasi. Persoalan ini tidak hanya

berkaitan dengan perebutan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas ruang hidup, identitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan komunitas. Dalam banyak konflik tersebut, perempuan hadir sebagai kelompok yang mengalami dampak paling kompleks sekaligus menjadi aktor penting dalam perjuangan mempertahankan lingkungan.

Konflik agraria sering dipahami hanya sebagai sengketa kepemilikan tanah, padahal persoalannya jauh lebih luas. Tanah bagi masyarakat pedesaan dan komunitas adat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi ruang sosial yang menopang kehidupan bersama. Ketika tanah dialihkan untuk kepentingan industri, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan relasi budaya, sistem sosial, dan keberlanjutan hidup yang telah dibangun selama generasi.

Dalam perspektif Ekofeminisme, konflik agraria memperlihatkan bagaimana tubuh manusia, alam, dan ruang hidup sama-sama berada dalam struktur dominasi yang dibangun oleh sistem patriarki dan kapitalisme modern. Alam diperlakukan sebagai objek produksi, sementara masyarakat kecil diposisikan sebagai hambatan pembangunan yang dapat disingkirkan demi kepentingan ekonomi.

Perempuan menghadapi dampak konflik agraria secara berbeda dibandingkan laki-laki karena posisi sosial mereka sangat berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan sehari-hari komunitas. Ketika akses terhadap tanah dan sumber daya alam hilang, perempuan harus menghadapi perubahan besar dalam aspek pangan, kesehatan, pengasuhan, hingga stabilitas ekonomi keluarga.

Dalam banyak komunitas pedesaan, perempuan memiliki peran penting dalam produksi pangan dan

pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Hilangnya lahan pertanian berarti meningkatnya ketergantungan terhadap pasar dan menurunnya kemandirian ekonomi keluarga. Situasi ini sering memperbesar kerentanan perempuan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas.

Selain dampak ekonomi, konflik agraria juga sering menghadirkan tekanan psikologis dan sosial bagi perempuan. Ketidakpastian hidup, intimidasi aparat atau perusahaan, kriminalisasi warga, hingga pecahnya solidaritas komunitas menciptakan situasi sosial yang penuh ketegangan. Dalam kondisi tersebut, perempuan tidak hanya menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi juga berupaya mempertahankan kohesi sosial komunitas.

Meskipun sering diposisikan sebagai kelompok rentan, perempuan bukan sekadar korban dalam konflik lingkungan. Di berbagai daerah di Indonesia, perempuan justru menjadi aktor penting dalam gerakan mempertahankan tanah, air, hutan, dan ruang hidup komunitas. Mereka terlibat dalam pengorganisasian warga, aksi demonstrasi, pendidikan komunitas, hingga advokasi hukum dan media.

Keterlibatan perempuan dalam konflik agraria juga memperlihatkan perubahan penting dalam ruang politik masyarakat. Persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada di luar ranah perempuan perlahan berubah menjadi ruang perjuangan yang melibatkan perempuan secara aktif. Melalui pengalaman konflik, banyak perempuan membangun kesadaran politik mengenai hak atas tanah, keadilan ekologis, dan relasi kekuasaan dalam pembangunan.

Namun demikian, perempuan pejuang lingkungan masih menghadapi berbagai bentuk hambatan struktural. Budaya patriarki sering meminggirkan suara perempuan

dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun kebijakan publik. Tidak sedikit perempuan aktivis yang mengalami stereotip sosial, intimidasi, bahkan kekerasan karena dianggap melampaui peran gender tradisional.

Konflik agraria juga memperlihatkan bagaimana negara sering berada dalam posisi ambigu antara melindungi masyarakat dan mendukung investasi. Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan lebih memprioritaskan kepentingan industri dibandingkan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal. Situasi tersebut memperbesar ketimpangan kekuasaan antara komunitas dan korporasi.

Di sisi lain, gerakan perempuan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan agraria tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga mengenai hak menentukan arah kehidupan komunitas. Perempuan membawa perspektif yang lebih dekat dengan keberlangsungan hidup sehari-hari: tentang pangan, air bersih, kesehatan, dan masa depan generasi berikutnya.

Perspektif ini penting karena konflik lingkungan sering direduksi menjadi persoalan legalitas tanah atau investasi ekonomi semata, padahal dampaknya jauh melampaui aspek administratif. Ketika ruang hidup rusak, masyarakat kehilangan fondasi sosial yang menopang kehidupan mereka secara kolektif. Keterlibatan perempuan dalam konflik agraria dan lingkungan memperlihatkan bahwa perjuangan ekologis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan keadilan sosial dan demokrasi. Perempuan menunjukkan bahwa mempertahankan tanah dan lingkungan bukan sekadar mempertahankan sumber daya alam, tetapi juga mempertahankan hak hidup, martabat komunitas, dan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.

C. Gerakan Perempuan Akar Rumput

Jika selama ini pembicaraan mengenai kebijakan lingkungan sering didominasi oleh negara, akademisi, maupun organisasi besar, maka pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa banyak perubahan justru lahir dari komunitas-komunitas kecil yang bekerja di tingkat lokal. Di berbagai daerah, perempuan menjadi bagian penting dari proses tersebut melalui apa yang sering disebut sebagai gerakan akar rumput (*grassroots movement*), yaitu gerakan yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari masyarakat dan berkembang dari bawah, bukan dari institusi formal.

Keberadaan gerakan perempuan akar rumput menjadi penting karena krisis ekologis pada dasarnya selalu hadir dalam bentuk yang sangat lokal. Perubahan bentang alam, hilangnya sumber air, alih fungsi lahan, atau pencemaran lingkungan pertama kali dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar wilayah terdampak. Dalam situasi seperti itu, respons awal sering kali tidak lahir dari kebijakan negara, melainkan dari komunitas yang berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya sendiri.

Dalam konteks Indonesia, gerakan perempuan akar rumput memiliki karakter yang berbeda dibandingkan banyak gerakan lingkungan di negara-negara Barat. Jika gerakan lingkungan di negara maju sering berangkat dari kesadaran konservasi atau perubahan iklim, maka banyak gerakan perempuan di Indonesia tumbuh dari kebutuhan mempertahankan sumber kehidupan yang sangat mendasar. Perjuangan mereka lahir dari persoalan yang konkret: menjaga mata air, mempertahankan lahan pertanian, melindungi wilayah tangkap nelayan, atau mempertahankan kawasan adat dari ekspansi industri.

Karena lahir dari pengalaman hidup sehari-hari, gerakan perempuan akar rumput tidak selalu menggunakan

bahasa aktivisme yang formal. Banyak perempuan yang terlibat bahkan tidak menyebut dirinya aktivis lingkungan. Mereka adalah petani, nelayan, ibu rumah tangga, pengrajin, atau anggota komunitas adat yang merasa bahwa ruang hidup mereka sedang terancam.

Di sinilah letak kekuatan gerakan akar rumput. Legitimasi perjuangan tidak diperoleh dari jabatan, organisasi besar, atau kekuatan politik formal, tetapi dari kedekatan mereka dengan realitas yang diperjuangkan. Mereka berbicara bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai pihak yang mengalami langsung perubahan yang terjadi.

Karakter lain yang menonjol dari gerakan perempuan akar rumput di Indonesia adalah kuatnya dimensi komunitarian. Berbeda dengan model gerakan yang berorientasi pada figur pemimpin tertentu, banyak gerakan perempuan dibangun melalui jaringan solidaritas yang bersifat kolektif. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, kerja-kerja advokasi dilakukan secara bersama, dan keberhasilan perjuangan dipahami sebagai keberhasilan komunitas, bukan individu.

Aspek yang menarik adalah kemampuan perempuan membangun jembatan antara isu ekologis dan kehidupan sosial masyarakat. Mereka mampu menerjemahkan persoalan lingkungan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh warga. Isu tata ruang, degradasi ekosistem, atau eksploitasi sumber daya alam diterjemahkan menjadi persoalan tentang masa depan anak-anak, keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, atau akses terhadap sumber air. Dengan demikian, perjuangan lingkungan menjadi dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam perkembangannya, gerakan perempuan akar rumput juga semakin mampu memanfaatkan berbagai

instrumen advokasi modern. Jika pada masa sebelumnya perjuangan lebih banyak dilakukan melalui mobilisasi komunitas lokal, saat ini banyak kelompok perempuan yang mampu membangun jaringan dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, hingga lembaga bantuan hukum. Kolaborasi tersebut memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Namun, yang paling penting dari gerakan perempuan akar rumput adalah kemampuannya menghadirkan bentuk politik alternatif. Politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas partai atau institusi negara, melainkan sebagai upaya masyarakat mempertahankan hak menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri. Dalam pengertian ini, perempuan tidak hanya menjadi peserta gerakan lingkungan, tetapi juga produsen gagasan mengenai bagaimana kehidupan yang berkelanjutan seharusnya dibangun.

Dengan demikian, gerakan perempuan akar rumput di Indonesia memperlihatkan bahwa transformasi sosial tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan. Perubahan sering kali dimulai dari komunitas-komunitas kecil yang berani mempertahankan hak hidupnya di tengah tekanan pembangunan yang semakin besar.

D. Studi Kasus: Membaca Konflik Ekologis Indonesia dari Perspektif Ekofeminis

Konflik lingkungan di Indonesia memiliki bentuk yang beragam. Meskipun sama-sama berangkat dari persoalan pengelolaan sumber daya alam, setiap konflik memiliki karakteristik, aktor, serta konteks sosial yang berbeda. Karena itu, studi kasus dalam perspektif ekofeminis tidak hanya bertujuan mendokumentasikan peristiwa, tetapi juga memahami bagaimana relasi antara kekuasaan,

lingkungan, dan kehidupan masyarakat bekerja dalam berbagai konteks.

Lima kasus berikut dipilih bukan semata-mata karena tingkat popularitasnya, melainkan karena masing-masing mewakili tipe konflik ekologis yang berbeda dalam pembangunan Indonesia.

1. Kendeng: Politik Air dan Pertarungan atas Ruang Karst

Kasus Kendeng merepresentasikan konflik mengenai fungsi ekologis suatu wilayah. Perdebatan utama bukan hanya mengenai keberadaan industri semen, tetapi mengenai cara masyarakat memaknai pegunungan karst. Bagi perusahaan dan negara, kawasan tersebut dipandang sebagai sumber bahan baku industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun bagi masyarakat, terutama perempuan petani, pegunungan karst merupakan sistem ekologis yang menopang keberlangsungan pertanian dan kehidupan desa. Konflik Kendeng menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sering kali merupakan pertarungan antara dua cara pandang terhadap alam: alam sebagai komoditas dan alam sebagai penyangga kehidupan.

2. Hutan Adat: Politik Pengakuan

Berbeda dengan Kendeng yang berfokus pada fungsi ekologis kawasan, konflik hutan adat berpusat pada persoalan pengakuan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat telah hidup dan mengelola wilayahnya selama berabad-abad. Namun sistem hukum modern sering kali tidak sepenuhnya mengakui keberadaan hak-hak tradisional tersebut.

Akibatnya, ketika negara memberikan izin pengelolaan kepada pihak lain, masyarakat adat

berada dalam posisi rentan karena kehilangan legitimasi formal atas wilayah yang selama ini mereka tempati. Dari perspektif ekofeminis, konflik hutan adat memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap komunitas yang hidup bersama lingkungan tersebut.

3. Sawit: Politik Komoditas Global

Kasus sawit menunjukkan bagaimana dinamika global dapat memengaruhi ruang hidup masyarakat lokal. Tidak seperti konflik lain yang lebih banyak dipicu oleh kebutuhan domestik, ekspansi sawit sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional. Komoditas ini menjadi bagian dari rantai ekonomi global yang melibatkan berbagai negara dan perusahaan multinasional.

Dalam konteks tersebut, masyarakat lokal sering menghadapi situasi yang paradoksal. Di satu sisi, sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Namun di sisi lain, perluasan perkebunan dapat mengubah struktur sosial dan ekologis wilayah secara signifikan. Kasus sawit memperlihatkan bagaimana keputusan ekonomi yang dibuat pada tingkat global dapat menghasilkan konsekuensi sosial dan ekologis di tingkat lokal.

4. Tambang: Politik Ekstraksi

Kasus pertambangan mewakili model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Karakter utama sektor pertambangan adalah sifatnya yang sangat bergantung pada eksploitasi ruang dalam waktu tertentu. Ketika sumber daya habis, aktivitas produksi berpindah ke wilayah lain, sementara masyarakat lokal sering harus menghadapi dampak jangka panjang dari perubahan yang terjadi.

Dalam perspektif ekofeminis, konflik tambang memperlihatkan ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan kehidupan jangka panjang. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai berapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang harus menanggung risiko.

5. Reklamasi Pesisir: Politik Ruang dan Masa Depan Kota

Reklamasi pesisir menghadirkan bentuk konflik yang berbeda karena berkaitan dengan transformasi ruang. Jika konflik tambang atau hutan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, reklamasi sering berlangsung di kawasan pesisir yang terhubung dengan pertumbuhan kota dan investasi properti.

Kasus ini menunjukkan bagaimana pembangunan modern sering kali menciptakan kompetisi antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir. Dari perspektif ekofeminis, reklamasi memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya tentang perlindungan ekosistem, tetapi juga tentang siapa yang memiliki hak menentukan masa depan suatu wilayah.

E. Masa Depan Gerakan Ekofeminisme di Indonesia

Gerakan ekofeminisme di Indonesia tidak lahir di ruang yang hampa. Ia tumbuh dari berbagai pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi ketimpangan pembangunan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, marginalisasi perempuan, hingga hilangnya ruang hidup komunitas lokal. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan di

akar rumput telah menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Namun, di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: ke mana arah gerakan ekofeminis Indonesia di masa depan?

Pertanyaan ini menjadi penting karena masa depan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya merespons tantangan, tetapi juga oleh kemampuannya membaca peluang dan membangun agenda transformasi yang relevan dengan perubahan zaman. Gerakan ekofeminisme di Indonesia saat ini berada pada fase yang menarik. Di satu sisi, berbagai ancaman terhadap lingkungan masih terus berlangsung. Di sisi lain, kesadaran publik terhadap isu lingkungan, perubahan iklim, dan keadilan sosial semakin meningkat. Situasi ini menciptakan ruang baru yang memungkinkan gerakan ekofeminisme berkembang lebih luas dan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Karena itu, masa depan gerakan ekofeminis Indonesia tidak hanya perlu dibicarakan dalam kerangka tantangan, tetapi juga dalam kerangka peluang dan transformasi sosial yang dapat dibangun secara kolektif.

Salah satu tantangan terbesar gerakan ekofeminisme selama ini adalah bagaimana mengubah gagasan dan praktik perlawanan di tingkat komunitas menjadi bagian dari kebijakan publik yang lebih luas. Banyak pengalaman perempuan dalam menjaga lingkungan telah menghasilkan pengetahuan yang kaya mengenai pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, ketahanan pangan, dan keberlanjutan kehidupan. Namun pengetahuan tersebut sering berhenti pada level lokal dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses perumusan kebijakan.

Masa depan gerakan ekofeminisme Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya melakukan institusionalisasi perspektif ekofeminisme ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Institusionalisasi bukan berarti menjadikan gerakan kehilangan daya kritisnya, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai keadilan ekologis dan kesetaraan gender dapat memengaruhi cara negara menyusun kebijakan.

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, mendorong pengarusutamaan perspektif gender dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Selama ini, banyak program lingkungan masih menggunakan pendekatan yang bersifat netral gender sehingga mengabaikan pengalaman spesifik perempuan. Padahal perempuan sering menjadi kelompok yang mengalami dampak berbeda dari berbagai kebijakan maupun krisis ekologis.

Kedua, memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Kehadiran perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan lingkungan, hingga pengelolaan wilayah adat perlu diperluas agar berbagai pengalaman yang selama ini berada di pinggiran dapat menjadi bagian dari proses kebijakan.

Ketiga, mendorong pengakuan terhadap praktik-praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang telah dikembangkan perempuan. Banyak inovasi sosial yang lahir dari masyarakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan apabila memperoleh dukungan yang memadai. Dengan demikian, masa depan gerakan ekofeminis tidak hanya berada di ruang-ruang demonstrasi atau advokasi publik, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan tempat berbagai

keputusan strategis mengenai masa depan lingkungan dan masyarakat ditentukan.

Tidak hanya itu, setiap gerakan sosial membutuhkan regenerasi agar tetap hidup dan relevan. Tanpa regenerasi, gerakan berisiko kehilangan energi, kehilangan perspektif baru, dan mengalami stagnasi. Dalam konteks gerakan ekofeminis Indonesia, regenerasi menjadi isu yang sangat penting mengingat perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Generasi muda saat ini tumbuh dalam situasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup di tengah ancaman perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, serta arus informasi global yang sangat cepat. Mereka juga akan menjadi generasi yang paling lama menghadapi dampak krisis ekologis yang sedang berlangsung saat ini. Karena itu, perempuan muda memiliki posisi yang sangat strategis dalam masa depan gerakan ekofeminis. Mereka tidak hanya menjadi penerus gerakan, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak utama transformasi sosial-ekologis di masa mendatang.

Tantangan yang perlu dijawab ke depan adalah bagaimana menciptakan ruang yang memungkinkan perempuan muda berpartisipasi secara bermakna. Regenerasi tidak cukup dilakukan melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui transfer kepemimpinan. Gerakan perlu membuka ruang bagi munculnya gagasan-gagasan baru, metode advokasi baru, dan bentuk-bentuk organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika perempuan muda diberi ruang untuk memimpin, gerakan ekofeminisme akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjawab tantangan masa depan sekaligus memperluas jangkauan perjuangannya.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi,

mengorganisasi diri, dan membangun gerakan sosial. Jika pada masa lalu advokasi banyak bergantung pada pertemuan fisik, media cetak, atau jaringan organisasi konvensional, maka saat ini ruang digital menjadi arena penting dalam membentuk opini publik dan menggerakkan solidaritas sosial.

Bagi gerakan ekofeminisme Indonesia, perkembangan ini membuka peluang yang sangat besar. Media sosial, platform digital, podcast, video pendek, hingga berbagai bentuk jurnalisme warga memungkinkan isu-isu lingkungan dan perempuan menjangkau audiens yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Digitalisasi advokasi juga memungkinkan pengalaman masyarakat lokal yang selama ini tidak terdengar memperoleh ruang di tingkat nasional bahkan internasional. Konflik lingkungan yang terjadi di desa terpencil kini dapat diketahui publik dalam waktu singkat melalui berbagai platform digital. Perempuan yang memperjuangkan ruang hidup komunitasnya dapat menyampaikan suaranya secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media arus utama.

Salah satu pelajaran penting dari berbagai gerakan sosial di Indonesia adalah bahwa perubahan besar hampir tidak pernah dicapai oleh satu kelompok secara sendirian. Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan, sehingga membutuhkan kerja sama lintas isu dan lintas sektor.

Gerakan ekofeminisme memiliki potensi besar untuk menjadi ruang pertemuan berbagai perjuangan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu masyarakat adat. Isu perubahan iklim berkaitan erat dengan kehidupan petani dan nelayan. Persoalan akses terhadap sumber daya juga berhubungan dengan perjuangan kelompok disabilitas,

kelompok miskin perkotaan, dan berbagai komunitas rentan lainnya.

Karena itu, masa depan gerakan ekofeminisme Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya membangun kolaborasi yang lebih luas. Kolaborasi bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi proses membangun pemahaman bahwa berbagai bentuk ketidakadilan memiliki akar yang saling berhubungan.

Perempuan adat yang mempertahankan hutan sesungguhnya sedang memperjuangkan keberlanjutan ekologis sekaligus hak kolektif komunitasnya. Nelayan perempuan yang menolak reklamasi tidak hanya mempertahankan mata pencaharian, tetapi juga melindungi ekosistem pesisir. Kelompok disabilitas yang memperjuangkan akses terhadap lingkungan yang aman juga sedang memperjuangkan hak atas kehidupan yang bermartabat. Seluruh perjuangan tersebut memiliki titik temu dalam upaya mempertahankan kehidupan dari berbagai bentuk marginalisasi dan eksploitasi.

Kolaborasi lintas gerakan memungkinkan terbentuknya solidaritas yang lebih kuat. Ia memperluas basis dukungan sosial, memperkaya perspektif perjuangan, dan meningkatkan kapasitas gerakan dalam memengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, pendekatan kolaboratif juga penting untuk memastikan bahwa perjuangan keadilan ekologis tidak hanya menjadi agenda kelompok tertentu, tetapi menjadi agenda bersama seluruh masyarakat.

Masa depan gerakan ekofeminisme Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya melawan berbagai bentuk ketidakadilan, tetapi juga oleh kemampuannya menawarkan visi mengenai masa depan yang ingin dibangun. Gerakan ekofeminis perlu menjadi gerakan transformasi. Gerakan yang tidak hanya

mengatakan apa yang harus ditolak, tetapi juga menunjukkan apa yang perlu dibangun. Tidak hanya mengkritik model pembangunan yang merusak, tetapi juga menawarkan model pembangunan yang lebih adil. Tidak hanya menyoroti krisis ekologis, tetapi juga menghadirkan berbagai praktik keberlanjutan yang dapat menjadi inspirasi perubahan.

Dalam konteks itulah ekofeminisme memiliki relevansi yang semakin kuat. Ia menawarkan cara pandang yang menghubungkan keadilan sosial, kesetaraan gender, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka perjuangan yang utuh. Masa depan gerakan ekofeminis Indonesia mungkin tidak selalu mudah. Berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial akan terus muncul. Namun selama masih ada perempuan yang menjaga sumber air, mempertahankan hutan, melindungi pesisir, mengorganisasi komunitas, mendukung masyarakat, dan memperjuangkan kehidupan yang lebih adil, harapan akan selalu ada.[]



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BAB VIII

MEMBANGUN MASA DEPAN BERKEADILAN EKOLOGIS

A. Etika Kepedulian terhadap Alam

Krisis ekologis yang dihadapi dunia saat ini sering dipahami sebagai persoalan teknis yang membutuhkan solusi teknis. Berbagai upaya dilakukan melalui inovasi teknologi, pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, hingga perbaikan tata kelola sumber daya alam. Langkah-langkah tersebut tentu penting dan perlu terus didorong. Namun, jika dicermati lebih dalam, berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berakar pada persoalan teknologi atau kebijakan, melainkan pada cara manusia memandang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam.

Selama berabad-abad, perkembangan peradaban modern banyak dipengaruhi oleh pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh

kehidupan. Alam dipahami sebagai objek yang tersedia untuk dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Nilai suatu hutan diukur dari jumlah kayu yang dapat dihasilkan, nilai sungai diukur dari potensi ekonominya, dan nilai tanah diukur dari produktivitas yang mampu diberikan kepada pasar. Dalam logika seperti ini, hubungan manusia dengan alam menjadi hubungan yang bersifat instrumental: alam dianggap penting sejauh memberikan manfaat bagi kepentingan manusia.

Pandangan tersebut melahirkan disebut sebagai etika dominasi. Dalam etika dominasi, keberhasilan diukur melalui kemampuan mengendalikan, menguasai, dan mengeksploitasi. Alam ditempatkan sebagai sesuatu yang berada di bawah manusia dan karena itu dianggap sah untuk dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan batas-batas ekologis yang ada. Cara berpikir inilah yang kemudian melahirkan berbagai praktik pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Perspektif ekofeminis menawarkan kritik yang mendasar terhadap etika dominasi tersebut. Ekofeminisme berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan tidak dibangun melalui relasi kekuasaan yang bersifat eksploitatif, melainkan melalui relasi saling ketergantungan. Tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bergantung pada sistem kehidupan yang lebih luas. Udara yang dihirup, air yang diminum, tanah yang menghasilkan pangan, serta berbagai ekosistem yang menopang kehidupan merupakan bagian dari jaringan relasi yang memungkinkan manusia bertahan hidup.

Kesadaran mengenai saling ketergantungan ini melahirkan pemahaman yang dikenal sebagai etika kepedulian (*ethics of care*). Dalam etika kepedulian, nilai utama bukanlah dominasi, melainkan tanggung jawab. Bukan kemampuan menguasai, melainkan kemampuan

merawat. Kehidupan dipahami sebagai sesuatu yang harus dijaga bersama, bukan sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas.

Etika kepedulian mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan karena keberlangsungan kehidupan bergantung pada kualitas hubungan tersebut. Menjaga sungai tetap bersih bukan semata-mata tindakan konservasi, tetapi bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang bergantung pada sungai tersebut. Melindungi hutan bukan hanya soal menjaga pohon, melainkan menjaga sistem ekologis yang menopang keberlangsungan berbagai makhluk hidup.

Dalam konteks Indonesia, etika kepedulian sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat telah lama mengembangkan nilai-nilai yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam. Berbagai praktik pengelolaan sumber daya tradisional menunjukkan bahwa keberlanjutan sering kali lahir dari kesadaran mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan.

Namun demikian, modernisasi ekonomi yang berlangsung cepat sering kali menggeser nilai-nilai tersebut. Hubungan yang sebelumnya didasarkan pada prinsip keberlanjutan berubah menjadi hubungan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Alam semakin dipandang sebagai aset ekonomi, sementara fungsi ekologisnya sering terabaikan.

Karena itu, membangun masa depan berkeadilan ekologis membutuhkan pemulihan etika kepedulian sebagai fondasi kehidupan bersama. Tanpa perubahan nilai, berbagai kebijakan lingkungan berisiko hanya menjadi instrumen administratif yang tidak menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, ketika kepedulian menjadi bagian dari budaya sosial, perlindungan lingkungan tidak lagi

dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Etika kepedulian mengingatkan bahwa masa depan bumi tidak akan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan manusia mengendalikan alam, melainkan oleh seberapa jauh manusia mampu hidup berdampingan dengan alam secara bertanggung jawab. Di tengah krisis ekologis yang semakin kompleks, kemampuan untuk merawat mungkin menjadi bentuk kecerdasan yang paling dibutuhkan oleh peradaban manusia.

B. Pendidikan Lingkungan Berperspektif Gender

Jika etika kepedulian merupakan fondasi moral bagi masa depan yang berkelanjutan, maka pendidikan merupakan sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi yang akan datang. Tidak ada transformasi sosial yang dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa proses pendidikan yang mampu membentuk kesadaran baru mengenai hubungan manusia dengan lingkungan.

Selama ini pendidikan lingkungan sering dipahami sebagai proses penyampaian pengetahuan mengenai alam dan berbagai persoalan ekologis. Siswa diajarkan mengenai pencemaran, perubahan iklim, pengelolaan sampah, atau konservasi sumber daya alam. Meskipun penting, pendekatan semacam itu sering kali masih berfokus pada aspek teknis dan kurang menyentuh dimensi sosial yang membentuk persoalan lingkungan.

Padahal krisis ekologis tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alam, tetapi juga dengan relasi kuasa, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan distribusi risiko yang tidak merata dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan lingkungan yang efektif tidak cukup hanya

menjelaskan bagaimana lingkungan bekerja, tetapi juga perlu membantu peserta didik memahami bagaimana keputusan sosial dan politik memengaruhi keberlanjutan kehidupan.

Dalam konteks inilah perspektif gender menjadi penting. Pendidikan lingkungan yang berperspektif gender berupaya menunjukkan bahwa pengalaman manusia terhadap lingkungan tidak selalu sama. Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan gender dapat memengaruhi bagaimana seseorang mengalami dampak perubahan lingkungan maupun bagaimana ia berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Perspektif ini tidak bertujuan menciptakan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, melainkan membantu peserta didik memahami bahwa keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan memahami hubungan tersebut, generasi muda dapat melihat persoalan lingkungan secara lebih utuh dan kritis.

Pendidikan lingkungan berperspektif gender juga membuka ruang bagi pengakuan terhadap berbagai bentuk pengetahuan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Pengalaman perempuan dalam mengelola pangan, menjaga kesehatan keluarga, memanfaatkan sumber daya lokal, atau mengembangkan praktik-praktik keberlanjutan sering kali mengandung pengetahuan ekologis yang berharga. Namun pengetahuan tersebut tidak selalu hadir dalam kurikulum formal.

Mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam proses pendidikan dapat memperkaya cara masyarakat memahami lingkungan. Selain itu, pendekatan ini membantu mengembangkan kesadaran bahwa solusi terhadap krisis ekologis tidak hanya lahir dari laboratorium

atau institusi formal, tetapi juga dari pengalaman hidup masyarakat sehari-hari.

Di era perubahan iklim, pendidikan lingkungan juga memiliki fungsi strategis dalam membangun literasi ekologis. Generasi muda perlu memahami bahwa persoalan lingkungan bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Kemampuan membaca informasi lingkungan, memahami risiko perubahan iklim, dan mengembangkan perilaku yang berkelanjutan akan menjadi keterampilan penting dalam menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.

Karena itu, pendidikan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat yang berkeadilan ekologis. Pendidikan tidak hanya bertugas menghasilkan individu yang kompetitif secara ekonomi, tetapi juga warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dari ruang-ruang pendidikan inilah masa depan yang lebih berkelanjutan mulai dibangun.

C. Ekonomi Berkelanjutan dan Kehidupan Komunal

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan keadilan ekologis adalah kenyataan bahwa sebagian besar sistem ekonomi modern masih bertumpu pada logika pertumbuhan tanpa batas. Keberhasilan ekonomi sering diukur melalui peningkatan produksi, konsumsi, dan akumulasi keuntungan. Dalam kerangka tersebut, sumber daya alam dipandang sebagai modal yang harus dioptimalkan untuk menghasilkan nilai ekonomi sebesar mungkin. Akibatnya, keberlanjutan ekologis kerap ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder yang baru diperhatikan ketika kerusakan lingkungan telah terjadi.

Model pembangunan seperti ini telah menghasilkan berbagai kemajuan material, tetapi juga menciptakan konsekuensi yang semakin sulit diabaikan. Krisis iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya ketimpangan sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan kehidupan. Bahkan dalam banyak kasus, pertumbuhan justru diperoleh dengan mengorbankan fondasi ekologis yang menopang kehidupan manusia itu sendiri.

Perspektif ekofeminis mengajak kita melihat bahwa persoalan tersebut bukan hanya masalah distribusi keuntungan ekonomi, melainkan persoalan paradigma. Sistem ekonomi modern cenderung menghargai aktivitas yang menghasilkan nilai pasar, tetapi sering mengabaikan berbagai bentuk kerja yang sesungguhnya menopang kehidupan. Kerja perawatan, pengasuhan, pemeliharaan komunitas, dan pengelolaan lingkungan sering dianggap tidak produktif karena tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial yang dapat dihitung secara langsung.

Padahal tanpa kerja-kerja tersebut, masyarakat tidak akan mampu bertahan. Tidak ada perekonomian yang dapat berjalan tanpa adanya keluarga yang merawat generasi baru, komunitas yang menjaga solidaritas sosial, atau lingkungan yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Dengan kata lain, kehidupan merupakan fondasi dari ekonomi, bukan sebaliknya.

Karena itu, membangun ekonomi berkelanjutan membutuhkan perubahan cara pandang mengenai tujuan aktivitas ekonomi itu sendiri. Ekonomi tidak seharusnya menjadi tujuan akhir pembangunan, melainkan alat untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Ketika kehidupan ditempatkan sebagai tujuan utama, maka keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur

melalui pertumbuhan, tetapi juga melalui kemampuannya menjaga keseimbangan ekologis, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kesejahteraan komunitas.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai alternatif ekonomi mulai berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model pembangunan konvensional. Konsep ekonomi solidaritas, ekonomi sirkular, agroekologi, koperasi komunitas, serta berbagai bentuk usaha berbasis masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat diselenggarakan dengan cara yang lebih berkelanjutan. Meskipun berbeda dalam praktiknya, berbagai pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam upayanya menempatkan manusia dan lingkungan sebagai bagian penting dari proses ekonomi.

Ekonomi solidaritas, misalnya, menekankan kerja sama dibandingkan kompetisi. Keuntungan tidak hanya dipahami sebagai akumulasi modal individu, tetapi juga sebagai peningkatan kesejahteraan bersama. Sementara ekonomi sirkular berupaya mengurangi pemborosan sumber daya dengan mendorong penggunaan kembali, daur ulang, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Di sisi lain, pendekatan agroekologi berusaha membangun sistem pangan yang produktif sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan ekonomi berkelanjutan sesungguhnya memiliki landasan sosial yang kuat. Berbagai praktik gotong royong, kerja kolektif, pengelolaan sumber daya bersama, serta tradisi ekonomi berbasis komunitas telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi tidak selalu harus dibangun melalui persaingan individualistik, tetapi dapat berkembang melalui kerja sama dan tanggung jawab bersama.

Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali gagasan kehidupan komunal. Kehidupan komunal bukan berarti menolak modernitas atau kembali pada masa lalu secara romantis. Yang dimaksud adalah memperkuat kembali kesadaran bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan komunitas dan lingkungan tempat ia hidup. Dalam masyarakat yang semakin individualistik, penguatan solidaritas sosial menjadi bagian penting dari upaya membangun keberlanjutan.

Kehidupan komunal juga memiliki arti strategis dalam menghadapi berbagai krisis ekologis di masa depan. Perubahan iklim, bencana lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi membutuhkan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung. Komunitas yang memiliki solidaritas kuat umumnya lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan dibandingkan masyarakat yang sangat bergantung pada mekanisme pasar semata.

Selain itu, kehidupan komunal membuka ruang bagi pengelolaan sumber daya yang lebih demokratis. Banyak sumber daya penting seperti air, hutan, pesisir, dan lahan pertanian memiliki fungsi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi komoditas ekonomi. Pengelolaan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara adil dan berkelanjutan.

Tentu saja, membangun ekonomi berkelanjutan bukanlah tugas yang mudah. Sistem ekonomi global saat ini masih didominasi oleh kepentingan pasar dan akumulasi modal. Namun berbagai pengalaman di tingkat lokal menunjukkan bahwa alternatif selalu mungkin dibangun. Komunitas-komunitas di berbagai wilayah telah membuktikan bahwa kesejahteraan tidak harus dicapai melalui eksploitasi tanpa batas, tetapi dapat diwujudkan

melalui hubungan yang lebih harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Masa depan yang berkeadilan ekologis membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga kehidupan. Ekonomi yang baik bukanlah ekonomi yang tumbuh paling cepat, melainkan ekonomi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat tanpa menghancurkan fondasi ekologis yang menopang keberlangsungan generasi mendatang.

D. Perempuan sebagai Agen Perubahan

Selama perjalanan sejarah pembangunan, perempuan sering ditempatkan sebagai kelompok yang harus dilindungi dari berbagai dampak sosial dan ekologis. Perspektif tersebut memang penting untuk menunjukkan adanya ketimpangan yang masih berlangsung dalam masyarakat. Namun apabila pembahasan hanya berhenti pada aspek kerentanan, maka perempuan akan terus diposisikan sebagai objek kebijakan dan bukan sebagai aktor perubahan.

Salah satu kontribusi penting ekofeminisme adalah menggeser cara pandang tersebut. Ekofeminisme tidak hanya mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana perempuan memiliki kapasitas besar dalam membangun solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekologis. Dengan demikian, perempuan tidak dipahami sebagai korban pasif dari krisis lingkungan, melainkan sebagai subjek yang mampu mengorganisasi perubahan.

Pandangan ini penting karena banyak proses transformasi sosial sesungguhnya lahir dari pengalaman hidup sehari-hari yang sering tidak dianggap sebagai arena politik. Aktivitas merawat keluarga, mengelola pangan,

menjaga kesehatan komunitas, membangun solidaritas sosial, atau mengembangkan inisiatif ekonomi lokal sering dipandang sebagai aktivitas domestik yang tidak memiliki nilai strategis. Padahal dari ruang-ruang inilah banyak praktik keberlanjutan tumbuh dan berkembang.

Dalam berbagai komunitas di Indonesia, perempuan telah lama memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Mereka terlibat dalam pengelolaan pangan keluarga, pengembangan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, hingga berbagai bentuk kegiatan sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Peran tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai bagaimana kehidupan dipelihara dan dipertahankan dalam berbagai situasi.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ekologis masa depan. Krisis lingkungan bukan hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan membangun kerja sama, solidaritas, dan kapasitas adaptasi masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan menunjukkan kemampuan yang kuat dalam membangun jaringan sosial yang memungkinkan komunitas bertahan di tengah perubahan.

Selain itu, perempuan semakin memainkan peran penting dalam berbagai ruang pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun berbagai bentuk gerakan sosial menunjukkan bahwa ruang partisipasi semakin terbuka. Kehadiran perempuan dalam proses kebijakan membawa perspektif yang lebih beragam dan membantu memastikan bahwa berbagai pengalaman masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik.

Namun, penting untuk menegaskan bahwa penguatan peran perempuan tidak boleh dipahami sebagai upaya memindahkan seluruh tanggung jawab keberlanjutan

kepada perempuan. Tantangan ekologis merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dihadapi bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Yang perlu diperjuangkan adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara setara dalam berbagai proses yang menentukan masa depan bersama.

Karena itu, penguatan perempuan sebagai agen perubahan memerlukan dukungan dalam berbagai aspek. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan ekonomi yang adil, perlindungan terhadap hak-hak sosial, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting agar perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam proses transformasi sosial-ekologis.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada generasi muda perempuan. Mereka akan menjadi generasi yang hidup paling lama dengan konsekuensi perubahan iklim dan berbagai krisis lingkungan lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan melalui pendidikan, teknologi, inovasi sosial, dan berbagai bentuk partisipasi publik yang semakin berkembang.

Di berbagai belahan dunia, semakin banyak perempuan muda yang terlibat dalam kampanye lingkungan, penelitian ilmiah, advokasi kebijakan, hingga pengembangan berbagai inovasi keberlanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masa depan gerakan ekologis akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan generasi muda untuk menghubungkan isu lingkungan dengan perjuangan keadilan sosial yang lebih luas.

Perempuan sebagai agen perubahan bukanlah konsep yang lahir dari romantisasi terhadap perempuan. Ia lahir dari pengakuan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi perempuan merupakan bagian penting dari

proses membangun masa depan yang lebih adil. Masyarakat yang mampu menghargai dan melibatkan seluruh potensi warganya akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan.

E. Harapan Ekofeminisme bagi Masa Depan Bumi

Seluruh pembahasan dalam buku ini pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan mendasar: mungkinkah masa depan yang lebih adil bagi manusia dan alam dibangun di tengah berbagai krisis yang sedang berlangsung?

Pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban yang sederhana. Realitas yang dihadapi dunia saat ini memang menunjukkan berbagai tantangan yang serius. Perubahan iklim terus berlangsung, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan global, konflik sumber daya alam terjadi di berbagai wilayah, dan tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat seiring bertambahnya kebutuhan ekonomi manusia.

Namun sejarah juga menunjukkan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Berbagai kemajuan yang dinikmati manusia saat ini lahir dari keberanian untuk mempertanyakan cara berpikir yang sebelumnya dianggap wajar. Banyak bentuk ketidakadilan yang dahulu diterima sebagai sesuatu yang normal akhirnya dapat diubah melalui perjuangan panjang berbagai kelompok masyarakat. Harapan lahir bukan karena situasi yang mudah, tetapi karena adanya keyakinan bahwa perubahan dapat diupayakan.

Dalam konteks itulah ekofeminisme menawarkan kontribusi yang penting. Nilai utama ekofeminisme bukan hanya terletak pada kritiknya terhadap berbagai bentuk dominasi, tetapi pada kemampuannya menghadirkan visi

alternatif mengenai kehidupan. Ekofeminisme mengingatkan bahwa manusia tidak hidup terpisah dari alam, sebagaimana manusia juga tidak dapat hidup tanpa relasi sosial yang adil. Kehidupan berkembang melalui hubungan yang saling menopang, bukan melalui eksploitasi yang tidak mengenal batas.

Harapan yang ditawarkan ekofeminisme bukanlah harapan yang naif. Ia tidak mengabaikan kompleksitas persoalan yang dihadapi dunia saat ini. Sebaliknya, harapan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui perubahan yang menyentuh akar persoalan, yaitu cara manusia memahami hubungan dengan sesama dan dengan alam.

Masa depan bumi tidak hanya akan ditentukan oleh teknologi yang berhasil dikembangkan atau kebijakan yang berhasil disusun. Faktor yang sama pentingnya adalah nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Ketika kepedulian, tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan menjadi bagian dari budaya sosial, maka berbagai kebijakan dan inovasi akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menciptakan perubahan yang nyata.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut. Kekayaan ekologis, keragaman budaya, tradisi gotong royong, serta pengalaman panjang berbagai komunitas dalam mengelola lingkungan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan modal tersebut dalam konteks dunia modern tanpa kehilangan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan kehidupan.

Harapan terbesar ekofeminisme bukanlah terciptanya dunia yang bebas dari seluruh konflik dan persoalan. Harapan tersebut terletak pada kemungkinan membangun masyarakat yang lebih mampu merawat kehidupan, lebih adil dalam mengelola sumber daya, dan

lebih bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Karena sesungguhnya, masa depan bumi tidak hanya bergantung pada apa yang mampu kita ambil dari alam, tetapi pada apa yang mampu kita jaga bersama. Tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang dapat kita bangun, tetapi oleh seberapa besar kepedulian yang dapat kita tumbuhkan.

Dan di tengah berbagai tantangan zaman, pesan utama ekofeminisme tetap relevan: bahwa perjuangan untuk perempuan, perjuangan untuk lingkungan, dan perjuangan untuk keadilan pada dasarnya adalah perjuangan yang sama, yaitu perjuangan untuk memastikan bahwa kehidupan tetap memiliki ruang untuk tumbuh, berkembang, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Membela perempuan adalah membela kehidupan. Membela lingkungan adalah membela kehidupan. Dan membangun masa depan berkeadilan ekologis berarti memastikan bahwa kehidupan, dalam seluruh keberagamannya, tetap menjadi pusat dari setiap pilihan yang kita buat sebagai manusia.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Daftar Pustaka

Literatur Ekofeminisme

- Adams, Carol J. *Ecofeminism and the Sacred*. New York: Continuum, 1993.
- Agarwal, Bina. *Gender and Green Governance*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Gaard, Greta. *Ecofeminism: Women, Animals, Nature*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Mies, Maria & Vandana Shiva. *Ecofeminism*. London: Zed Books, 1993.
- Merchant, Carolyn. *The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution*. New York: HarperCollins, 1980.
- Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. London: Routledge, 1993.
- Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books, 1988.
- Warren, Karen J. *Ecofeminist Philosophy*. Maryland: Rowman & Littlefield, 2000.

Gender dan Lingkungan

- Agarwal, Bina. *A Field of One's Own*. Cambridge University Press.
- Rocheleau, Dianne et al. *Feminist Political Ecology*. Routledge.
- Salleh, Ariel. *Ecofeminism as Politics*. Zed Books.
- UN Women. *Gender, Climate Change and Disaster Risk Reduction*.

UNEP. *Global Gender and Environment Outlook*.

Indonesia

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). Berbagai Laporan Tahunan Konflik Agraria.

WALHI. Berbagai Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia.

AMAN. Laporan Masyarakat Adat dan Lingkungan.

Komnas Perempuan. *Perempuan Pembela HAM dan Konflik Sumber Daya Alam*.

KLHK. *Status Lingkungan Hidup Indonesia*.

BPS. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Profil Penulis

Isna Asaroh lahir di Jember pada 12 September 2000. Ia merupakan aktivis perempuan muda yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan gerakan sosial kemasyarakatan. Saat ini, Isna Asaroh mengemban amanah sebagai Ketua Bidang II Advokasi, Hukum, Gerakan, dan Pemberdayaan Masyarakat KOPRI PKC PMII Jawa Timur, sebuah posisi yang mempertemukannya secara langsung dengan berbagai isu keadilan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, serta advokasi lingkungan hidup.

Perjalanan organisasinya dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membentuk perspektif kritis sekaligus humanis dalam melihat berbagai persoalan masyarakat. Berinteraksi dengan komunitas akar rumput, kelompok perempuan, serta kelompok-kelompok rentan lainnya membuatnya semakin meyakini bahwa perjuangan keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menjaga lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Sebagai pegiat advokasi, Isna aktif mengangkat berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, perlindungan anak, kekerasan berbasis gender, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas sosial, serta keadilan ekologis. Baginya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keberpihakan kepada kelompok yang selama ini berada di pinggiran.

Selain aktif dalam gerakan sosial dan advokasi, Isna juga memiliki minat besar dalam dunia literasi dan kepenulisan. Ia percaya bahwa tulisan merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesadaran kritis,

menyebarkan gagasan perubahan, serta mendokumentasikan berbagai pengalaman sosial yang sering kali tidak terdengar dalam ruang-ruang kebijakan.

Sebelum buku ini, Isna telah menerbitkan dua karya buku, yaitu *Merajut Tenang di Pelukan Cemas*, sebuah refleksi tentang pergulatan manusia dalam menghadapi kecemasan dan dinamika kehidupan, serta *Belajar Tanpa Batas*, yang mengangkat semangat pembelajaran sebagai proses yang terus berlangsung sepanjang hayat. Melalui karya-karyanya, ia berupaya menghadirkan tulisan yang tidak hanya informatif dan akademik, tetapi juga dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari serta mampu membangun ruang refleksi bagi pembacanya.

Buku *Ekofeminisme dan Politik Kehidupan: Membela Perempuan, Membela Lingkungan* merupakan bagian dari ikhtiar intelektual sekaligus advokasi sosial yang dilakukan penulis. Buku ini lahir dari keyakinan bahwa perjuangan perempuan dan perjuangan lingkungan bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan bagian dari perjuangan yang sama, yakni untuk memperjuangkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Melalui buku ini, penulis berharap semakin banyak ruang dialog yang terbuka mengenai hubungan antara perempuan, lingkungan, dan keadilan sosial. Sebab pada akhirnya, masa depan yang lebih baik hanya dapat dibangun melalui kesadaran kolektif untuk merawat kehidupan dalam seluruh bentuknya.

"Menulis adalah cara saya merawat ingatan, menyuarakan kegelisahan, dan memperjuangkan harapan."

— Isna Asaroh

Ekofeminisme dan Politik Kehidupan

Membela Perempuan, Membela Lingkungan

Buku Ekofeminisme dan Politik Kehidupan: Membela Perempuan, Membela Lingkungan mengupas secara mendalam keterhubungan antara krisis lingkungan, ketidakadilan gender, dan dinamika kehidupan sosial kontemporer. Berangkat dari kenyataan bahwa kerusakan ekologis tidak pernah berlangsung secara netral, buku ini menunjukkan bagaimana perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, konflik agraria, serta berbagai bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan. Melalui perspektif ekofeminisme, buku ini menegaskan bahwa eksploitasi terhadap alam memiliki akar yang serupa dengan subordinasi terhadap perempuan, yakni sistem dominasi patriarki dan logika kapitalisme eksploitatif.

Secara sistematis, buku ini membahas sejarah lahirnya ekofeminisme, hubungan filosofis antara perempuan dan alam, kritik terhadap patriarki dan kapitalisme, hingga ragam aliran ekofeminisme sebagai gerakan intelektual dan sosial. Pembahasan diperluas pada isu politik kehidupan, krisis ekologi, eksploitasi tubuh perempuan, peran perempuan adat, kearifan lokal, gerakan advokasi lingkungan, hingga dinamika perjuangan perempuan dalam mempertahankan ruang hidup di Indonesia. Buku ini juga menghadirkan refleksi kritis mengenai pentingnya membangun kesadaran ekologis berbasis keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan hidup bersama.

Dengan pendekatan akademik yang tetap kontekstual dan mudah dipahami, buku ini layak menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, pemerhati gender, aktivis lingkungan, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa menjaga bumi bukan hanya soal melestarikan alam, tetapi juga memperjuangkan martabat manusia, keadilan sosial, dan masa depan kehidupan bersama.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT-02 RW 01 Tempuran Bantaran,
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp: 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechindonesia@gmail.com

